



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN

**PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN SIMALUNGUN
TAHUN ANGGARAN
2024**

**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN**

**NOMOR : 090/9180 /28.2/2023
900/ 900 /DPRD/2023
TANGGAL : 11 AGUSTUS 2023**

TENTANG

**KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024**

Yang bertandatangan dibawah ini:

- 1. Nama : RADIPOH HASIROLAN SINAGA
Jabatan : Bupati Simalungun
Alamat Kantor : Pematang Raya, Sumatera Utara**

Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Simalungun

- 2. a. Nama : TIMBUL JAYA H. SIBARANI
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Simalungun
Alamat Kantor : Pematang Raya, Sumatera Utara**
- b. Nama : S. SAMRIN GIRSANG
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Simalungun
Alamat Kantor : Pematang Raya, Sumatera Utara**
- c. Nama : ELIAS BARUS
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Simalungun
Alamat Kantor : Pematang Raya, Sumatera Utara**
- d. Nama : SASTRA JOYO SIRAIT
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Simalungun
Alamat Kantor : Pematang Raya, Sumatera Utara**

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Simalungun.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024, diperlukan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2024 sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan hal tersebut diatas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang menjadi dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2024.

Pamatang Raya, 11 Agustus 2023

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIMALUNGUN**



TIMBUL JAYA H. SIBARANI
KETUA

S. SAMRIN GIRSANG
WAKIL KETUA

ELIAS BARUS
WAKIL KETUA

SASTRA JOYO SIRAIT
WAKIL KETUA

BUPATI SIMALUNGUN



RADIAPOH HASIHOLOAN SINAGA

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD 2024

Pengelolaan keuangan daerah tentunya tidak akan terlepas dari proses perencanaan dan penganggaran yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pengelolaan keuangan yang efektif akan menghasilkan program kerja yang optimal. Pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya akan efektif apabila sistem perencanaan dan penganggaran sesuai dengan aturan dan prosedur yang sudah ada. Salah satu prosedur atau tahapan dalam penyusunan anggaran adalah penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Kebijakan Umum APBD (KUA) menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan dokumen yang memuat kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2024 merupakan salah satu prosedur atau tahapan dalam penyusunan Rancangan Anggaran dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2024 dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2024, yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk dibahas dan disepakati bersama.

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2024 berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Simalungun Tahun 2024 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Simalungun Nomor 46 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2024. RKPD Tahun 2024 memberikan arah dan tujuan pembangunan yang akan dicapai selama 1 (satu) tahun yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, sasaran dan prioritas pembangunan daerah, dan rencana kerja dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

1.2 Tujuan Penyusunan KUA

Penyusunan KUA Tahun Anggaran 2024 bertujuan untuk :

1. Menyediakan dokumen arah Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Simalungun untuk Tahun 2024 yang akuntabel yang meliputi pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indikator makro lainnya guna dijadikan dasar dalam perencanaan pembangunan daerah dan APBD tahun anggaran 2024.
2. Menyusun asumsi dasar penyusunan APBD Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2024 yang rasional dan realistis yang akan digunakan sebagai dasar penyusunan APBD Kabupaten Simalungun tahun anggaran 2024.
3. Sebagai pedoman yang digunakan dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2024 yang selanjutnya akan dijadikan pedoman bagi seluruh SKPD dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran.

4. Menjamin terciptanya keterkaitan, konsistensi dan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan secara terpadu, baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota.
5. Meningkatkan koordinasi antara eksekutif dan legislatif dalam memantapkan penyusunan perencanaan anggaran yang transparan dan akuntabel.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan KUA

Dasar – Dasar hukum yang melandasi penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah

- diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 14. Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12);
 16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Program Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 50);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 5 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2007 Nomor 5 Seri D Nomor 5);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Simalungun Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2016 Nomor 3 Seri D Nomor 3);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2023 Nomor 1);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pembentukan Kecamatan Dolog Masagal (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2017 Nomor 3 Seri D Nomor 3);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2011 Nomor 7 Seri A Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2018 Nomor 3 Seri D Nomor 3);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
28. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 25 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Pada Organisasi Badan-Badan, Inspektorat Kabupaten dan Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei Kabupaten Simalungun (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2016 Nomor 285 Tahun 2016) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Simalungun Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Simalungun Nomor 25 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Pada Organisasi Badan – Badan, Inspektorat Kabupaten, Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) dan Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei Kabupaten Simalungun (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2019 Nomor 414);
29. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penerapan Aplikasi E-Perencanaan Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Simalungun (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 351);
30. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 46 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2024 (Berita Daerah Simalungun Tahun 2023 Nomor 604).

1.4 Sistematika Penulisan

Kebijakan Umum APBD Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar belakang penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)
- 1.2 Tujuan penyusunan KUA
- 1.3 Dasar (hukum) penyusunan KUA

- II. KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH
 - 2.1 Arah kebijakan ekonomi daerah
 - 2.2 Arah kebijakan keuangan daerah
- III. ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)
 - 3.1 Asumsi dasar yang digunakan dalam APBD
- IV. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH
 - 4.1 Kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang diproyeksikan untuk tahun anggaran 2024.
 - 4.2 Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah(PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
- V. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH
 - 5.1 Kebijakan terkait dengan perencanaan belanja
 - 5.2 Rencana belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanja tidak terduga
- VI. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH
 - 6.1 Kebijakan penerimaan pembiayaan
 - 6.2 Kebijakan pengeluaran pembiayaan
- VII. STRATEGI PENCAPAIAN

Pada bab ini memuat langkah konkret dalam mencapai target
- VIII. PENUTUP

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

2.1.1 Nilai dan Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Perekonomian Kabupaten Simalungun dua tahun terakhir menunjukkan keadaan yang terus membaik/meningkat. Nilai PDRB ADHB mengalami peningkatan dimana PDRB ADHB 2022 Rp. 47.285,89 Juta Rupiah dan PDRB ADHK Rp. 29.990,35 Juta Rupiah seperti terdapat pada table berikut:

Tabel 2.1.
Nilai dan Kontribusi Sektor Dalam PDRB Tahun 2021-2022 Atas Dasar
Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Simalungun (Juta Rupiah)

NO	LAPANGAN USAHA	2021		2022	
		(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	21.858,72	49,99	24.915,28	52,99
B	Pertambangan dan Penggalian	89,55	0,23	98,92	0,21
C	Industri Pengolahan	4.550,63	11,54	5.294,18	11,20
D	Pengadaan Listrik dan Gas,	28,43	0,07	30,28	0,06
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	35,24	0,09	36,72	0,08
F	Konstruksi	4.252,70	10,25	4.602,29	9,73
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reperasi Mobil dan Sepeda Motor	6747,21	16,44	7.456,19	15,77
H	Transportasi dan Pergudangan	692,89	1,68	771,79	1,63
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	335,35	0,89	359,92	0,76
J	Informasi dan Komunikasi	237,49	0,56	256,34	0,54
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	471,26	1,10	53,44	1,09
L	Real Estate	380,78	0,94	397,64	0,84
M,N	Jasa Perusahaan	37,76	0,09	42,00	0,09
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.824,11	4,56	1.829,97	3,87
P	Jasa Pendidikan	435,90	1,07	457,10	0,97
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	165,60	0,42	173,19	0,37
R,S, T,U	Jasa Lainnya	47,39	0,12	51,62	0,11
PDRB ADHB		42.576,88	100	47.285,89	100

Sumber: Simalungun Dalam Angka Kabupaten Simalungun 2023, BPS Kab.Simalungun

Tabel 2.2.
 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2018-2021 Atas Dasar Harga
 Konstan (ADHK) Tahun 2010 Kabupaten Simalungun (Juta Rupiah)

NO	LAPANGAN USAHA	2021		2022	
		(Rp)	%	(Rp)	%
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	16.663,11	57,39	17.619,36	58,75
B	Pertambangan dan Penggalian	64,49	0,23	66,52	0,22
C	Industri Pengolahan	2.790,98	9,90	2.847,09	9,49
D	Pengadaan Listrik dan Gas	24,39	0,09	25,40	0,08
E	Pengadaan Air Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	22,89	0,08	23,65	0,07
F	Konstruksi	2.408,57	8,52	2.450,43	8,17
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reperasi Mobil dan Sepeda Motor	3.798,32	13,55	3.995,92	13,32
H	Transportasi dan Pergudangan	436,03	1,56	467,86	1,56
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	225,26	0,82	238,10	0,79
J	Informasi dan Komunikasi	206,89	0,71	218,77	0,72
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	261,81	0,91	271,92	0,90
L	Real Estate	243,42	0,88	250,93	0,83
M,N	Jasa Perusahaan	22,21	0,08	23,66	0,07
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.063,88	3,80	1.055,78	3,52
P	Jasa Pendidikan	286,65	1,01	299,79	0,99
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	101,69	0,37	105,29	0,35
R,S, T,U	Jasa Lainnya	28,17	0,1	29,87	0,10
PDRB ADHK		28.648,78	100	29.990,35	100

Sumber: Simalungun Dalam Angka Kabupaten Simalungun 2023, BPS Kab.Simalungun

2.2.2 Struktur Ekonomi Daerah

Kerangka ekonomi makro Kabupaten Simalungun merupakan evaluasi dan proyeksi mengenai : (1) pendapatan per kapita yang mengukur daya beli masyarakat, (2) pertumbuhan ekonomi yang menggambarkan produktivitas sektor-sektor dalam perekonomian, (3) struktur ekonomi yang menjelaskan kontribusi masing-masing sektor ekonomi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), serta (4) perkembangan inflasi untuk menjelaskan bias kenaikan harga bagi pertumbuhan ekonomi. Selain empat indikator ekonomi tersebut, juga akan disertakan indikator- indikator lain sebagai penunjang dalam menyusun kerangka ekonomi makro daerah. Indikator-indikator yang membentuk kerangka ekonomi daerah digunakan sebagai dasar bagi penyusunan proyeksi ekonomi. Selanjutnya, hasil proyeksi ekonomi tersebut akan digunakan sebagai dasar asumsi dalam melakukan prediksi kondisi keuangan daerah, lebih tepatnya pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun perlu diperhatikan bahwa hasil proyeksi tersebut lebih berperan sebagai asumsi yang mendasari penyusunan rencana-

rencana pembangunan ekonomi, daripada sebagai suatu target kinerja yang harus dicapai. Sistem perekonomian senantiasa melibatkan pemerintah, swasta dan masyarakat. Sejalan dengan semangat partisipasi dalam pembangunan, maka pemerintah Kabupaten Simalungun berupaya menarik minat investasi pelaku usaha di Kabupaten Simalungun, antara lain melalui penciptaan peluang-peluang usaha di berbagai sektor ekonomi. Serangkaian kebijakan ekonomi yang dijabarkan melalui program/kegiatan pembangunan, diharapkan memperoleh apresiasi positif dari pelaku usaha yang ditandai dengan meningkatnya investasi daerah, sebagai salah satu indikator membaiknya kinerja ekonomi daerah. Kebijakan perekonomian daerah Kabupaten Simalungun masih diarahkan sesuai bidang utama pengembangan program pembangunan, yakni (1) bidang sosial budaya; (2) bidang ekonomi; (3) bidang fisik-sarana dan prasarana; (4) bidang pemerintahan. Penyusunan kebijakan umum dalam kelompok bidang utama pembangunan ini sekaligus merepresentasikan cara mencapai sasaran dalam masing-masing bidang pembangunan.

Tabel 2.3.
Peranan PDRB ADH Berlaku Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2019-
2022 (Persen) Kabupaten Simalungun (Juta Rupiah)

NO	LAPANGAN USAHA	2019	2020	2021	2022
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	48,67	49,99	51,34	52,99
B	Pertambangan dan Penggalian	0,23	0,23	0,22	0,21
C	Industri Pengolahan	12,00	11,54	11,58	11,20
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,07	0,07	0,07	0,06
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,09	0,09	0,08	0,08
F	Konstruksi	10,61	10,25	9,99	9,73
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reperasi Mobil dan Sepeda Motor	16,79	16,44	15,85	15,77
H	Transportasi dan Pergudangan	1,71	1,68	1,63	1,63
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,93	0,86	0,79	0,76
J	Informasi dan Komunikasi	0,54	0,56	0,56	0,54
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,15	1,12	1,11	1,09
L	Real Estate	0,94	0,94	0,89	0,84
M,N	Jasa Perusahaan	0,09	0,09	0,09	0,09
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,62	4,56	4,28	3,87
P	Jasa Pendidikan	1,08	1,07	1,02	0,97
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,41	0,42	0,39	0,37
R,S, T,U	Jasa Lainnya	0,12	0,12	0,11	0,11
PDRB		100	100	100	100

Sumber: Simalungun Dalam Angka Kabupaten Simalungun 2023, BPS Kab.Simalungun

Sumbangan terbesar pada tahun 2022 dihasilkan oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; kemudian disusul oleh Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Industri Pengolahan, Kontruksi kemudian lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Transportasi dan Pergudangan; Jasa Keuangan dan Asuransi dan Jasa Pendidikan. Sementara peranan lapangan usaha lainnya masing-masing di bawah satu persen.

2.2.3. PDRB Per Kapita

Salah satu indikator untuk melihat tingkat kemakmuran penduduk suatu wilayah ialah dengan mengukur nilai PDRB per kapita. Nilai PDRB per kapita merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut, PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Angka PDRB Perkapita diperoleh dari hasil bagi antara PDRB baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan dengan penduduk pertengahan tahun. PDRB Perkapita merupakan gambaran rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk sebagai hasil dari proses produksi. Semakin tinggi nilai PDRB per kapita maka dapat dikatakan tingkat kesejahteraan penduduk mengalami peningkatan. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per satu orang penduduk, sedangkan PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk.

Tabel 2.4
PDRB Perkapita Kabupaten Simalungun Atas Dasar Harga
Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2019-2022 (Ribuan Rupiah)

Tahun	ADH Berlaku	ADH Konstan
2019	38.057,43	27.348,70
2020	39.441,34	27.625,69
2021	42.576,88	28.648,78
2022	47.285,89	29.990,35

Sumber: Simalungun Dalam Angka Kabupaten Simalungun 2023, BPS Kab.Simalungun

Perkembangan PDRB per kapita penduduk Kabupaten Simalungun atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan pada tahun 2019-2022 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini menggambarkan bahwa rata-rata pendapatan yang diterima masing-masing penduduk di Kabupaten Simalungun mengalami peningkatan.

2.2.4. Prospek Ekonomi Tahun 2024

Perekonomian Kabupaten Simalungun pada tahun mendatang sebagaimana juga kondisi perekonomian nasional pertumbuhannya akan sangat dipengaruhi oleh kondisi global yaitu dengan adanya Covid-19. Namun karena perekonomian Kabupaten Simalungun ditopang oleh sektor pertanian (52,99 persen). Mempertimbangkan kondisi secara keseluruhan dan potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Simalungun pada tahun 2024 perekonomian Kabupaten Simalungun akan tumbuh sebesar 3,67 persen. Disisi permintaan perekonomian Kabupaten Simalungun optimis akan tetap tumbuh dengan adanya kebijakan New Normal dimana sektor pariwisata akan memberikan kontribusi yang signifikan, demikian dengan sektor industri dan perdagangan.

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Rumusan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Simalungun tahun 2024 tidak terlepas dari pencapaian pembangunan tahun 2022-2023 dengan berpedoman pada prioritas pembangunan daerah yang ditetapkan dalam tahun ke-tiga RPJMD Kabupaten Simalungun tahun 2021-2026.

2.1.1 Realisasi Pendapatan Daerah

Pendanaan penyelenggaraan program dan kegiatan pemerintah daerah dilaksanakan sesuai kewenangan yang telah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut dimaksudkan untuk mencegah tumpang tindih ataupun tidak tersedianya pendanaan pada suatu bidang urusan pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibiayai melalui APBD, sedangkan penyelenggaraan kewenangan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat dibiayai melalui APBN dan keuangan pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui anggaran Dana Bagi Hasil (DBH) dan Bantuan Keuangan Provinsi (BKP).

Perkembangan realisasi pendapatan Kabupaten Simalungun dalam periode tahun 2018-2022 berfluktuatif dimana pada tahun 2018 pendapatan daerah sebesar Rp. 2.193.012.743.922,30, pada tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi Rp. 2.354.406.284.384,11, selanjutnya pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi Rp. 2.175.717.502.483,16, tahun 2021 kembali meningkat menjadi Rp. 2.230.846.393.191,82 dan pada tahun 2022 kembali meningkat menjadi 2.331.760.427.077,86. Rincian realisasi pendapatan dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 2.5
Realisasi Pendapatan Kabupaten Simalungun Tahun 2018-2022

KODE REKENING	URAIAN	Realisasi				
		2018	2019	2020	2021	2022
4	PENDAPATAN – LRA	2.193.012.743.922,30	2.354.406.284.384,11	2.175.717.502.483,16	2.230.846.393.191,82	2.331.760.427.077,86
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) – LRA	164.107.850.129,30	191.940.130.095,11	159.319.208.782,63	177.646.004.173,82	174.521.883.377,86
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah – LRA	79.357.802.640,00	85.226.198.303,00	86.048.797.693,00	88.270.308.014,00	102.714.047.044,00
4.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah – LRA	3.878.874.844,00	3.863.137.705,00	2.398.477.260,00	2.480.215.137,00	3.046.099.242,00
4.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LRA	23.081.632.302,00	19.088.536.501,00	14.573.946.375,00	20.363.527.228,00	20.095.654.771,00
4.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah – LRA	57.789.540.343,00	83.762.257.586,11	56.297.987.454,00	66.531.953.794,82	48.666.082.320,86
4.2	PENDAPATAN TRANSFER – LRA	1.664.836.039.794,00	1.739.248.224.274,00	1.582.524.160.241,00	1.935.652.234.236,00	2.138.243.142.483,00
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LRA	1.595.373.952.344,00	1.638.140.548.143,00	1.509.802.918.030,00	1.832.468.447.757,00	2.014.120.935.234,00
4.2.3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LRA	59.620.719.148,00	101.107.676.131,00	72.721.242.211,00	103.183.786.479,00	124.122.207.249,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH – LRA	364.066.853.999,00	423.217.930.015,00	433.874.133.459,53	117.548.154.782,00	18.995.401.217,00
4.3.1	Pendapatan Hibah – LRA	104.978.740.000,00	129.003.732.555,00	139.355.902.459,53	12.778.004.782,00	18.995.401.217,00
4.3.3	Pendapatan Lainnya – LRA	259.088.113.999,00	294.214.197.460,00	294.518.231.000,00	104.770.150.000,00	0,00

BAB III
ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN
RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)
TAHUN 2024

Kondisi ekonomi tahun 2023 akan mempengaruhi penetapan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Simalungun tahun 2024, dimana harus memperhitungkan berbagai kondisi yang terjadi baik lokal, nasional, maupun internasional. Gejolak keuangan global diperkirakan mereda, diharapkan langkah-langkah yang ditempuh diperkirakan mampu memulihkan kembali sektor keuangan global yang pada gilirannya akan meningkatkan stabilitas moneter internasional yang lebih baik dan menggerakkan kembali bursa saham global. Kondisi tersebut menjadi asumsi yang mendasari penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Simalungun Tahun 2024. Stabilitas ekonomi makro merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu kondisi perekonomian daerah yang stabil diharapkan tetap terpelihara pada tahun 2024 melalui sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter nasional yang didukung dengan kebijakan fiskal daerah serta penguatan kelembagaan keuangan mikro dan sektor riil. Harapan dan keyakinan terhadap kondisi tersebut didasarkan pada proyeksi optimis perbaikan perekonomian nasional seiring dengan perbaikan pertumbuhan ekonomi secara global.

3.1. Asumsi Dasar Yang digunakan Dalam APBD

Dalam penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Simalungun tahun anggaran 2024 memperhatikan beberapa asumsi dasar sebagai berikut :

3.1.1. Kondisi Eksternal

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dilaksanakan secara bertahap dalam 4 (empat) RPJMN, yaitu: RPJMN pertama tahun 2004-2009, RPJMN kedua tahun 2010-2014, RPJMN ketiga tahun 2015-2019, dan RPJMN keempat tahun 2020-2024. Rencana Kerja Pemerintah Tahun (RKP) 2019 sebagai penjabaran tahun keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2019-2024 merupakan kesinambungan upaya pembangunan yang terencana dan sistematis dan dilaksanakan masing-masing maupun seluruh komponen bangsa dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka RKP memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro, program-program kementerian/lembaga, lintas kementerian, kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
2. Sembilan agenda (Nawa Cita) yang merupakan rangkuman program-program yang tertuang dalam Visi - Misi Presiden/Wakil Presiden Joko Widodo dan Ma'ruf Amin dijabarkan dalam strategi pembangunan yang digariskan dalam RPJMN 2020 - 2024 yang terdiri dari empat bagian utama yakni: (1) norma pembangunan; (2) tiga dimensi pembangunan; (3) kondisi perlu agar pembangunan dapat berlangsung; serta (4) program - program *quick wins*. Tiga dimensi pembangunan dan kondisi perlu dari strategi pembangunan memuat sektor - sektor yang menjadi prioritas dalam pelaksanaan RPJMN 2020 - 2024 yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah 2024.

Keterkaitan antara dimensi pembangunan dengan Nawa Cita dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pembangunan dilakukan untuk meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat yang menghasilkan manusia-manusia Indonesia unggul dengan meningkatkan kecerdasan otak dan kesehatan fisik melalui pendidikan, kesehatan dan perbaikan gizi. Manusia Indonesia unggul tersebut diharapkan juga mempunyai mental dan karakter yang tangguh dengan perilaku yang positif dan konstruktif. Karena itu pembangunan mental dan karakter menjadi salah satu prioritas utama pembangunan, tidak hanya di birokrasi tetapi juga pada seluruh komponen masyarakat, sehingga akan dihasilkan pengusaha yang kreatif, inovatif, punya etos bisnis dan mau mengambil risiko; pekerja yang berdedikasi, disiplin, kerjakeras, taat aturan dan paham terhadap karakter usaha tempatnya bekerja; serta masyarakat yang tertib dan terbuka sebagai modal sosial yang positif bagi pembangunan, serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi sesama.
- b. Dimensi pembangunan sektor unggulan dengan prioritas:
Kedaulatan pangan Indonesia mempunyai modal yang cukup untuk memenuhi kedaulatan pangan bagi seluruh rakyat, sehingga tidak boleh tergantung secara berlebihan kepada Negara lain. Kedaulatan energi dan ketenaga listrik. Dilakukan dengan memanfaatkan sebesar-besarnya sumber daya energi (gas, batu-bara, dan tenaga air) dalam negeri. Kemaritiman dan kelautan. Kekayaan laut dan maritim Indonesia harus dapat dimanfaatkan secara optimal bagi kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat. Pariwisata dan industri. Potensi keindahan alam dan keanekaragaman budaya yang unik merupakan modal untuk pengembangan pariwisata nasional. Sedangkan industri diprioritaskan agar tercipta ekonomi yang berbasis penciptaan nilai tambah dengan muatan iptek, keterampilan, keahlian, dan SDM yang unggul.
- c. Dimensi pemerataan dan kewilayahan.
Pembangunan bukan hanya untuk kelompok tertentu, tetapi untuk seluruh masyarakat diseluruh wilayah. Karena itu pembangunan harus dapat menghilangkan/memperkecil kesenjangan yang ada, baik kesenjangan antar kelompok pendapatan, maupun kesenjangan antar wilayah, dengan prioritas:
 - (1) Wilayah desa, untuk mengurangi jumlah penduduk miskin, karena penduduk miskin sebagian besar tinggal didesa;
 - (2) Wilayah pinggiran
 - (3) Luar Jawa
 - (4) Kawasan Timur
3. Penyusunan RKP 2024 dilakukan mengikuti tahapan, mekanisme, dan proses penyusunan sesuai dengan tata aturan yang berlaku sehingga rencana kerja menghasilkan rancangan yang sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan. Koordinasi dan sinkronisasi rancangan kerja kementerian/ lembaga (renja K/L) dengan renja pemerintahan daerah dilakukan agar program kerja menjadi efisien, efektif, fokus, dan memiliki dampak langsung bagi tercapainya target pembangunan nasional;
4. Pertumbuhan ekonomi daerah tidak terlepas dari fenomena pertumbuhan ekonomi Nasional, fluktuasi ekonomi yang terjadi dalam skala Nasional sangat berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi di daerah.

3.1.2. Kondisi Internal

1. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi jika tidak disertai dengan pemerataan pembangunan akan berdampak terhadap ketimpangan pendapatan dan ketimpangan pembagian porsi pembangunan. Dalam rangka untuk menciptakan pemerataan perlu adanya kebijakan strategis melalui APBD dengan mengacu pada nilai manfaat dan keberlanjutan. Keberpihakan APBD terhadap kepentingan masyarakat diwujudkan dalam program kegiatan satuan unit kerja yang berorientasi terhadap kepentingan publik, sehingga melalui penyaluran dana Dana Hibah, CSR dan lain - lain program pemberdayaan yang langsung kepada masyarakat dan Kelurahan/Kecamatan diharapkan dapat menjadi stimulan peningkatan produktifitas masyarakat;
2. Perencanaan pendapatan merupakan perkiraan yang terukur secara residual yang dapat diperoleh di setiap sumber pendapatan. Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas efisiensi pengeluaran;
3. Perkiraan penerimaan dari dana perimbangan cenderung konstan, dengan memperhatikan peraturan perundangan-undangan yang ada dan baru dicatat sebagai penerimaan sepanjang telah ditetapkan dalam anggaran pemberi bantuan;
4. Belanja yang dianggarkan merupakan batas efisiensi pengeluaran. Belanja daerah harus digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang - undangan. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Pelaksanaan urusan wajib dimaksud berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan. Belanja daerah diperkirakan naik dengan adanya beberapa kebijakan pemerintah pusat yang harus dilaksanakan oleh daerah;
5. Pemerintah daerah masih menghadapi permasalahan pokok pada tahun 2024 untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran terbuka;
6. Sebagaimana dimaklumi bahwa pembentukan modal dan PDRB Kabupaten Simalungun secara teoritis dan statistik tidak hanya dipengaruhi oleh variabel investasi APBD Kabupaten Simalungun semata tetapi juga dipengaruhi oleh variabel lain seperti dana Dekonsentrasi, APBD Provinsi, APBN, Swasta, Swadaya masyarakat dan sumber-sumber pembiayaan lainnya, sehingga kebijakan penganggaran yang komprehensif dan peka terhadap perubahan lingkungan harus selalu dipertimbangkan.

3.2. Lain-Lain Asumsi

1. Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pelayanan dasar masyarakat sesuai dengan kebutuhan Tahun Anggaran 2024;
2. Dalam rangka peningkatan bidang pendidikan, alokasi anggaran fungsi pendidikan diupayakan sekurang - kurangnya 20% dari belanja daerah;
3. Program dan Kegiatan yang dibiayai dari dana transfer dan sudah jelas peruntukannya seperti Dana Darurat, Dana Bencana Alam, DAK Fisik dan DAK Non Fisik dan bantuan keuangan yang bersifat khusus serta pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak lainnya, yang belum cukup tersedia dan/ atau belum dianggarkan

- dalam APBD, dapat dilaksanakan mendahului Penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD;
4. Mendorong kegiatan dalam bentuk kerjasama antar pemerintah dan/atau swasta sesuai peraturan perundang - undangan yang berlaku.

3.3.Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dengan Kebijakan Pemerintah Pusat

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2024 merupakan penjabaran tahun keempat pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang memuat sasaran, arah kebijakan, dan strategi pembangunan. Penyusunan RKP merupakan upaya dalam menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh masing-masing maupun seluruh komponen bangsa dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan.

Pemerintah Daerah mendukung pencapaian pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui 5 (lima) arahan utama Presiden, sebagai berikut:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), membangun Sumber Daya manusia pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
2. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan Undang-Undang. Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang Undang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM);
4. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
5. Transformasi Ekonomi, Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan asa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan. Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2024: **"Peningkatan Produktivitas Untuk Transformasi Ekonomi Yang Inklusif dan Berkelanjutan"**, maka fokus pembangunan diarahkan kepada Pemulihan Industri, Pariwisata dan Investasi, Reformasi Sistem Kesehatan Nasional, Reformasi Sistem Perlindungan Sosial dan Reformasi Sistem Ketahanan Bencana dengan sasaran dan target yang harus dicapai.

Sinkronisasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 yang mengusung Tema **"Sinergitas Dan Peningkatan Kualitas Pembangunan Dalam Rangka Mendukung Percepatan Transformasi Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan"** terhadap tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2024 yakni **"Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan"**.

Berdasarkan uraian tersebut, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota harus mendukung tercapainya prioritas pembangunan nasional tersebut sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing daerah, mengingat keberhasilan pencapaian prioritas pembangunan nasional dimaksud sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Untuk itu pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam penyusunan RKPD tahun 2024 mempedomani ketentuan mengenai pedoman penyusunan, pengendalian dan evaluasi RKPD tahun 2024.

Hasil sinkronisasi kebijakan tersebut dituangkan dalam rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024.

3.4.Prinsip Penyusunan APBD

Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024 didasarkan prinsip sebagai berikut :

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
2. Tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.
3. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
4. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBD.
5. Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat.
6. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.

Tema Pembangunan Daerah Tahun 2024 yakni Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan ditentukan dengan mempertimbangkan tema pembangunan tahun 2023 sebagai berikut:

NO	Uraian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Berdasarkan Pilihan Strategi	Tahun	
		2023	2024
1.	Peningkatan peran pemerintah dalam membangun infrastruktur jalan penghubung antar desa ke ibukota kecamatan dan antar kecamatan ke ibu kota kabupaten yang memadai dan nyaman	√	√
2.	Peningkatan akses sarana dan prasarana pemukiman	√	√
3.	Peningkatan akses jalan pertanian (sentra produksi) menuju pasar	√	√
4.	Penguatan peran pemerintah dalam membangun serta merawat saluran irigasi	√	√
5.	Peningkatan peran serta pemerintah dalam pembangunan fasilitas-fasilitas pertanian yang berbasis industri rumah tangga	√	√

6.	Peningkatan aksesibilitas layanan Rumah Sakit Daerah yang ada di Kabupaten Simalungun	✓	✓
7.	Peningkatan kualitas pelayanan Puskesmas	✓	✓
8.	Peningkatan kapasitas pemuda dan sarana olah raga	✓	✓
9.	Peningkatan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Simalungun	✓	✓
10.	Peningkatan layanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah	✓	✓
11.	Peningkatan jumlah sarana Pendidikan yang mencukupi kebutuhan Masyarakat	✓	✓
12.	Peningkatan kerja sama dengan perguruan tinggi	✓	✓
13.	Peningkatkan kualitas keahlian tenaga kependidikan lembaga pendidikan nonformal	✓	✓
14.	Membangun kerjasama dengan perguruan tinggi untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas	✓	✓
15.	Peningkatan jumlah dan keahlian personil ketertiban masyarakat di setiap desa	✓	✓
16.	Peningkatan rasa nyaman dan aman yang mendukung kegiatan penanaman Modal	✓	✓
17.	Peningkatan keahlian SKPD dalam meningkatkan kualitas produk unggulan	✓	✓
18.	Peningkatan cakupan pasar - pasar ekspor bagi produk hasil pertanian kabupaten Simalungun	✓	✓
19.	Penggalian dan pengembangan potensi budaya dan kawasan wisata sebagai daerah tujuan wisata	✓	✓
20.	Peningkatan potensi budaya dan melestarikan budaya seluruh etnis di Kabupaten Simalungun	✓	✓
21.	Penguatan iklim investasi di bidang pariwisata	✓	✓
22.	Peningkatan jumlah investasi ke Kabupaten Simalungun	✓	✓

Untuk mendukung sasaran pembangunan nasional serta sasaran pembangunan Provinsi Sumatera Utara tersebut, maka pemerintah kabupaten melakukan penetapan strategi pembangunan dalam lima tahun yang disesuaikan dengan tujuan pemerintah Kabupaten Simalungun, yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Simalungun tahun 2021-2026, adapun pilihan strategi yang akan dilaksanakan yaitu:

Strategi dalam pencapaian **Misi Pertama** dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Fasilitasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) agar menjadi motor pemulihan ekonomi dalam hal akses pasar (dengan mengaitkan ke *marketplace* (perdagangan daring); pembenahan manajemen keuangan dan manajemen operasi; dan akses permodalan (termasuk dari *platform* seperti Amarta);
2. Pemberian dorongan dan fasilitasi pelaku perdagangan bibit, pupuk dan sarana produksi pertanian (saprota) untuk mengalirkan perekonomian;
3. Pembukaan peluang investasi seluas – luasnya, baik Industri Kecil dan Menengah (IKM)

khususnya yang terkait dengan pengolahan hasil – hasil pertanian maupun investasi di bidang pariwisata;

4. Memaksimalkan Administrator KEK Sei Mangkei;
5. Pemanfaatan lahan seluas 200 Ha di Tapan Dolok sebagai kawasan Industri Simalungun;
6. Optimalisasi penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Nagori.

Strategi dalam pencapaian **Misi Kedua** dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Sosialisasi Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) secara terus menerus;
2. Pelaksanaan vaksinasi Covid-19 secara optimum;
3. Rekrutmen dokter spesialis dasar dan penunjang;
4. Memaksimalkan puskesmas dan pustu (puskesmas pembantu);
5. Peningkatan penetrasi BPJS Kesehatan dan Kartu Indonesia Sehat (KIS).

Strategi dalam pencapaian **Misi Ketiga** dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Penerapan prinsip – prinsip GCG : Adil, Mandiri, Akuntabel, Bertanggung Jawab dan Transparan;
2. Memaksimalkan peran Inspektorat Daerah;
3. Pemanfaatan teknologi informatika dalam pemerintahan.

Strategi dalam pencapaian **Misi Empat** dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Internitisasi Sekolah (SD dan SMP);
2. Penerapan konsep Merdeka Belajar, Guru Penggerak dan Sekolah Penggerak;
3. Penerapan pendidikan budi pekerti (akhlak mulia) dengan memasukkan kearifan lokal yakni falsafah *Habonaron do Bona* dan motto *Sapangambe Manoktok Hitei* ;
4. Memaksimalkan penggunaan dana BOS;
5. Pelestarian dan pengembangan seni – budaya Simalungun dan etnis – etnis lain di Kabupaten Simalungun.

Strategi dalam pencapaian **Misi Lima** dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Pengaitan diri secara aktif dengan BDOT (Badan Otorita Danau Toba), agar Kabupaten Simalungun tidak hanya menjadi daerah perlintasan wisman (wisatawan mancanegara) dan wisnu (wisatawan nusantara);
2. Penggairahan kembali atraksi – atraksi budaya multi-etnis;
3. Pembinaan soal – soal *hospitality* (keramah-tamahan) kepada pelaku – pelaku usaha pariwisata untuk meningkatkan lama singgah (*length of stay*) wisatawan;
4. Secara bertahap tapi cepat, meningkatkan kualitas infrastruktur ke destinasi – destinasi wisata.

Strategi dalam pencapaian **Misi Enam** dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Upaya pemulihan produksi padi yang sempat anjlok 121 ribu ton lebih dari tahun 2018 ke 2019;
2. Penanganan OPT (Organisme Perusak Tanaman) dan hama terutama hama tikus di sentra – sentra produksi beras;
3. Pengembangan sistem Agribisnis, khususnya komoditas seperti jeruk, kopi dan hortikultura (sayur, bunga dan buah – buahan) bersama masyarakat.

Strategi dalam pencapaian **Misi Tujuh** dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Pengadaan tanpa fee proyek/program dan peningkatan pengawasan lapangan;
2. Memaksimalkan LPSE (Layanan Pengadaan Sistem Elektronik);
3. Pemanfaatan dan CSR;
4. Pemanfaatan Dana Desa.

Strategi dalam pencapaian **Misi Delapan** dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Mengaktifkan kembali Balai Latihan Kerja dan membuka Balai Latihan Kewirausahaan bagi generasi muda/millennial;
2. Menyediakan sarana kreatif di beberapa kota yang sedang berkembang seperti : Perdagangan, Sidamanik, Pematang Raya dan Saribudolok;
3. Mengaktifkan kembali GOR yang ada di Jl.Asahan, Pematang Siantar.

Strategi dalam pencapaian **Misi Sembilan** dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Peningkatan Pendapatan (terutama Pendapatan Asli Daerah);
2. Efisiensi Belanja.

Strategi dalam pencapaian **Misi Sepuluh** dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Restrukturisasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD)/ satuan kerja (satker) dengan konsep "miskin struktur, kaya fungsi";
2. Reformasi birokrasi setelah melakukan pemetaan (*mapping*) sumber daya manusia (SDM).

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2024

Kebijakan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2024 yang merupakan potensi daerah dan sebagai penerimaan Pemerintah Kabupaten Simalungun sesuai urusannya diarahkan melalui upaya peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah dengan pengendalian pungutan sektor pajak daerah, optimalisasi retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan peningkatan lain-lain PAD yang Sah begitu juga dengan Pendapatan Transfer Pusat dan Daerah serta peningkatan kerjasama Pemerintah dan Swasta.

Berdasarkan hasil kondisi ekonomi daerah dan kajian terhadap tantangan serta prospek perekonomian di Pemerintah Kabupaten Simalungun maka dapat disajikan sumber-sumber pendapatan daerah sebagai berikut:

4.2. Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

1.1 Pajak daerah

Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah.
- b) Penetapan target pajak daerah harus didasarkan pada data potensi pajak daerah.
- c) Dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah Daerah harus melakukan kegiatan pemungutan melalui penghimpunan data obyek dan subyek pajak daerah dan retribusi daerah. Penentu besarnya pajak daerah atau retribusi daerah yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya, dengan berbasis teknologi.
- d) Pendapatan yang bersumber dari Pajak Rokok dialokasikan paling sedikit 50% untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang sebagaimana diamanatkan dalam pasal 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.
- e) Pendapatan yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan sebagaimana diamanatkan pada pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

1.2 Retribusi Daerah

Penganggaran retribusi daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut

- a. Penetapan target retribusi daerah harus didasarkan pada data retribusi daerah.
- b. Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Pelayanan Kesehatan yang merupakan hasil klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan Retribusi Daerah, obyek pendapatan

Retribusi Jasa Umum, rincian obyek pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan.

1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Penganggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2024 memperhatikan rasionalitas dengan memperhitungkan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.

1.4 Lain-Lain PAD yang Sah Tahun Anggaran 2024 memperhatikan :

- a) Dalam rangka meningkatkan Lain-lain PAD yang Sah, Pemerintah Daerah dapat mengoptimalkan penjualan, pemanfaatan sewa dan kerjasama barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.
- b) Pendapatan Jasa Giro dari Kas Daerah
- c) Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dari 3 Rumah Sakit Umum Daerah
- d) Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP

2. Pendapatan Transfer

2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Penganggaran Pendapatan Daerah yang bersumber dari transfer pemerintah pusat antara lain sebagai berikut:

1. Dana Bagi Hasil (DBH)
 - a. DBH Pajak
 - Pajak penghasilan
 - Pajak Bumi dan Bangunan
 - Cukai Hasil Tembakau
 - b. DBH Sumber Daya Alam
 - Minyak Bumi dan Gas Bumi
 - Pertambangan, Mikneral dan Batu Bara
 - Kehutanan
 - Perikanan
 - Panas Bumi

2.2 Dana Alokasi Umum (DAU)

2.3 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik

DAK Fisik Reguler terdiri dari :

1. DAK Fisik Bidang Reguler Pendidikan
2. DAK Fisik Reguler kesehatan dan KB
3. DAK Fisik Reguler Jalan
4. DAK Fisik Reguler Air Minum
5. DAK Fisik Reguler Sanitasi
6. DAK Fisik Reguler Perumahan dan Permukiman

DAK Fisik Penugasan terdiri dari:

1. DAK Fisik Penugasan Jalan
2. DAK Fisik Penugasan Pariwisata
3. DAK Fisik Penugasan Industri Kecil dan Menengah
4. DAK Penugasan Lingkungan Hidup
5. DAK Penugasan Pertanian
6. DAK Penugasan Irigasi

2.4 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

DAK Non Fisik Terdiri dari :

1. DAK Non Fisik Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
2. DAK Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD
3. DAK Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan
4. DAK Non Fisik Tunjangan Profesi Guru (TPG) ASN Daerah
5. DAK Non Fisik Tambahan Penghasilan Guru (Tamsil) ASN Daerah
6. DAK Non Fisik TKG PNSD Tunjangan Khusus Guru
7. DAK Non Fisik BOK dan BOKG
8. DAK Non Fisik PK2UMK
9. DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataaan
10. DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal
11. DAK Non Fisik Dana Pelayanan Ketahanan Pangan Dan Pertanian
12. Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM (PK2SIKM)

2.5 Dana Desa

2.6 Pendapatan Transfer Antar Daerah

Penganggaran Pendapatan yang bersumber dari transfer antar daerah adalah dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak yang terdiri atas Pajak Kendaraan Bermotor, Pendapatan Bagi hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok didasarkan pada anggaran pendapatan Bagi Hasil Pajak Tahun 2023.

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Penganggaran Pendapatan Daerah yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah yang bersumber dari bantuan Keuangan yang diterima dianggarkan dalam APBD penerima bantuan sepanjang sudah dianggarkan pada APBD pemberi bantuan.
2. Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat dan Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri.

Penyediaan Anggaran melalui Pendapatan Daerah untuk dipergunakan dalam Belanja Daerah merupakan salah satu indikator kemampuan daerah dalam mengalokasikan anggaran. Penetapan Pendapatan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah diproyeksikan dengan memperhatikan pada kondisi saat ini dan potensi yang dimiliki serta realisasi tahun sebelumnya dengan tetap memperhatikan kondisi real yang tengah dihadapi sehingga merupakan perencanaan yang terukur dan dapat dicapai.

Pendapatan daerah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2024 di proyeksikan sebesar **Rp. 2.394.163.576.558,00** yang diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 4.1
Pendapatan Daerah Kabupaten Simalungun
Tahun Anggaran 2024

No.	Uraian	APBD2023 (Rp)	R-APBD 2024 (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
1	2	3	4	5
4,1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	242.266.610.438,00	194.394.039.423	(47.872.571.015)
4.1.01	Pajak Daerah	123.287.920.337,00	129.452.316.354	6.164.396.017
4.1.02	Retribusi Daerah	4.350.121.090,00	4.567.627.144	217.506.054
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	22.628.613.730,00	19.524.495.679	(3.104.118.051)
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	91.999.955.281,00	40.849.600.246	(51.150.355.035)
4,2	PENDAPATAN TRANSFER	2.114.157.856.479,00	2.160.438.336.135,00	46.280.479.656
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.010.974.070.000,00	2.010.974.070.000	-
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	103.183.786.479,00	149.464.266.135,00	46.280.479.656
4,3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	21.744.457.000,00	39.331.201.000	17.586.744.000
4.3.01	Pendapatan Hibah	21.744.457.000	-	(21.744.457.000)
4.3.02	Dana Kapitasi JKN pada FKTP	-	39.331.201.000	39.331.201.000
Jumlah Pendapatan Daerah		2.378.168.923.917,00	2.394.163.576.558,00	15.994.652.641

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 Kebijakan terkait dengan Perencanaan Belanja

Arah kebijakan belanja daerah dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

1. Belanja daerah dialokasikan untuk mendukung pemulihan ekonomi pada sektor strategis
2. Belanja Daerah juga diarahkan pada penuntasan prioritas pembangunan Kabupaten Simalungun Tahun 2024 sesuai dengan prioritas pembangunan.

Belanja Daerah penganggarannya disusun berdasarkan prestasi kerja yaitu anggaran disusun berdasarkan atas target kinerja yang ditetapkan dengan tetap berlandaskan pada azas umum pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab serta memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Anggaran berbasis kinerja bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan alokasi anggaran/ orientasi dari anggaran berbasis kinerja adalah pencapaian hasil (*output dan outcome*) dari input yang di manfaatkan guna pencapaian target kinerja OPD sebagai mana tupoksi dan kewenangan yang dimiliki. Setiap rincian belanja daerah dilaksanakan dalam rangka pencapaian target indikator sebagai mana yang ditetapkan dalam RPJMD dan RPJM Kabupaten Simalungun yang pada hakekatnya adalah penjabaran dari visi dan misi target indikator berfungsi sebagai panduan dalam meraih kondisi yang diinginkan, namun demikian tidak semua target indikator yang akan dicapai tersebut harus mendapat penyediaan anggaran dari Pemerintah Kabupaten dan dapat juga dari Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Pusat serta dari pihak swasta atau dari perbankan.

Peningkatan target kinerja pada tahun 2024 seiring dengan peningkatan tuntutan masyarakat guna meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, sehingga terdapat peningkatan kualitas belanja Pemerintah Daerah. Peningkatan Belanja Daerah diharapkan tidak hanya penyesuaian terhadap harga satuan karena inflasi, sehingga harga satuan barang meningkat namun diharapkan adanya inovasi terhadap peningkatan jenis kegiatan dan volume kegiatan.

Peningkatan jenis kegiatan menunjukkan adanya peningkatan daya kreatifitas dan inovasi pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat. Disamping itu, volume kegiatan menunjukkan meningkatnya luasan (*coverage*). Sasaran kegiatan untuk meningkatkan keterjangkauan (*accessibility*) masyarakat sehingga pembangunan dapat dirasakan secara merata pada seluruh lapisan dan seluruh wilayah di Kabupaten Simalungun. Kesenambungan dari program kegiatan diharapkan bukan suatu rutinitas yang akan menghambat kreatifitas, akan tetapi merupakan beban tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Rutinitas yang dilakukan diharapkan juga dapat menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang sehingga tidak terjadi stagnasi dalam pelaksanaan pembangunan.

Belanja Daerah juga diarahkan pada peningkatan proporsi belanja yang memihak kepentingan publik, terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar disamping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan pemerintah dalam penggunaannya belanja daerah harus tetap mengedepankan efisiensi, efektifitas dan ekonomis sesuai dengan prioritas yang diharapkan dapat memberikan

dukungan program-program strategis. Namun lebih dari itu, Belanja Daerah dapat diharapkan akan memprioritaskan terhadap belanja publik sebagai subyek dan obyek pembangunan daerah Kabupaten Simalungun.

Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektifitas pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang OPD dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Pelaksanaan program kegiatan oleh masing-masing OPD harus mempunyai tolak ukur yang jelas, lebih dari itu penyusunan belanja selain mengacu pada kebutuhan OPD juga harus mengacu pada target-target yang akan dicapai dalam RPJMD dan RKPD Kabupaten Simalungun tahun 2024. Dengan anggaran yang terbatas maka pencapaian indikator kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan menuntut kreatifitas masing-masing OPD dan diperlukan koordinasi yang efektif intern dan antar OPD serta dengan seluruh stake holder terkait sehingga pencapaian indikator dimaksud dalam implementasinya berjalan secara efektif dan efisien. Guna sinkronisasi pelaksanaan program yang mana indikator capaian program kegiatan telah ditetapkan, maka diperlukan kearifan kegiatan yang saling menunjang dan melengkapi intern dan ekstern OPD sehingga secara simultan target indikator yang telah ditetapkan dapat tercapai atau bahkan dapat melampaui dari target.

5.2 Rencana Belana Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak terduga

Penganggaran Belanja Daerah memperhatikan hal – hal sebagai berikut :

1. Belanja Operasi

- 1.1 Belanja Pegawai, dianggarkan dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tunjangan PNSD dan pemberian gaji ketiga belas serta pemberian Tunjangan Hari raya PNSD.
 - b. Penganggaran Belanja Pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang sebesar 2,5% dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
 - c. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta PNSD dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2024.
 - d. Penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta PNSD dibebankan pada APBD.
 - e. Belanja Pegawai dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran daerah, penganggaran honorarium bagi PNS dan Non PNSD memperhatikan asas kepatutan kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud.
 - f. Penganggaran Tambahan Penghasilan PNSD harus memperhatikan kemampuan keuangan daerah dengan kebijakan dan penentuan kriterianya ditetapkan terlebih dahulu dengan peraturan Kepala Daerah.
 - g. Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010.

- h. Penganggaran Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah didasari oleh Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 merupakan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017
- 1.2. Belanja barang dan jasa
- a. Pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dalam kegiatan dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa dengan menambahkan obyek dan rincian obyek belanja baru serta besarannya ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.
 - b. Penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat hanya diperkenankan dalam rangka pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi. Alokasi belanja tersebut dianggarkan pada jenis barang dan jasa sesuai kode rekening berkenaan.
 - c. Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi OPD, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2023.
 - d. Pengembangan pelayanan kesehatan diluar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS hanya diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD.
 - e. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu tidak menjadi cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan melalui BPJS yang bersumber dari APBN, Pemerintah Daerah dapat menganggarkannya dalam bentuk program dan kegiatan pada OPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan.
 - f. Penganggaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor milik pemerintah daerah dialokasikan pada masing-masing OPD.
 - g. Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi, serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah. Hasil kunjungan kerja dan studi banding dilaporkan sesuai peraturan perundang-undangan.
 - h. Dalam rangka memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah, penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai biaya riil dan lumpsum,
 - i. Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan hanya diberikan untuk Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat Pimpinan Tinggi Madya.
 - Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
 - Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
 - Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% dari tarif hotel dikota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.
 - Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum.
 - j. Penyediaan anggaran untuk perjalanan dinas yang mengikutsertakan non PNSD diperhitungkan dalam belanja perjalanan dinas. Tata cara penganggaran perjalanan dinas dimaksud mengacu pada ketentuan perjalanan dinas yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

- k. Penganggaran untuk orientasi dan pendalaman tugas berupa pendidikan dan pelatihan bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan kapasitas sumber daya manusia bagi Pejabat Daerah dan Staf Pemerintah Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta unsur lainnya seperti tenaga ahli, diprioritaskan penyelenggaraannya dan tetap mempedomani Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.
- l. Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelolaan barang, pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang.
- m. Pengadaan belanja barang/ jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/ pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa.
 - Pemerintah daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2024 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat.
 - Penganggaran untuk barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektifitas, ekonomis dan transparansi dengan mengutamakan produk-produk dalam negeri.

1.3 Belanja Hibah

Belanja Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

1.4 Belanja Bantuan Sosial

Penganggaran Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD mempedomani Peraturan Kepala Daerah.

2. Belanja Modal

- a. Penganggaran belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan dan memenuhi nilai batas minimal kapitalisasi aset.
- b. Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap sepanjang memenuhi nilai batas minimal kapitalisasi aset, dan dapat memperpanjang masa manfaat atau yang dapat memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal.

3. Belanja Transfer

3.1 Belanja Bagi Hasil

- a. Tata cara penganggaran dana Bagi Hasil Pajak Daerah yang bersumber dari Pendapatan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten harus memperhitungkan rencana Pendapatan Pajak Daerah pada Tahun Anggaran 2023 dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- b. Dari aspek teknis penganggaran, belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dari Pemerintah Provinsi untuk Pemerintah Kabupaten dan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari Pemerintah Kabupaten untuk Pemerintah Desa dalam APBD harus diuraikan ke dalam daftar nama Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa selaku penerima sebagai rincian obyek penerima Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai kode rekening berkenaan.

- 3.2 Belanja Bantuan Keuangan dianggarkan sesuai kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pada tahun 2024, Belanja Daerah Kabupaten Simalungun diproyeksi sebesar Rp. **2.467.163.576.558,00** dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 5.1
Belanja Daerah Kabupaten Simalungun
Tahun Anggaran 2024

No.	Uraian	Jumlah
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
5.1	BELANJA OPERASI	1.667.734.070.435,00
5.1.01	Belanja Pegawai	963.324.435.099,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	609.294.093.536,00
5.1.05	Belanja Hibah	94.925.541.800,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	190.000.000,00
5.2	BELANJA MODAL	323.713.094.380,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	92.594.952.167,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	72.051.712.580,00

No.	Uraian	Jumlah
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	139.595.820.295,00
5.2.05	Belanja Modal aset tetap lainnya	19.470.609.338,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	14.000.000.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	14.000.000.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	461.716.411.743,00
5.4.01	Belanja Bantuan Keuangan	330.739.159.000,00
5.4.02	Belanja Bagi Hasil	130.977.252.743,00
Jumlah Belanja		2.467.163.576.558,00

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Prinsip pengelolaan keuangan daerah adalah mencapai keseimbangan antara pendapatan dan belanja, sehingga defisit anggaran diupayakan untuk diminimalkan. Jika pembiayaan diperlukan untuk menutup defisit anggaran berjalan, arah pengelolaan pembiayaan harus berdasarkan prinsip kemampuan dan kesinambungan fiskal daerah. Dalam rangka menutup defisit anggaran, daerah dapat melakukan pinjaman daerah yang bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah lain, lembaga keuangan Bank, lembaga keuangan bukan Bank dan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembiayaan Daerah terdiri dari sumber penerimaan pembiayaan daerah dan sumber pengeluaran pembiayaan daerah.

6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah

Penerimaan pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan yang diperoleh. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah melalui, penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) yaitu penerimaan daerah meliputi Sisa Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA) tahun lalu dan transfer dari Dana Cadangan. Penggunaan SiLPA diupayakan menurun seiring dengan semakin efektifnya penggunaan Anggaran.

6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pengeluaran pembiayaan Daerah pada tahun anggaran 2024 diproyeksikan untuk penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah pada perusahaan BUMD yaitu Penyertaan modal pada Bank Daerah Sumatera Utara.

Arah kebijakan penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah kabupaten simalungun secara rinci plafon pembiayaan daerah tahun 2024 sebagai mana yang tergambar pada tabel 6.1.

Tabel 6.1
Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah
Kabupaten Simalungun Tahun 2023 dan Tahun 2024

Nomor Urut	URAIAN	ANGGARAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)
		APBD TAHUN 2023 (Rp)	PROYEKSI APBD TAHUN 2024 (Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5 = 4 - 3
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	86.403.742.942,00	80.000.000.000,00	(6.403.742.942,00)
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	86.403.742.942,00	80.000.000.000,00	(6.403.742.942,00)
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	-	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	86.403.742.942,00	73.000.000.000,00	(13.403.742.942,00)
6.3	Sisa Lebih pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0,00	0,00	0,00

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Upaya-Upaya Pemerintah Daerah Dalam Mencapai Target

Upaya-upaya Pemerintah Daerah yang akan dilakukan dalam mencapai target Pendapatan Asli Daerah dalam APBD Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas pelayanan pajak dan retribusi kepada masyarakat;
2. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi daerah;
3. Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah;
4. Operasionalisasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah;
5. Memberikan insentif dan penghargaan kepada perangkat daerah yang berhasil mencapai atau melampaui target, dan menjatuhkan sanksi kepada perangkat daerah yang tidak berhasil mencapai target penerimaan pendapatan daerah secara optimal dalam satu tahun anggaran;
6. Penggunaan teknologi informasi yang lebih baik;
7. Bekerjasama dengan lintas sektoral dalam upaya menggali potensi daerah dan lain-lain PAD yang sah;
8. Memperbaiki sistem dan prosedur yang mengarah kepada sistem yang mempermudah pelayanan dan mendorong efektifitas dalam pengawasannya;
9. Pendampingan tenaga ahli dalam melakukan penggalan potensi PAD di sektor non pajak;
10. Melaksanakan pelayanan pajak dan retribusi secara khusus untuk memberikan kemudahan pada masyarakat melalui pelayanan keliling;

BAB VIII

PENUTUP

Demikianlah Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2024 ini disusun untuk dibahas dan pada akhirnya disepakati dalam bentuk Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Simalungun dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simalungun disepakati sebagai dasar penyusunan dan pembahasan Prioritas Pifon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.

Pematang Raya, 11 Agustus 2023

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIMALUNGUN**

TIMBUL JAYA H. SIBARANI, SH, MH
KETUA



S. SAMRIN GIRSANG, S.Pd
WAKIL KETUA



ELIAS BARUS, SE
WAKIL KETUA



SASTRA JOYO SIRAIT, SH
WAKIL KETUA

BUPATI SIMALUNGUN



RADIAPON HASIHOLAN SINAGA, S.H, M.H



**PEMERINTAH KABUPATEN
SIMALUNGUN**

**PRIORITAS DAN PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA**

**PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN SIMALUNGUN
TAHUN ANGGARAN
2024**

**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN**

**NOMOR : 090/981/28.2/2023
900/981/DPRD/2023
TANGGAL : 11 AGUSTUS 2023**

TENTANG

**PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)
TAHUN ANGGARAN 2024**

Yang bertandatangan dibawah ini:

- 1. Nama : RADIPOH HASIROLAN SINAGA**
Jabatan : Bupati Simalungun
Alamat Kantor : Pematang Raya, Sumatera Utara

Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Simalungun

- 2. a. Nama : TIMBUL JAYA H. SIBARANI**
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Simalungun
Alamat Kantor : Pematang Raya, Sumatera Utara
- b. Nama : S. SAMRIN GIRSANG**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Simalungun
Alamat Kantor : Pematang Raya, Sumatera Utara
- c. Nama : ELIAS BARUS**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Simalungun
Alamat Kantor : Pematang Raya, Sumatera Utara
- d. Nama : SASTRA JOYO SIRAIT**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Simalungun
Alamat Kantor : Pematang Raya, Sumatera Utara

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Simalungun.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2024, perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka kesepakatan antara Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Simalungun tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2024, para pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2024 yang meliputi rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah, prioritas Belanja Daerah, Plafon Anggaran Sementara per urusan OPD, Program dan Kegiatan, serta rencana pengeluaran daerah tahun Anggaran 2024.

Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2024 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Simalungun tahun Anggaran 2024.

Pamatang Raya, 11 Agustus 2023

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIMALUNGUN**


**TIMBUL JAYA H. SIBARANI
KETUA**


**S. SAMRIN GIRSANG
WAKIL KETUA**


**ELIAS BARUS
WAKIL KETUA**


**SASTRA JOYO SIRAIT
WAKIL KETUA**

BUPATI SIMALUNGUN


RADIAPOH HASIHOLOAN SINAGA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai Amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana inti pokok diatas mengamanatkan suatu tatanan rencana pembangunan yang terpolo, terarah dan berkesinambungan serta sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan Kebijakan Pemerintah Pusat, disamping itu dengan pengelolaan pendanaan yang diatur secara transparan, terukur dan akuntabel. Dalam mengemban amanat peraturan Per-Undang-Undangan di atas, sinkronisasi dan penentuan prioritas pembangunan menjadi sasaran utama agar sesuai dengan sumber daya anggaran dan meminimalisir perencanaan pembangunan yang bersifat sektoral di daerah untuk menghindari kegiatan pembangunan yang parsial.

Selanjutnya proses penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pembangunan yang menjadi kewenangan daerah tersebut dituangkan dalam penyelenggaraan Keuangan Daerah yang disebut juga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dimana APBD ini dilaksanakan untuk menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan maupun kebijakan belanja daerah. Dalam proses penyusunan rancangan APBD, pemerintah daerah menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dengan menggunakan bahan dari Renja OPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah.

Berdasarkan RKPD, pemerintah daerah menyusun Kebijakan Umum APBD yang memuat target pencapaian kinerja yang terukur dari program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk setiap urusan pemerintahan daerah yang disertai dengan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang disertai dengan asumsi yang mendasarinya.

Dalam rangka proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Pemerintah Daerah menyusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan Kebijakan Umum APBD (KUA) yang telah disepakati (Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 89 ayat (4)). PPAS ini disusun untuk menentukan skala prioritas pembangunan daerah dan Program dan Kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Pusat setiap tahun.

Dokumen PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk setiap program kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA-OPD) sebelum disepakati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Oleh karena itu PPAS disusun untuk mengimplementasikan dari Kebijakan Umum APBD dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan Pemerintah Daerah dan DPRD.

Sejalan dengan pernyataan di atas, Pemerintah Kabupaten Simalungun berusaha mempercepat penyusunan Rancangan APBD supaya pelaksanaan pembangunan tahun2024 dapat mencapai sasaran dan tujuan yang diharapkan. Selanjutnya Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Simalungun Tahun2024 disusun berdasarkan dokumen Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (KUA) Kabupaten

Simalungun Tahun 2024 yang telah disepakati antara Pemerintah Kabupaten Simalungun dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simalungun.

1.2. Tujuan Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Tujuan Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Pemerintah Kabupaten Simalungun Tahun 2024 adalah sebagai dokumen kebijakan yang dapat dijadikan acuan bagi setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menentukan batas maksimal anggaran untuk alokasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Simalungun Tahun 2024 adalah untuk :

1. Menyediakan dokumen tentang target dari pendapatan dan penerimaan daerah, belanja daerah serta target pembiayaan daerah;
2. Menyediakan dokumen tentang plafon anggaran sementara berdasarkan OPD, urusan pemerintahan dan program kegiatan;
3. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan dalam rangka pelaksanaan pembangunan tahunan daerah;
4. Menjamin terciptanya keterkaitan, konsistensi dan sinergitas antara perencanaan (RKPD), penganggaran (KUA, PPAS, APBD), pelaksanaan dan pengawasan pembangunan (Monitoring dan Evaluasi Pembangunan) antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan secara terpadu, baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota;
5. Sebagai acuan/pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2024.

1.3. Landasan Hukum Penyusunan PPAS-APBD

Landasan hukum yang dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Simalungun Tahun 2024 adalah:

1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan , Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12);
22. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Program Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 50);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 5 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2007 Nomor 5 Seri D Nomor 5);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Simalungun Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2016 Nomor 3 Seri D Nomor 3);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2023 Nomor 1);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pembentukan Kecamatan Dolog Masagal (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2017 Nomor 3 Seri D Nomor 3);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2011 Nomor 7 Seri A Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2018 Nomor 3 Seri D Nomor 3);
28. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 25 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Pada Organisasi Badan-Badan, Inspektorat Kabupaten dan Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei Kabupaten Simalungun (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2016 Nomor 285 Tahun 2016) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Simalungun Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Simalungun Nomor 25 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Pada Organisasi Badan – Badan, Inspektorat Kabupaten, Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) dan Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei Kabupaten Simalungun (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2019 Nomor 414);
29. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penerapan Aplikasi E-Perencanaan Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Simalungun (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 351);
30. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 46 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2024 (Berita Daerah Simalungun Tahun 2023 Nomor 604).

1.4. Sistematika Penulis

Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Simalungun TA 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I PENDAHULUAN

Berisikan latar belakang, tujuan dan dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Bab II RENCANA PENERIMAAN DAERAH

Rencana penerimaan daerah berisikan tentang target pendapatan daerah dan rencana penerimaan pembiayaan daerah yang meliputi pendapatan asli daerah (PAD), pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, serta sumber- sumber penerimaan pembiayaan berdasarkan kebijakan penerimaan daerah dalam KUA.

Bab III PRIORITAS BELANJA DAERAH

Menguraikan Belanja Daerah, meliputi kebijakan belanja daerah, kebijakan belanja dan terget pembangunan tahun2024.

Bab IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAH DAN PROGRAM /KEGIATAN

Menguraikan plafon anggaran sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Berisikan plafon anggaran sementara masing-masing urusan, satuan kerja dan program/kegiatan/sub kegiatan yang dituangkan secara deskriptif.

Bab V RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

Berisikan tentang target penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah.

Bab VI PENUTUP

BAB II

RENCANA PENERIMAAN DAERAH

Rencana penerimaan daerah berisikan tentang target pendapatan daerah dan rencana penerimaan pembiayaan daerah yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer Dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, serta sumber-sumber Penerimaan Pembiayaan berdasarkan kebijakan penerimaan daerah dalam KUA.

Tabel 2.1
Rencana Penerimaan Daerah
Tahun Anggaran 2024

KODE	PENERIMAAN DAERAH	ALOKASI ANGGARAN
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	194.394.039.423,00
4.1.01	Pajak Daerah	129.452.316.354,00
4.1.02	Retribusi Daerah	4.567.627.144,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	19.524.495.679,00
4.1.04	Lain-Lain PAD Yang Sah	40.849.600.246,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.160.438.336.135,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.010.974.070.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	149.464.266.135,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	39.331.201.000,00
4.3.01	Pendapatan Hibah PHJD	-
4.3.02	Dana Kapitasi JKN pada FKTP	39.331.201.000,00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH		2.394.163.576.558,00
6.1	PEMBIAYAAN	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	80.000.000.000,00
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN		80.000.000.000,00
JUMLAH PEMBIAYAAN DAERAH		80.000.000.000,00

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

3.1. Belanja Daerah Tahun 2024

Tujuan Perencanaan Pembangunan Nasional yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan dan menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah. serta mengakomodir program prioritas kepala daerah dengan mensinkronkan dengan prioritas pembangunan nasional serta provinsi yang difokuskan kepada pemulihan kondisi dari berbagai sektor pembangunan. Dalam upaya melaksanakan sinkronisasi dan integrasi pembangunan antara pusat dan daerah, maka prioritas pembangunan dan prioritas belanja daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2024 mengacu pada target Pembangunan Nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2019-2024.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, dengan komponen pokoknya adalah pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Penyusunan APBD sesuai dengan peraturan perundangan diawali dengan proses musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang hasilnya dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), selanjutnya dipergunakan sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah salah satu wujud dari pengelolaan keuangan negara yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Penyusunan APBD harus disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan daerah yang dinamis diseimbangkan dengan prioritas pembangunan yang relevan berdasarkan kemampuan keuangan daerah, sinkronisasi dan integrasi kebijakan pemerintah pusat, provinsi sesuai dengan kondisi riil di lapangan.

Pengelolaan keuangan di daerah meliputi mobilisasi pendapatan, penetapan alokasi belanja daerah, dan mobilisasi pembiayaan. Untuk memenuhi *sufficient condition* bagi pengelolaan keuangan daerah yang baik maka daerah perlu memahami dan menggali potensi/keunggulan daerah serta mengidentifikasi pokok-pokok permasalahan yang ada. Daerah juga perlu menentukan arah pembangunannya dalam rencana tahunan, jangka menengah hingga jangka panjang yang masing-masing dituangkan ke dalam RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah), RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dan RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah). Prioritas-prioritas pembangunan dalam RKPD, RPJMD dan RPJPD inilah yang akan menentukan pola alokasi belanja di daerah selain sumber-sumber pembiayaannya yang ideal.

Dalam upaya untuk mencapai seluruh rencana yang ada pada dokumen perencanaan lima tahunan dan satu tahunan, perlu ditetapkan arah pengelolaan keuangan daerah. Arah pengelolaan ini dimaksudkan agar seluruh sumber daya keuangan daerah dapat dimanfaatkan secara lebih efektif dan efisien. Arah pengelolaan tersebut meliputi arah pengelolaan pendapatan daerah, arah pengelolaan belanja daerah dan arah pengelolaan pembiayaan daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas guna mendukung upaya percepatan pertumbuhan ekonomi dan pemantapan stabilitas ekonomi daerah, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta pelayanan umum kepada masyarakat, maka

kebijakan keuangan (anggaran) dalam tahun 2024 di Kabupaten Simalungun diarahkan untuk :

A. Kebijakan Umum Pembangunan Bidang Sosial Budaya

1. Membangun kualitas SDM masyarakat yang berdaya saing, produktif dan menjunjung tinggi nilai-nilai moral melalui kebijakan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu serta peningkatan kapasitas masyarakat;
2. Meningkatkan aksesibilitas kepada seluruh lapisan masyarakat terhadap layanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau khususnya bagi kelompok masyarakat yang kurang mampu;
3. Mendorong perilaku sesuai dengan budaya, adat istiadat, nilai-nilai dan falsafah hidup yang dijunjung masyarakat Simalungun dan melestarikan seni dan budaya-budaya lokal yang dapat mendorong terciptanya perilaku yang ramah dan terbuka bagi kelompok masyarakat lainnya;
4. Membangun karakter masyarakat yang religius yang menempatkan kebenaran di seluruh aspek kehidupan;
5. Membangun kualitas kehidupan sosial kemasyarakatan melalui pelayanan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Masyarakat (PMKS), peningkatan peran serta dan prestasi pemuda, perlindungan perempuan dan anak.

B. Kebijakan Umum Pembangunan Bidang Ekonomi

1. Membangun ekonomi daerah melalui penguatan ketahanan ekonomi rakyat yang berbasis pada potensi dan keunggulan lokal wilayah melalui program-program pemberdayaan masyarakat;
2. Membangun dan meningkatkan kapabilitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta koperasi dengan penguatan kemampuan dan daya saing kelembagaan UMKM;
3. Meningkatkan investasi daerah dalam rangka perluasan dan peningkatan penyerapan tenaga kerja serta peningkatan pendapatan daerah;
4. Menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk mendorong peningkatan investasi khususnya di bidang pariwisata dan industri berbasis agribisnis;
5. Memberikan kemudahan dan insentif dalam penanaman modal terutama bagi usaha yang padat karya.

C. Kebijakan Umum Pembangunan Bidang Fisik Sarana dan Prasarana

1. Mengembangkan Perencanaan dan Pengendalian pemanfaatan ruang yang mengedepankan konsep pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
2. Menciptakan keserasian dan keselarasan pemanfaatan ruang guna mempercepat laju perkembangan daerah;
3. Membangun konektivitas antar wilayah melalui pembangunan sarana dan prasarana sebagai upaya untuk menghambat arus urbanisasi dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal.

D. Kebijakan Umum Pembangunan Bidang Tata Pemerintahan

1. Mengkaji ulang regulasi untuk menghasilkan regulasi daerah pro-ekonomi kerakyatan, membuka kesempatan kerja, mendorong pertumbuhan ekonomi dan berkelanjutan, secara adil bagi semua kelompok tanpa diskriminasi;
2. Mengembangkan sistem administrasi dan pendataan yang akurat dan akuntabel untuk mendukung perencanaan, implementasi, monitoring, pengendalian, dan evaluasi pembangunan;
3. Melaksanakan dan membudayakan prinsip-prinsip pemerintah yang baik, bersih dan berwibawa;
4. Meningkatkan transparansi, akuntabilitas, bertanggung jawab dan integritas dalam menyelenggarakan pemerintahan dengan efektif dan efisien;
5. Meningkatkan kemampuan aparatur melalui pengembangan SDM dan keahlian dalam pemanfaatan teknologi yang mendukung pelayanan publik yang prima;

6. Mendorong aparaturnya untuk pelayanan publik secara cepat, tepat waktu, biaya yang murah serta mengutamakan perilaku yang memuaskan sesuai dengan harapan masyarakat;
7. Meningkatkan kemampuan koordinasi dan kerja sama dengan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota lainnya.

E. Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang /jasa yang dijual tanpa mengutamakan pada prinsip efisien dan produktifitas.

Manfaat adanya Unit Kerja yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berpotensi untuk mendapat imbalan secara signifikan terkait dengan pelayanan yang diberikan maupun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 3 (tiga) Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Simalungun yakni RSUD Rongas, RSUD Parapat dan RSUD Perdagangan pada Tahun 2018 telah menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Pemerintah Kabupaten Simalungun berupaya secara spesifik, agar arah kebijakan belanja Kabupaten Simalungun difokuskan pada upaya untuk mendukung Tema pembangunan dan penyelesaian isu strategis yang dilakukan melalui pola pembelanjaan yang proporsional, efisien, dan efektif, upaya tersebut, antara lain adalah :

1. Membiayai urusan yang bersifat *mandatory* dan sudah ditentukan peruntukan belanjanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Membiayai urusan wajib dan pilihan dengan mengutamakan bidang pendidikan dan kesehatan;
3. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung perekonomian, pariwisata dan lingkungan hidup dengan mengutamakan jalan dan jembatan serta sarana perhubungan lainnya;
4. Stimulasi pertumbuhan ekonomi di sektor riil terutama pada sektor andalan pertanian, peternakan, perikanan, perindustrian, perdagangan dan pariwisata;
5. Memenuhi komitmen kerjasama/kemitraan pembangunan dan pembiayaan;
6. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

3.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2024

Prioritas pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, tingkat kemendesakan dan peningkatan kinerja pembangunan daerah. Prioritas pembangunan juga dapat dikategorikan sebagai operasional dari tujuan strategis daerah berdasarkan pada urgensi daya ungkit pada kesejahteraan dan cakupan pembangunan secara keseluruhan.

Perencanaan pembangunan tahun 2024 ini merupakan tahun kedua dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Periode 2021-2026 yang akan disusun dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun serta mengacu pada rencana pembangunan yang telah ditetapkan melalui RPJPD Kabupaten Simalungun tahap keempat Tahun 2005-2025. RKPD tahun 2024 merupakan transisi dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Simalungun sebelumnya yakni Tahun 2016-2021. Dalam penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Simalungun Tahun 2024 ini tetap mempedomani arah, acuan, keterkaitan, konsistensi dan kesinambungan perencanaan pembangunan pada Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Simalungun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Simalungun Tahun 2021-2026. Visi dan misi pembangunan daerah pada RPJMD Kabupaten Simalungun tahun 2021-2026, yakni:

Visi " RAKYAT HARUS SEJAHTERA".

Guna mewujudkan Visi tersebut, disusunlah 10 (sepuluh) Misi Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Simalungun tahun 2021-2026 sebagai berikut:

1. Pemulihan Ekonomi
2. Pemulihan Kesehatan
3. Penerapan GCG (Good and Clean Government)
4. Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan
5. Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
6. Peningkatan Pertanian dan Pengembangan Sistem Agribisnis
7. Peningkatan Kualitas Infrastruktur
8. Peningkatan Kualitas Generasi Muda/Millennial
9. Restrukturisasi Anggaran (Perbaikan Postur APBD)
10. Restrukturisasi Organisasi dan Reformasi Birokrasi

Dalam mewujudkan visi RPJPD Kabupaten Simalungun Tahun 2005-2025 untuk tahap keempat maka arah kebijakan pembangunan difokuskan pada :

1. Pemantapan sektor industri berbasis pertanian.
2. Tingkat pendidikan masyarakat yang semakin tinggi.
3. Tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin baik.
4. Berkembangnya daerah-daerah terisolir.
5. Pertumbuhan ekonomi yang merata.
6. Pertumbuhan penduduk yang merata.
7. Pegentasan kemiskinan.
8. Daerah tujuan wisata Internasional.

3.1.1. Prioritas Pembangunan Nasional

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi nantinya dalam RKPD2024 Kabupaten Simalungun yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Perumusan tujuan dan sasaran merupakan salah satu tahap perencanaan kebijakan (policy planning) yang memiliki kritikal poin dalam penyusunan RKPD.

Dalam hal rumusan tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Simalungun sangat perlu mempedomani tujuan dan sasaran pembangunan nasional dan provinsi. Adapun tujuan dan sasaran pembangunan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Pertumbuhan ekonomi Indonesia dipatok berada antara 5,2 persen sampai 5,8 persen. Kemudian tingkat pengangguran terbuka ditarget capai 5,5 persen sampai 6,2 persen dan tingkat kemiskinan berada di 8,5 hingga 9 persen. Selain itu, pemerintah juga menargetkan pada tahun 2022 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) bisa berada di 73,44 hingga 73,48, penurunan emisi gas rumah kaca 26,8 sampai 27,1 dan rasio gini 0,376 terhadap 0,378.

Sedangkan untuk Provinsi Sumatera Utara pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara tahun 2022 pada kisaran 5,6-6,0 persen, Provinsi Sumatera Utara memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi 2022 melalui peningkatan ekspor CPO serta investasi infrastruktur Kawasan Industri Sei Mangkei.

Sementara itu, ekonomi Provinsi Sumatera Utara pada 2021 diperkirakan tumbuh sekitar 5,4 persen. Sedangkan sasaran tingkat kemiskinan yang disepakati sekitar 7,8 – 8,4 persen dan sasaran tingkat pengangguran terbuka pada kisaran 6,05 – 6,67 persen. menjawab isu strategis pembangunan di Provinsi Sumatera Utara, antara lain meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia, meningkatkan infrastruktur layanan dasar dan infrastruktur digital untuk pemerataan pembangunan, meningkatkan infrastruktur pendukung sektor industri dan pariwisata, mendorong inovasi sektor pariwisata dan UMKM, serta mengoptimalkan produktivitas dan meningkatkan nilai tambah sektor pertanian.

Tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Simalungun tahun2024 didasarkan pada arah kebijakan yang akan disusun pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Simalungun 2021-2026. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Simalungun tahun 2021-2026 nantinya akan menggariskan bahwa Visi Pembangunan adalah dengan mempertimbangkan potensi, kondisi permasalahan, tantangan, peluang yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Simalungun. Dan mempertimbangkan keberagaman Adat dan Budaya yang hidup ditengah Masyarakat, maka tujuan dan sasaran pembangunan Tahun2024 mengacu pada Visi Pemerintah Kabupaten Simalungun.

Dari 10 (Sepuluh) misi yang dirumuskan oleh Pemerintah Kabupaten Simalungun dalam mewujudkan pembangunan untuk 5 (lima) tahun kedepan, dimana tahun2024 sebagai tahun kedua periode RPJMD Kabupaten Simalungun Tahun 2022-2026, dirasa perlu untuk mensinergikan dan mengoptimalkan misi tersebut sehingga nantinya diharapkan dapat menjadi prioritas pembangunan daerah. Sinergitas prioritas pembangunan antara prioritas nasional, prioritas provinsi dan prioritas Kabupaten Simalungun sangat perlu diperhatikan, sehingga kosentrasi dan fokus terhadap prioritas pembangunan lebih terarah dan tepat sasaran. Adapun prioritas dimaksud dapat dilihat pada gambar berikut :

PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2024



3.2.2 Harmonisasi Perencanaan Nasional, Perencanaan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dan Pemerintah Kabupaten Simalungun.

PRIORITAS KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN2024



Kabupaten Simalungun turut mendukung pembangunan Kawasan Superprioritas destinasi dalam kota Nasional melalui program-program yang ditampung oleh Perangkat Daerah sebagai pengampu program kegiatan dimaksud. Adapun bentuk dukungan Kabupaten Simalungun dalam pembangunan Kawasan Superprioritas antara lain pada Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata, Program Pemasaran Pariwisata,

Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif, Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian, Program Penyuluhan Pertanian, Program Penyelenggaraan Jalan.

Salah satu Kegiatan Strategis Daerah (KSD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 yakni Peningkatan Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan yang akan di dilaksanakan di Kabupaten Simalungun diantaranya Penanganan Ruas Jalan Provinsi di wilayah Kabupaten Simalungun, Peningkatan Kualitas Sistem Jaringan Irigasi kewenangan Provinsi di wilayah Kabupaten Simalungun, Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Persampahan, Pembangunan Satu Data Digital Daerah dan keterlibatan kabupaten dalam Penurunan Indeks Resiko Bencana (SUMUT Tangguh Bencana).

Dalam hal penerapan dan pelaksanaan prioritas pembangunan Kabupaten Simalungun Tahun 2024 tersebut dirumuskan kebijakan untuk menentukan prioritas perangkat daerah yang nantinya diharapkan dapat menjadi pelaksana teknis dalam menjalankan prioritas Kabupaten Simalungun tersebut sehingga fokus dan arah kebijakan pembangunan lebih terarah dan sinergi guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera di Kabupaten Simalungun. Keterkaitan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024, Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Simalungun Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 3.1 di bawah ini :

Tabel 3.1
Matriks Keterkaitan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024, Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Simalungun Tahun 2024

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Prioritas Pembangunan Kabupaten Simalungun
1	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Sosial Kemasyarakatan	Ketersediaan dan Optimalisasi Infrastruktur yang merata serta kualitas lingkungan hidup untuk mendorong konektivitas dan pengembangan wilayah
2	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	Peningkatan potensi sumber daya manusia yang berakhlak melalui optimalisasi kesehatan dan ilmu pengetahuan
3	Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan	Optimalisasi pertumbuhan dan peningkatan ekonomi inklusif yang mandiri serta berdaya saing dalam mewujudkan kualitas masyarakat yang sejahtera
4	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, inovatif, bersih dan berkualitas dalam pelayanan masyarakat
5	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar		Peningkatan kualitas pembangunan daerah melalui optimalisasi pemanfaatan sistem

			digitalisasi dan inovasi daerah
6	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim		
7	Memperkuat stabilitas polhukhankam dan trasformasi pelayanan publik		

Dalam hal penerapan dan pelaksanaan prioritas pembangunan Kabupaten Simalungun Tahun 2024 tersebut dirumuskan kebijakan untuk Menentukan prioritas perangkat daerah yang nantinya diharapkan dapat menjadi pelaksana teknis dalam menjalankan prioritas Kabupaten Simalungun tersebut sehingga fokus dan arah kebijakan pembangunan lebih terarah dan sinergi guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera di Kabupaten Simalungun.

Adapun fokus indikator perangkat daerah sesuai urusan yang memiliki peranan penting dalam perwujudan prioritas Kabupaten Simalungun Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2
Prioritas Pembangunan Kabupaten Simalungun Tahun 2024
Berdasarkan Perangkat Daerah

PRIORITAS PEMBANGUNAN	PERANGKAT DAERAH
Ketersediaan dan Optimalisasi Infrastruktur yang merata serta kualitas lingkungan hidup untuk mendorong konektivitas dan pengembangan wilayah	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	Dinas Perhubungan
	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
	Dinas Lingkungan Hidup
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Peningkatan potensi sumber daya manusia yang berakhlak melalui optimalisasi kesehatan dan ilmu pengetahuan	Dinas Sosial
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Nagori
	Dinas Keteragakerjaan
	Satuan Polisi Pamong Praja
	Dinas Kesehatan
	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Rumah Sakit Umum Daerah
	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Dinas Pendidikan

	Dinas Perpustakaan dan Arsip
	Dinas Pemuda dan Olah Raga
Optimalisasi pertumbuhan dan peningkatan ekonomi inklusif yang mandiri serta berdaya saing dalam mewujudkan kualitas masyarakat yang sejahtera	Dinas Ketenagakerjaan
	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Dinas Pertanian
	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkel
Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, inovatif, bersih dan berkualitas dalam pelayanan masyarakat	Sekretariat Daerah Kabupaten
	Sekretariat DPRD Kabupaten
	Inspektorat Daerah
	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Peningkatan kualitas pembangunan daerah melalui optimalisasi pemanfaatan sistem digitalisasi dan inovasi daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

Dari prioritas pembangunan yang telah ditentukan diharapkan akan tercipta program kegiatan yang mendukung prioritas sehingga konsistensi perencanaan pembangunan akan lebih terarah dalam tujuan, sasaran dan arah kebijakan serta realisasi capaiannya dapat maksimal dalam pelaksanaannya.

3.1.2. Hubungan Prioritas Pembangunan

Dalam penentuan prioritas pembangunan juga memperhatikan konsistensi terhadap sasaran pembangunan nasional dan Propinsi yang tertuang dalam RPJMN dan RPJMD Provinsi.

Mempedomani Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 263 ayat (3) dinyatakan bahwa "RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN". Selanjutnya, pada ayat (4) dinyatakan bahwa, "RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Prioritas pembangunan Kabupaten Simalungun secara khusus didesain untuk mencapai sasaran pembangunan daerah pada RPJMD tahun 2024 yang disusun dan ditetapkan untuk periode 2021-2026. Prioritas pembangunan didasarkan isu strategis di Kabupaten Simalungun. Dalam pelaksanaannya, penentuan proritas pembangunan di

Kabupaten Simalungun juga mempertimbangkan kebijakan nasional dan Provinsi Sumatera Utara, demi terlaksananya keserasian dan sinergitas antara pembangunan pusat dan daerah. Hal ini dilakukan demi tercapainya harmonisasi dan sinkronisasi capaian dan sasaran pembangunan untuk semua dan dapat memberikan dampak outcome bagi perekonomian daerah, regional bahkan nasional.

Adapun perbandingan tema pembangunan pada Rencana Kerja tahun 2024, dari tingkat Nasional, Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Simalungun adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3.
Relasi Tema RKP Nasional, RKPD Provinsi Sumatera Utara dan RKPD Kabupaten Simalungun

Tema RKP Nasional (2024)	Tema RKPD Provinsi Sumatera Utara (2024)	Tema RKPD Kabupaten Simalungun (2024)
Mempercepat Transformasi Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan	Sinergitas Dan Peningkatan Kualitas Pembangunan Dalam Rangka Mendukung Percepatan Transformasi Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan	Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan

Untuk mendukung keberhasilan dan pencapaian target dan sasaran program prioritas dimaksud, maka disusun suatu rencana kegiatan atau rangkalan kegiatan yang akan dilaksanakan dengan keluaran yang spesifik, terukur, dapat dilakukan serta realistis. Perumusan tujuan dan sasaran dilakukan berdasarkan rumusan visi yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Simalungun pada masa lima tahun mendatang yang akan disusun dalam Dokumen RPJMD Kabupaten Simalungun 2021-2026.

BAB IV

PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM / KEGIATAN

Kegiatan perencanaan dan penganggaran yang melibatkan seluruh unsur pelaksana yang ada di Organisasi Kerja Perangkat Daerah (OPD), mulai dari penentuan program dan kegiatan, klasifikasi belanja, penentuan standar biaya, penentuan indikator kinerja dan target kinerja, sampai dengan jumlah anggaran yang harus disediakan, memerlukan perhatian yang serius bagi pimpinan Organisasi Perangkat Daerah tentang pelaksanaan program dan kegiatan.

Tabel IV.1
Plafon Anggaran Sementara
Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program / Kegiatan Tahun 2024

NO	OPD	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA TAHUN 2024 (Rp)
1	DINAS PENDIDIKAN	793.264.305.185
2	DINAS KESEHATAN	220.121.404.271
3	PUSKESMAS	66.988.775.000
4	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PERDAGANGAN	28.662.792.598
5	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUAN RONDAHAIM	24.530.784.747
6	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARAPAT	23.177.614.989
7	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	193.350.690.774
8	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN	3.537.009.213
9	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	8.574.557.366
10	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	6.986.958.964
11	DINAS SOSIAL	10.181.341.739
12	DINAS KETENAGAKERJAAN	3.974.777.221
13	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	4.321.124.561
14	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	6.977.548.371

15	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	10.751.227.240
16	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	6.594.614.491
17	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGORI	5.226.529.171
18	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	21.726.132.201
19	DINAS PERHUBUNGAN	8.046.649.589
20	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	4.147.927.101
21	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	7.098.124.795
22	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	5.870.520.949
23	ADMINISTRATOR KAWASAN EKONOMI KHUSUS SEI MANGKEI	2.019.222.635
24	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	8.767.527.956
25	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	6.115.015.697
26	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	16.848.536.417
27	DINAS PERTANIAN	47.625.995.498
28	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	13.293.347.044
29	SEKRETARIAT DAERAH	61.376.678.643
30	SEKRETARIAT DPRD	55.579.152.479
31	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	8.115.366.683
32	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	589.589.328.840
33	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	7.575.340.771
34	INSPEKTORAT	11.408.742.856
35	KECAMATAN SIANTAR	4.473.390.373
36	KECAMATAN GUNUNG MALELA	2.978.267.250

37	KECAMATAN GUNUNG MALIGAS	3.025.745.222
38	KECAMATAN PANEI	3.294.803.431
39	KECAMATAN PANOMBEIAN PANEI	2.737.076.051
40	KECAMATAN JORLANG HATARAN	3.211.245.480
41	KECAMATAN RAYA KAHEAN	2.432.233.723
42	KECAMATAN BOSAR MALIGAS	2.877.391.859
43	KECAMATAN SIDAMANIK	3.372.329.360
44	KECAMATAN PAMATANG SIDAMANIK	3.077.362.315
45	KECAMATAN TANAH JAWA	4.175.094.702
46	KECAMATAN HATONDUHAN	2.160.026.560
47	KECAMATAN DOLOK PANRIBUAN	2.017.416.372
48	KECAMATAN PURBA	2.747.790.141
49	KECAMATAN HARANGGAOL HORISON	2.017.961.361
50	KECAMATAN GIRSANG SIPANGAN BOLON	4.338.695.158
51	KECAMATAN DOLOK BATU NANGGAR	4.462.734.741
52	KECAMATAN HUTA BAYU RAJA	2.866.828.798
53	KECAMATAN JAWA MARAJA BAH JAMBI	2.091.112.345
54	KECAMATAN DOLOK PARDAMEAN	1.570.316.493
55	KECAMATAN PEMATANG BANDAR	3.731.612.665
56	KECAMATAN BANDAR HULUAN	2.077.650.900
57	KECAMATAN BANDAR	4.303.763.713
58	KECAMATAN BANDAR MASILAM	1.952.277.395
59	KECAMATAN SILIMAKUTA	2.666.722.742
60	KECAMATAN SILOU KAHEAN	1.725.598.357
61	KECAMATAN TAPIAN DOLOK	3.711.619.711
62	KECAMATAN RAYA	5.084.889.789
63	KECAMATAN UJUNG PADANG	2.553.967.469

64	KECAMATAN PAMATANG SILIMAHUTA	1.715.592.198
65	KECAMATAN DOLOG MASAGAL	1.296.293.591
66	KECAMATAN DOLOK SILOU	1.671.272.501
67	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	82.318.827.739
	JUMLAH	2.467.163.576.558

Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Berisikan plafon anggaran sementara masing-masing urusan, satuan kerja dan program/kegiatan/sub kegiatan yang dituangkan secara deskriptif dan dalam bentuk tabulasi di bawah ini:

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	793.264.305.185,00	
1.01.0.00.0.00.04.0000	DINAS PENDIDIKAN	793.264.305.185,00	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	236.287.796.491,00	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	136.714.536.896,00	
1.01.02.2.01.0003	Pembangunan Ruang GuruKepala Sekolah/TTU	1.354.325.000,00	
1.01.02.2.01.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	3.000.000.000,00	
1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	4.777.500.000,00	
1.01.02.2.01.0009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang GuruKepala Sekolah/TTU	1.243.537.680,00	
1.01.02.2.01.0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	1.243.537.680,00	
1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah	19.229.865.000,00	
1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Kari Pendidikan dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	677.265.100,00	
1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Ketenagagaan dan Manajemen Sekolah	840.317.400,00	
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	81.646.200.000,00	
1.01.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	794.356.560,00	
1.01.02.2.01.0035	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informatika dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	1.260.000.000,00	
1.01.02.2.01.0037	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	322.150.000,00	
1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru	4.147.266.680,00	
1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	16.188.195.870,00	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	83.539.942.130,00	
1.01.02.2.02.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	2.000.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4	
1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	5.777.500.000,00		
1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	4.996.356.750,00		
1.01.02.2.02.0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	1.243.537.680,00		
1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah	19.939.940.000,00		
1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	160.000.000,00		
1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	1.169.993.200,00		
1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	337.724.900,00		
1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	32.070.687.000,00		
1.01.02.2.02.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	109.797.400,00		
1.01.02.2.02.0048	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	1.250.000.000,00		
1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru	13.220.867.520,00		
1.01.02.2.02.0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	1.243.537.680,00		
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	15.333.710.471,00		
1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	492.520.371,00		
1.01.02.2.03.0003	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	890.000.000,00		
1.01.02.2.03.0007	Pengadaan Mebel PAUD	780.500.000,00		
1.01.02.2.03.0013	Penyeenggaraan Proses Belajar PAUD	778.975.700,00		
1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	3.360.000.000,00		
1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Keterbacaan dan Manajemen PAUD	446.281.200,00		
1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	8.079.600.000,00		
1.01.02.2.03.0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	121.319.800,00		
1.01.02.2.03.0029	Facilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	382.513.400,00		
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	699.607.000,00		

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4	
1.01.02.2.04.0017	Pengalasan Dana BOP Sekeloh NonformalKesetaraan	661.800.000,00		
1.01.02.2.04.0030	Facilitas Komunitas Belajar Pendidk dan Tenaga Kependidikan	37.807.000,00		
1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	87.721.900,00		
1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	87.721.900,00		
1.01.03.2.01.0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	87.721.900,00		
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	556.838.794,00		
1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	56.449.000,00		
1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	29.245.000,00		
1.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	16.440.000,00		
1.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.764.000,00		
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	534.090.834.794,00		
1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	534.059.574.794,00		
1.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	21.240.000,00		
1.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	10.020.000,00		
1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	167.901.000,00		
1.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	32.071.000,00		
1.01.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	41.000.000,00		
1.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	94.830.000,00		
1.01.01.2.05	Administrasi Kepengawasan Perangkat Daerah	18.648.000,00		
1.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepengawasan	18.648.000,00		
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.656.127.220,00		
1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	54.851.000,00		
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	987.669.620,00		

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLATON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	190.520.800,00	
1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	259.231.000,00	
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	137.846.000,00	
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.027.000.000,00	
1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.047.403.500,00	
1.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2.619.915.900,00	
1.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	240.000.000,00	
1.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	69.905.000,00	
1.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.650.000,00	
1.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	109.928.600,00	
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15.596.420.000,00	
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	195.320.000,00	
1.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Perawatan dan Perengkapan Kantor	31.500.000,00	
1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	15.369.600.000,00	
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.255.003.280,00	
1.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	794.540.000,00	
1.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	256.500.000,00	
1.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	16.830.000,00	
1.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	187.133.280,00	
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	363.481.371.605,00	
1.02.0.00.0.00.19.0000	DINAS KESEHATAN	228.121.404.271,00	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	97.624.534.334,00	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	42.630.131.050,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4	
1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas	30.650.000.000,00		
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan	3.212.161.750,00		
1.02.02.2.01.0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kesehatan	249.853.200,00		
1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	8.251.600.000,00		
1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	266.516.100,00		
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	54.778.265.832,00		
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1.276.511.300,00		
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	1.499.999.800,00		
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	375.000.000,00		
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	380.000.000,00		
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	290.000.000,00		
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	220.000.000,00		
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	250.000.000,00		
1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	150.000.000,00		
1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	2.400.000.000,00		
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	149.999.400,00		
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terutama Tuberkulosis	2.000.000.000,00		
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Tertekel HIV	1.000.000.000,00		
1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	243.700.500,00		
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1.499.999.852,00		
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	50.000.000,00		
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	900.000.000,00		
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	331.168.000,00		

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	25.000.000,00	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	263.474.780,00	
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	250.000.000,00	
1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	249.956.500,00	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1.006.523.000,00	
1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	36.288.000.000,00	
1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Specimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	87.465.000,00	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	499.800.000,00	
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	939.526.800,00	
1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	950.095.800,00	
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ibutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	300.000.000,00	
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	250.000.000,00	
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	250.000.000,00	
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	150.000.000,00	
1.02.02.2.02.0043	Pengelolaan kawasan tanpa rokok	250.000.000,00	
1.02.02.2.03	Penyenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	216.137.452,00	
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	216.137.452,00	
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	501.053.100,00	
1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	100.350.000,00	
1.02.03.2.01.0002	Pembinaan dan Penguasaan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Peningkatan Praktik Tenaga Kesehatan	100.350.000,00	
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Penggunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	159.150.200,00	
1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	150.150.200,00	
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	250.582.900,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4	
1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	250.582.900,00		
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	458.192.000,00		
1.02.04.2.01	Penyediaan Obat Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	100.000.000,00		
1.02.04.2.01.0001	Pengembangan dan Penguasaan serta Tindak Lanjut Penguasaan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	238.192.000,00		
1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	238.192.000,00		
1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Penguasaan serta Tindak Lanjut Penguasaan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	120.000.000,00		
1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengolahan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	120.000.000,00		
1.02.04.2.04.0001	Pengendalian dan Penguasaan serta Tindak Lanjut Penguasaan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengolahan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	790.000.000,00		
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	250.000.000,00		
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	250.000.000,00		
1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	350.000.000,00		
1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	350.000.000,00		
1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	190.000.000,00		
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	190.000.000,00		
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Peningkatan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	120.747.594.837,00		
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	90.220.300,00		
1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	27.191.500,00		
1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11.496.800,00		
1.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	11.334.800,00		
1.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	40.197.200,00		
1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	116.885.712.637,00	
1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	106.207.037.837,00	
1.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	8.690.400.000,00	
1.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Triwulanan/ Semesteran SKPD	28.274.800,00	
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.426.441.900,00	
1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	511.852.000,00	
1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	249.725.600,00	
1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	331.204.300,00	
1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	368.860.000,00	
1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	964.800.000,00	
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	255.720.000,00	
1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	255.720.000,00	
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.086.500.000,00	
1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	586.500.000,00	
1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	500.000.000,00	
1.02.0.00.0.00.19.0006	Puskesmas Bah Bolton	770.939.000,00	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	770.939.000,00	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	770.939.000,00	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	31.200.000,00	
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	10.402.500,00	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	7.600.000,00	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	2.000.000,00	
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	4.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	46.867.500,00	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	8.000.000,00	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	27.694.000,00	
1.02.02.2.02.0020	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	165.000.000,00	
1.02.02.2.02.0025	Operasional Pelayanan Puskesmas	436.605.000,00	
1.02.02.2.02.0033	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Iktan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	2.000.000,00	
1.02.02.2.02.0036	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	4.000.000,00	
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	2.000.000,00	
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan Reproduksi	6.770.000,00	
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu dan Anak	16.800.000,00	
1.02.02.2.02.0046	Puskesmas Bah Torang	312.570.000,00	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	19.368.000,00	
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	1.817.400,00	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	1.800.000,00	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1.800.000,00	
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	3.600.000,00	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	26.814.000,00	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	3.600.000,00	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	18.219.600,00	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	78.000.000,00	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	67.843.000,00	
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Iktan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	2.400.000,00	
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	1.800.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4	
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	5.408.000,00		
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	75.600.000,00		
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	4.800.000,00		
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	4.800.000,00		
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1.447.316.000,00		
1.02.0.00.0.00.19.0070	Puskesmas Bander Huluan	1.411.316.000,00		
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.411.316.000,00		
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	22.000.000,00		
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	11.617.400,00		
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	12.000.000,00		
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	10.000.000,00		
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terbuja Tuberkulosis	10.000.000,00		
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	41.624.400,00		
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12.000.000,00		
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	60.938.000,00		
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	36.073.900,00		
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	158.600.000,00		
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	969.094.300,00		
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	4.000.000,00		
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	10.000.000,00		
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	2.000.000,00		
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	9.368.000,00		
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	42.000.000,00	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	36.000.000,00	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	36.000.000,00	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	36.000.000,00	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1.431.956.000,00	
1.02.0.00.0.00.19.0071	Puskesmas Bandar Masilam	1.431.956.000,00	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.431.956.000,00	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	68.400.000,00	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	8.685.000,00	
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	6.600.000,00	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	1.800.000,00	
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	9.400.000,00	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terbuja Tuberkulosis	10.800.000,00	
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	34.200.000,00	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	16.200.000,00	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	28.070.000,00	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	118.500.000,00	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1.110.001.000,00	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	10.800.000,00	
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Maksimal)	8.500.000,00	
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	821.663.000,00	
1.02.0.00.0.00.19.0072	Puskesmas Bandar Siantar	14.400.000,00	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	8.595.000,00	
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		3	4
1	2		
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	5.040.000,00	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terguga Tuberkulosis	4.800.000,00	
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Tertinggi HIV	3.690.000,00	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	14.400.000,00	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	37.575.000,00	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	122.200.000,00	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tifus Menular	519.928.000,00	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	7.200.000,00	
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	10.395.000,00	
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	3.600.000,00	
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	5.040.000,00	
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	14.400.000,00	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	14.400.000,00	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	14.400.000,00	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	14.400.000,00	
1.02.0.00.0.00.19.0073	Puskesmas Bandar Tinggi	770.537.000,00	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	757.737.000,00	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	757.737.000,00	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	7.624.000,00	
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	6.542.000,00	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	15.300.000,00	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terguga Tuberkulosis	9.600.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Tertentu HIV	12.800.000,00	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	34.766.000,00	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	6.400.000,00	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	11.263.000,00	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	103.200.000,00	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	508.784.000,00	
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1.800.000,00	
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkuulosis	6.400.000,00	
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	1.600.000,00	
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	10.236.000,00	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	21.600.000,00	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	12.800.000,00	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	12.800.000,00	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12.800.000,00	
1.02.0.00.0.00.19.0074	Puskesmas Batu Anam	2.306.110.000,00	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	2.267.710.000,00	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.267.710.000,00	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	26.803.000,00	
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	7.712.000,00	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	21.000.000,00	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkuulosis	32.000.000,00	
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Tertentu HIV	15.600.000,00	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	41.800.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	18.000.000,00	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	35.939.900,00	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	135.100.000,00	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.815.238.000,00	
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Immunisasi dan Pemberian Obat Massal)	9.600.000,00	
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberukulosis	27.200.000,00	
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	8.000.000,00	
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	26.920.100,00	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	44.800.000,00	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	38.400.000,00	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	38.400.000,00	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	38.400.000,00	
1.02.0.00.0.00.19.0075	Puskesmas Besar Maligas	1.641.141.000,00	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.621.327.750,00	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.621.327.750,00	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	36.224.000,00	
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	2.000.000,00	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	21.420.000,00	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberukulosis	11.025.000,00	
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Tertinggi HIV	9.450.000,00	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	71.470.000,00	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	28.350.000,00	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	13.560.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	92.050.000,00		
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.215.176.750,00		
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ibutan Pasca Immunisasi dan Pemberian Obat Massal)	6.300.000,00		
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	15.750.000,00		
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	4.050.000,00		
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	34.502.000,00		
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	60.000.000,00		
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	19.813.250,00		
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	19.813.250,00		
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	19.813.250,00		
1.02.0.00.0.00.19.0076	Puskesmas Buntu Turunan	677.231.000,00		
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	667.031.000,00		
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	19.368.000,00		
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	7.302.000,00		
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	8.400.000,00		
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	3.000.000,00		
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Tergang Tuberkulosis	3.600.000,00		
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	27.952.500,00		
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	9.600.000,00		
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	20.862.600,00		
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	104.500.000,00		
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	380.526.000,00		
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas			

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4	
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Iritan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	4.800.000,00		
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	3.000.000,00		
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	600.000,00		
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	19.080.000,00		
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	54.300.000,00		
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	10.200.000,00		
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	10.200.000,00		
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	10.200.000,00		
1.02.0.00.0.00.19.0077	Puskesmas Cingkes	469.408.000,00		
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	469.408.000,00		
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	37.084.000,00		
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	24.230.000,00		
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	23.993.000,00		
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	13.230.000,00		
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduja Tuberkulosis	11.719.000,00		
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	70.010.000,00		
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	21.724.000,00		
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	31.526.000,00		
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	57.693.000,00		
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	178.199.000,00		
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.648.241.000,00		
1.02.0.00.0.00.19.0076	Puskesmas Gunung Maligas	22.314.000,00		
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	6.398.000,00	
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	10.000.000,00	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	21.600.000,00	
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	43.200.000,00	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	35.928.000,00	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	14.400.000,00	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	40.266.000,00	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	166.000.000,00	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.152.145.000,00	
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Iklan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	21.600.000,00	
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	21.600.000,00	
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	10.800.000,00	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	33.200.000,00	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	28.800.000,00	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	28.800.000,00	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	28.800.000,00	
1.02.0.00.0.00.19.0079	Puskesmas Haragaol	723.008.000,00	
1.02.02	PROGRAM PENUNJUKAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	705.408.000,00	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	705.408.000,00	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	11.998.400,00	
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	4.082.600,00	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	7.200.000,00	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	5.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Tertekst HIV	10.000.000,00	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	32.237.600,00	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	8.000.000,00	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	19.269.400,00	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	106.900.000,00	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	470.764.000,00	
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Iktal Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1.400.000,00	
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	5.000.000,00	
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	1.000.000,00	
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	6.656.000,00	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	16.000.000,00	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	17.600.900,00	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	17.600.900,00	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	17.600.000,00	
1.02.0.00.0.00.19.0080	Puskesmas Hatonduhan	1.809.684.000,00	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.790.484.000,00	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.790.484.000,00	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	25.556.400,00	
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	17.119.500,00	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	8.400.000,00	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	18.000.000,00	
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Tertekst HIV	9.000.000,00	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	37.042.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	30.000.000,00	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	44.106.000,00	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	178.200.000,00	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.348.200.100,00	
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (kejadian Iktan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	2.400.000,00	
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	21.600.000,00	
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	1.200.000,00	
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	11.768.000,00	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	37.800.000,00	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	19.200.000,00	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	19.200.000,00	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Penguatan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	19.200.000,00	
1.02.0.00.0.00.19.0081	Puskesmas Hula Bayu	1.468.488.000,00	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.417.888.000,00	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.417.888.000,00	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	30.148.500,00	
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	17.588.500,00	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	23.400.000,00	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terbang Tuberkulosis	11.000.000,00	
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Tertekuk HIV	33.000.000,00	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	52.347.000,00	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	33.000.000,00	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	39.268.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	141.600.000,00	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	927.370.000,00	
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	2.200.000,00	
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	11.000.000,00	
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	2.200.000,00	
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	13.368.000,00	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	80.400.000,00	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	50.600.000,00	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	50.600.000,00	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	50.600.000,00	
1.02.0.60.0.00.19.0082	Puskesmas Jawa Maraja	1.227.724.000,00	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.227.724.000,00	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.227.724.000,00	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	60.319.000,00	
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	1.000.000,00	
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	1.000.000,00	
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	12.128.000,00	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	9.923.000,00	
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	5.078.000,00	
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	20.034.000,00	
1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	1.000.000,00	
1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	1.000.000,00	
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	5.040.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	7.560.000,00		
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	10.090.000,00		
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	53.630.000,00		
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	3.150.000,00		
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	10.080.000,00		
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	78.032.000,00		
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	3.938.000,00		
1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	2.205.000,00		
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	150.350.000,00		
1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan Nasional	945.000,00		
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	796.032.000,00		
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Peristiwa Obat Maksimal)	2.520.000,00		
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	17.640.000,00		
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	5.040.000,00		
1.02.0.00.0.00.19.0083	Puskesmas Kerasaen	1.512.099.000,00		
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	9.677.500,00		
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	17.119.500,00		
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pemukiman Dasar	18.800.000,00		
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	7.000.000,00		
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Tertidaki HIV	16.800.000,00		
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	24.162.000,00		
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	14.000.000,00		
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	36.704.400,00		

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	197.600.000,00	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.045.963.000,00	
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Iktan Pasca Immunisasi dan Pemberian Obat Massal)	2.600.000,00	
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	7.000.000,00	
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	8.400.000,00	
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	16.452.000,00	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	66.000.000,00	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	23.800.000,00	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	23.800.000,00	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Peningkatan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	23.800.000,00	
1.02.05.2.03.0004	Puskesmas Marhal Bandar	999.354.000,00	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	993.754.000,00	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	993.754.000,00	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	25.368.000,00	
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	3.622.600,00	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	13.205.600,00	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	16.967.800,00	
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	12.600.000,00	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	15.865.000,00	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	19.600.000,00	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	24.003.000,00	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	152.000.000,00	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	638.912.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Isutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	5.610.000,00	
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	12.600.000,00	
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	2.800.000,00	
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	8.400.000,00	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	42.000.000,00	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	5.600.000,00	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	5.600.000,00	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	5.600.000,00	
1.02.0.00.0.00.19.0085	Puskemas Marubun Jaya	1.070.302.000,00	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.027.102.000,00	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.027.102.000,00	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	35.226.000,00	
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	17.119.500,00	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	10.200.000,00	
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	12.468.000,00	
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	32.800.000,00	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Tarduga Tuberkulosis	9.600.000,00	
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Tertentu HIV	14.400.000,00	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	56.809.500,00	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	24.000.000,00	
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	46.846.000,00	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	38.052.000,00	
1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	1.600.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	119.600.000,00	
1.02.02.2.02.0025	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	1.600.000,00	
1.02.02.2.02.0026	Operasional Pelayanan Puskesmas	590.781.000,00	
1.02.02.2.02.0033	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	6.400.000,00	
1.02.02.2.02.0036	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkuulosis	9.600.000,00	
1.02.02.2.02.0040	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	43.200.000,00	
1.02.05	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	43.200.000,00	
1.02.05.2.03	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	43.200.000,00	
1.02.05.2.03.0001	Puskesmas Negeri Dolok	1.594.495.000,00	
1.02.0.00.0.00.19.0086	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.583.890.000,00	
1.02.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.583.890.000,00	
1.02.02.2.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	39.000.000,00	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	9.954.000,00	
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	8.916.200,00	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkuulosis	9.750.000,00	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	15.600.000,00	
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	65.200.000,00	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	11.700.000,00	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	32.465.800,00	
1.02.02.2.02.0020	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	226.271.000,00	
1.02.02.2.02.0025	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.009.280.000,00	
1.02.02.2.02.0033	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	4.980.000,00	
1.02.02.2.02.0036	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkuulosis	23.100.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	5.200.000,00	
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	5.448.000,00	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	117.025.000,00	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	10.605.000,00	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	10.605.000,00	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1.104.316.000,00	
1.02.0.00.0.00.19.0087	Puskesmas Pematang Silalahuta	1.090.116.000,00	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.090.116.000,00	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	14.000.000,00	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	45.408.000,00	
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	5.200.000,00	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	8.000.000,00	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	4.000.000,00	
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	84.702.000,00	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	6.000.000,00	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	30.510.400,00	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	94.000.000,00	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	727.020.000,00	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	4.000.000,00	
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	67.275.600,00	
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	14.200.000,00	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	14.200.000,00	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	14.200.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	14.200.000,00	
1.02.0.00.0.00.19.0088	Puskesmas Panel Tengah	2.167.039.000,00	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	2.139.839.000,00	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.139.839.000,00	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	102.774.000,00	
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	20.426.900,00	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	18.800.000,00	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	28.600.000,00	
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terteksi HIV	10.000.000,00	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	31.671.400,00	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	40.800.000,00	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	19.955.000,00	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	193.000.000,00	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.643.209.800,00	
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (kejadian lukan Pasca Imunisasi dan Pembertan Obat Maksimal)	6.800.000,00	
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	23.800.000,00	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	27.200.000,00	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	27.200.000,00	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	27.200.000,00	
1.02.0.00.0.00.19.0089	Puskesmas Pancumbelan Pane	1.703.056.000,00	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.667.856.000,00	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.667.856.000,00	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	19.148.500,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	14.400.000,00		
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	3.500.000,00		
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	52.093.500,00		
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	28.800.000,00		
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	94.024.300,00		
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	87.500.000,00		
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	795.088.200,00		
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	4.800.000,00		
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	14.400.000,00		
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	2.000.000,00		
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	17.372.000,00		
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	43.600.000,00		
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	46.800.000,00		
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	46.800.000,00		
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	46.800.000,00		
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	802.860.000,00		
1.02.0.00.0.00.19.0091	Puskesmas Parbutaran	788.860.000,00		
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	788.860.000,00		
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	788.860.000,00		
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	33.400.000,00		
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	6.267.200,00		
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	18.400.000,00		
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	24.450.000,00		
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	8.400.000,00		

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	15.274.200,00	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	15.000.000,00	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Tua/Terduga Tuberkulosis	8.800.000,00	
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	13.200.000,00	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	30.976.700,00	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	33.000.000,00	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	35.938.000,00	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	122.400.000,00	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Penyutran Puskesmas	1.314.378.400,00	
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ibutan Pasca Imunisasi dan Peributan Obat Malaria)	2.200.000,00	
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	8.800.000,00	
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	2.200.000,00	
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	9.940.000,00	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	36.600.000,00	
1.02.05	PROGRAM PEMERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	35.200.000,00	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	35.200.000,00	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	36.200.000,00	
1.02.0.00.0.00.19.0090	Puskesmas Parapat	1.252.686.000,00	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.205.886.000,00	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.205.886.000,00	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	23.258.000,00	
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	11.810.000,00	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	13.200.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gigi Masyarakat	38.027.800,00	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	8.400.000,00	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	29.683.000,00	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	110.200.000,00	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	409.283.000,00	
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	14.000.000,00	
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	11.200.000,00	
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	5.600.000,00	
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	14.436.000,00	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	57.113.000,00	
	14.090.000,00		
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	14.000.000,00	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	14.000.000,00	
1.02.0.00.0.00.19.0092	Puskesmas Penatang Bandar	1.315.898.000,00	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.311.088.000,00	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.311.088.000,00	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	30.168.200,00	
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	40.070.200,00	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	5.500.000,00	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terguga Tuberkulosis	6.000.000,00	
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terteksi HIV	2.400.000,00	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gigi Masyarakat	46.262.900,00	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	7.200.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	18.625.700,00	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	110.000.000,00	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.035.260.000,00	
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	3.600.000,00	
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberculosis	6.000.000,00	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	4.800.000,00	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	4.800.000,00	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2.852.119.000,00	
1.02.0.00.0.00.19.0093	Puskesmas Pematang Raya	2.794.319.000,00	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	2.794.319.000,00	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	20.570.000,00	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	6.542.000,00	
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	16.800.000,00	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	20.400.000,00	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberculosis	30.600.000,00	
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terteksk HIV	49.754.900,00	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	40.800.000,00	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	44.964.000,00	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	2.112.000.000,00	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2.248.107.800,00	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	10.200.000,00	
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberculosis	20.400.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4	
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	12.180.400,00		
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	61.800.000,00		
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	57.800.000,00		
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	57.800.000,00		
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2.823.115.000,00		
1.02.0.00.0.00.19.0094	Pushkesmas Perdagangan	2.809.727.000,00		
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	2.809.727.000,00		
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100.838.000,00		
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1.000.000,00		
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	1.000.000,00		
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	154.035.000,00		
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	17.010.000,00		
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	25.830.000,00		
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	9.505.000,00		
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	1.000.000,00		
1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	1.000.000,00		
1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	11.340.000,00		
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	12.758.000,00		
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terganggu Tuberkulosis	5.670.000,00		
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Tertinfeksi HIV	138.796.000,00		
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	5.040.000,00		
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	23.310.000,00		
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	16.002.000,00	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	11.970.000,00	
1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	11.340.000,00	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	128.930.000,00	
1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial RLB ke Laboratorium rujukan/Nasional	1.890.000,00	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	2.108.153.000,00	
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	11.340.000,00	
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	11.340.000,00	
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	630.000,00	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	13.388.000,00	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	13.388.000,00	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	13.388.000,00	
1.02.0.00.0.00.19.0095	Puskesmas Raja Mafigas	889.507.000,00	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	885.569.000,00	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	885.569.000,00	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	19.000.000,00	
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	13.842.000,00	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	11.160.000,00	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	4.725.000,00	
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Tertentu HIV	1.575.200,00	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	57.534.000,00	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	4.725.000,00	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	30.446.800,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	122.103.000,00		
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	546.487.000,00		
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	8.150.000,00		
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	3.623.000,00		
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	3.000.000,00		
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	6.213.000,00		
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	52.985.000,00		
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	3.938.000,00		
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3.938.000,00		
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	3.938.000,00		
1.02.0.00.0.00.19.0096	Puskesmas Rambung Merah	1.220.757.000,00		
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.201.557.000,00		
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.201.557.000,00		
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	74.110.000,00		
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	3.646.000,00		
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	22.200.000,00		
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Tergang Tuberkulosis	4.000.000,00		
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terteksi HIV	4.000.000,00		
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	29.272.000,00		
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	14.400.000,00		
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	15.661.000,00		
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	140.400.000,00		
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	683.468.000,00		

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4	
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	800.000,00		
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	9.600.000,00		
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	19.200.000,00		
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	19.200.000,00		
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	19.200.000,00		
1.02.0.00.0.00.19.0097	Puskesmas Saran Padang	1.237.450.000,00		
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.219.898.400,00		
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.219.898.400,00		
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	24.000.000,00		
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	97.908.000,00		
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	54.305.000,00		
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	6.484.000,00		
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terbangun Tuberkulosis	15.318.400,00		
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terteksi HIV	11.000.000,00		
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	114.480.000,00		
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12.690.000,00		
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	58.433.000,00		
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	121.920.000,00		
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	688.645.000,00		
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	14.805.000,00		
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	17.551.600,00		
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	17.551.600,00		
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	17.551.600,00		

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
1.02.0.00.0.00.19.0098	Puskemas Seribu Dolo	1.142.812.000,00	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.132.888.800,00	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.132.888.800,00	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	40.936.000,00	
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	62.448.000,00	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	4.094.800,00	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terdidik Tuberkulosis	11.026.200,00	
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	12.410.000,00	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	33.786.800,00	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	17.010.000,00	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	6.142.800,00	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	131.140.000,00	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskemas	799.560.300,00	
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ibulan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	4.410.000,00	
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	9.922.800,00	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	9.923.200,00	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	9.923.200,00	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	9.923.200,00	
1.02.0.00.0.00.19.0099	Puskemas Sarimatondang	1.565.755.000,00	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.547.755.000,00	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.547.755.000,00	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	24.000.000,00	
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	3.082.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLATON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	13.200.000,00	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	9.000.000,00	
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	1.800.000,00	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	10.900.000,00	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	18.000.000,00	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	21.965.000,00	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	146.290.000,00	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.143.998.000,00	
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diturunkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Periklanan Obat Massal)	9.000.000,00	
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	18.900.000,00	
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	900.000,00	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	126.700.000,00	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	18.000.000,00	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	18.000.000,00	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	18.000.000,00	
1.02.0.00.0.00.19.0100	Puskesmas Sayur Malingi	503.595.000,00	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	482.955.000,00	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	482.955.000,00	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	22.568.000,00	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	7.658.000,00	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	5.600.000,00	
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	3.000.000,00	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	45.767.800,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	28.400.000,00		
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	24.045.800,00		
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	116.000.000,00		
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	150.515.800,00		
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	8.800.000,00		
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	9.600.000,00		
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	800.000,00		
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	4.600.000,00		
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	57.600.000,00		
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	20.600.000,00		
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	20.600.000,00		
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	20.600.000,00		
1.02.0.00.0.00.19.0101	Puskesmas Sejahtera	2.197.149.000,00		
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	2.171.549.000,00		
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.171.549.000,00		
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	36.000.000,00		
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	10.081.200,00		
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	20.600.000,00		
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Tergang Tuberkulosis	22.400.000,00		
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	19.200.000,00		
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	49.100.000,00		
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	19.200.000,00		
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	48.360.700,00		

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	21.020.100,00		
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	263.000.000,00		
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.486.499.000,00		
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Maksimal)	9.600.000,00		
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	25.600.000,00		
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	3.200.000,00		
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	19.488.000,00		
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	118.000.000,00		
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	25.600.000,00		
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	25.600.000,00		
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	25.600.000,00		
1.02.0.00.0.00.19.0102	Puskesmas Sidamanik	1.758.412.000,00		
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.736.412.000,00		
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.736.412.000,00		
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	45.420.000,00		
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	8.484.600,00		
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	9.000.000,00		
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	10.000.000,00		
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terteksi HIV	4.000.000,00		
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	52.979.500,00		
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	26.000.000,00		
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	23.100.000,00		
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	185.000.000,00		

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.280.149.100,00	
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Iktan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	6.084.800,00	
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	16.000.000,00	
1.02.02.2.02.0041	Pengkajian pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	2.000.000,00	
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	19.354.000,00	
1.02.02.2.02.0046	Pengobatan upaya kesehatan ibu dan Anak	48.800.000,00	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	32.000.000,00	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	32.000.000,00	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	32.000.000,00	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1.191.263.000,00	
1.02.0.00.0.00.19.0103	Puskesmas Silau Malaha	1.178.263.000,00	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.178.263.000,00	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	24.426.000,00	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	17.119.500,00	
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	11.400.000,00	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	6.000.000,00	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	6.000.000,00	
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	60.009.500,00	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	13.000.000,00	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	35.556.000,00	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	72.200.000,00	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	862.984.000,00	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	3.000.000,00	
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Iktan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	6.000.000,00	
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	2.000.000,00	
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	11.768.000,00	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	44.800.000,00	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	13.000.000,00	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	13.000.000,00	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	13.000.000,00	
1.02.0.00.0.00.19.0104	Puskesmas Simping Bah Jambi	2.045.575.000,00	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	2.011.575.000,00	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.011.575.000,00	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	17.748.500,00	
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	17.119.500,00	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	22.000.000,00	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Teriduga Tuberkulosis	10.000.000,00	
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terteksa HIV	12.000.000,00	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	38.547.000,00	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	20.000.000,00	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	40.355.600,00	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	124.600.000,00	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.626.036.400,00	
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	4.000.000,00	
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	10.000.000,00	
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (COHIV)	4.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4	
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	12.368.000,00		
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	52.800.000,00		
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	34.000.000,00		
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	34.000.000,00		
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	34.000.000,00		
1.02.0.00.0.00.19.0105	Puskesmas Sinasih	322.198.000,00		
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	317.698.000,00		
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	317.698.000,00		
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	10.800.000,00		
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	15.572.000,00		
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	3.014.800,00		
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Tergang Tuberubosis	3.780.000,00		
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	8.902.500,00		
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	7.785.000,00		
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	40.426.500,00		
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	68.235.200,00		
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	64.961.000,00		
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Iktan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	11.340.000,00		
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	7.911.000,00		
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	75.070.000,00		
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	4.500.000,00		
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	4.500.000,00		
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	4.500.000,00		

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLATON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
1.02.0.00.0.00.19.0106	Puskesmas Sinder Raya	1.657.640.000,00	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.651.040.000,00	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.651.040.000,00	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	32.520.000,00	
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	11.430.000,00	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	11.542.000,00	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	6.000.000,00	
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terteksi HIV	4.400.000,00	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	58.200.000,00	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	19.496.000,00	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	155.000.000,00	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.226.360.000,00	
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ibutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Malaria)	4.400.000,00	
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	12.000.000,00	
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	27.692.000,00	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	82.800.000,00	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	6.600.000,00	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	6.600.000,00	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	6.600.000,00	
1.02.0.00.0.00.19.0107	Puskesmas Sipintu Angin	1.161.630.000,00	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.161.630.000,00	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.161.630.000,00	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	48.543.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	6.945.000,00	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	12.000.000,00	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	2.200.000,00	
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Tertinggi HIV	3.300.000,00	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	22.400.000,00	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	6.800.000,00	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	42.266.000,00	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	63.100.000,00	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	898.041.000,00	
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Iltutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	3.300.000,00	
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	4.400.000,00	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	46.335.000,00	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	35.200.000,00	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	35.200.000,00	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	35.200.000,00	
1.02.06.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	3.225.354.000,00	
1.02.0.00.0.00.19.0106	Puskesmas Tanah Jawa	3.191.754.000,00	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	3.191.754.000,00	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	45.936.000,00	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	13.662.800,00	
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	27.600.000,00	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	14.400.000,00	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	12.000.000,00	
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Tertinggi HIV		

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	66.911.000,00	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	38.400.000,00	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	33.646.400,00	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	200.200.000,00	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	2.632.629.800,00	
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	2.400.000,00	
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	14.400.000,00	
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	2.400.000,00	
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	11.768.000,00	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	75.400.000,00	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	33.600.000,00	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	33.600.000,00	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2.497.959.000,00	
1.02.0.00.0.00.19.0109	Puskesmas Tapian Dolok	2.489.159.000,00	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	2.489.159.000,00	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	64.075.000,00	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	4.121.000,00	
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	30.400.000,00	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	52.800.000,00	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	33.000.000,00	
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terteksi HIV	84.275.000,00	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	67.000.000,00	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	17.484.000,00	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	184.000.000,00	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.784.094.000,00	
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	4.400.000,00	
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	22.000.000,00	
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	4.400.000,00	
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	32.710.000,00	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	104.400.000,00	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	8.800.000,00	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	8.800.000,00	
1.02.05.2.03.0001	Bantuan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	8.800.000,00	
1.02.0.00.0.00.19.0110	Puskesmas Tiga Balata	1.576.705.000,00	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.558.705.000,00	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.558.705.000,00	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	18.000.000,00	
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	9.519.000,00	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	12.000.000,00	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terguga Tuberkulosis	24.000.000,00	
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	59.000.000,00	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	24.000.000,00	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	36.347.400,00	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan		
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	127.400.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4	
1.02.02.2.02.0003	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.120.877.600,00		
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12.000.000,00		
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	12.000.000,00		
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	12.000.000,00		
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	15.961.000,00		
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	62.800.000,00		
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	18.000.000,00		
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	18.000.000,00		
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	18.000.000,00		
1.02.0.00.0.00.19.0111	Puskesmas Tiga Dots	1.856.940.000,00		
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.856.940.000,00		
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.856.940.000,00		
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	102.800.000,00		
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	10.820.000,00		
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	49.200.000,00		
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Tua/Terduga Tuberkulosis	3.000.000,00		
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Tertinggi HIV	9.500.000,00		
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	81.086.500,00		
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	42.800.000,00		
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	23.921.000,00		
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	148.700.000,00		
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.352.104.600,00		
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1.000.000,00		

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	8.700.000,00	
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	3.000.000,00	
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	21.305.900,00	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	9.000.000,00	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	9.000.000,00	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1.899.391.000,00	
1.02.0.00.0.00.19.0112	Puskesmas Tiga Runggu	1.899.191.000,00	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.890.191.000,00	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	59.304.000,00	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	8.412.600,00	
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	12.974.400,00	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	100.327.800,00	
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	33.600.000,00	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Tua/Terduga Tuberkulosis	11.200.000,00	
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	113.070.600,00	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	10.400.000,00	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	33.736.400,00	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	166.200.000,00	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1.323.765.200,00	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	400.000,00	
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Maksimal)	16.800.000,00	
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	9.200.000,00	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	9.200.000,00		
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	9.200.000,00		
1.02.0.06.0.00.19.0113	Puskesmas Ujung Padang	2.229.978.000,00		
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	2.229.978.000,00		
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	34.260.000,00		
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	9.101.000,00		
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	23.400.000,00		
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	10.400.000,00		
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	15.600.000,00		
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	85.111.000,00		
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	23.400.000,00		
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	30.959.400,00		
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	164.600.000,00		
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1.744.910.600,00		
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	5.200.000,00		
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	10.400.000,00		
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	10.236.000,00		
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	62.400.000,00		
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	31.200.000,00		
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	31.200.000,00		
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	31.200.000,00		
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	31.200.000,00		
1.02.0.00.0.00.20.0000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PERDAGANGAN	28.662.792.598,00		

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	3.326.924.150,00		
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	3.079.999.700,00		
1.02.02.2.01.0006	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	100.000.000,00		
1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan	180.000.000,00		
1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	2.799.999.700,00		
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	196.924.460,00		
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	50.000.000,00		
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	49.998.960,00		
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	49.972.500,00		
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	46.993.000,00		
1.02.02.2.03	Penyenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	50.000.000,00		
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	50.000.000,00		
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	200.000.000,00		
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	200.000.000,00		
1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	200.000.000,00		
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	25.135.868.438,00		
1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21.000.000,00		
1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.000.000,00		
1.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.000.000,00		
1.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.000.000,00		
1.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.000.000,00		
1.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	3.000.000,00		
1.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.000.000,00		

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.000.000,00	
1.02.01.2.01.0007		8.993.688.596,00	
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.987.688.596,00	
1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.000.000,00	
1.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.000.000,00	
1.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Triwulanan/ Semesteran SKPD	948.623.476,00	
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	103.440.500,00	
1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	89.635.100,00	
1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Perabotan dan Perlengkapan Kantor	176.781.584,00	
1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Perabotan Rumah Tangga	199.156.000,00	
1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	149.613.292,00	
1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	20.000.000,00	
1.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	200.000.000,00	
1.02.01.2.06.0009	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	609.293.980,00	
1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	200.000.000,00	
1.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	409.293.980,00	
1.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.951.590.386,00	
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.462.750.386,00	
1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4.468.800.000,00	
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	608.710.000,00	
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	38.420.000,00	
1.02.01.2.09.0001	Perbaikan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	133.890.000,00	
1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	94.960.000,00	
1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Perabotan dan Mesin Lainnya		

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4	
1.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	341.450.000,00		
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	8.000.000.000,00		
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	8.000.000.000,00		
1.02.01.2.13	Penataan Organisasi	3.000.000,00		
1.02.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	3.000.000,00		
1.02.0.00.0.00.21.0000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUAN RONDAHAIM	24.530.784.747,00		
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	6.118.396.880,00		
1.02.02	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	4.406.126.900,00		
1.02.02.2.01	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	200.000.000,00		
1.02.02.2.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan	510.060.000,00		
1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan	546.000.000,00		
1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	3.150.068.900,00		
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.062.267.980,00		
1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	5.322.100,00		
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	20.005.900,00		
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	200.270.880,00		
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	36.908.700,00		
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	589.998.000,00		
1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	102.000.000,00		
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberukulosis	27.302.400,00		
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	75.137.900,00		
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Melania	5.322.100,00		
1.02.02.2.03	Penyenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	350.000.000,00		

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	350.000.000,00	
1.02.02.2.04	Penerbitan Ijin Rumah Sakti Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	300.000.000,00	
1.02.02.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakti Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	300.000.000,00	
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	100.000.000,00	
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000,00	
1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000,00	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	18.312.387.867,00	
1.02.01.2.01	Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.264.100,00	
1.02.01.2.01.0001	Perencanaan Dokumen Pelaksanaan Perangkat Daerah	1.030.000,00	
1.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.034.100,00	
1.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.200.000,00	
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.679.682.247,00	
1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.679.682.247,00	
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.498.986.520,00	
1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	157.544.000,00	
1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Perabotan dan Perlengkapan Kantor	529.741.720,00	
1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	451.702.800,00	
1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	149.997.600,00	
1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Pengendalian	100.000.000,00	
1.02.01.2.06.0006	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.000.000,00	
1.02.01.2.06	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.408.765.000,00	
1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	378.365.000,00	
1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.030.400.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	731.690.000,00	
1.02.01.2.09.0002	Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	234.290.000,00	
1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100.000.000,00	
1.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	397.400.000,00	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	5.000.000.000,00	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	5.000.000.000,00	
1.02.0.00.0.00.22.0000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARAPAT	23.177.614.969,00	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	3.010.067.000,00	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	3.010.067.000,00	
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medis, Fasilitas Pelayanan Kesehatan	808.939.860,00	
1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	2.201.127.120,00	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	20.167.547.989,00	
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.361.167.129,00	
1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.361.167.129,00	
1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	200.000.000,00	
1.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	200.000.000,00	
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	785.574.200,00	
1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Perawatan dan Perengkapan Kantor	250.240.000,00	
1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	120.003.000,00	
1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	90.331.200,00	
1.02.01.2.06.0009	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	325.000.000,00	
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.620.806.660,00	
1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	404.006.680,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	8.416.800.000,00	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	8.000.000.000,00	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Pemungut Pelayanan BLUD	193.350.690.774,00	
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	193.350.690.774,00	
1.03.0.00.0.00.22.0000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	6.100.000.000,00	
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	6.100.000.000,00	
1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.000.000.000,00	
1.03.02.2.02.0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	600.000.000,00	
1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	300.000.000,00	
1.03.02.2.02.0015	Rehabilitasi Bendung Irigasi	1.500.000.000,00	
1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	200.000.000,00	
1.03.02.2.02.0034	Operasional Kelengkapan Pengelola Irigasi	300.000.000,00	
1.03.02.2.02.0035	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	4.574.760.000,00	
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	4.574.760.000,00	
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	200.000.000,00	
1.03.03.2.01.0022	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	160.000.000,00	
1.03.03.2.01.0023	Peningkatan Kapasitas Kelengkapan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	214.760.000,00	
1.03.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	200.000.000,00	
1.03.03.2.01.0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	200.000.000,00	
1.03.03.2.01.0027	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa	3.000.000.000,00	
1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	200.000.000,00	
1.03.03.2.01.0029	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	400.000.000,00	
1.03.03.2.01.0031	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan		

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4	
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	2.977.100.000,00		
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.977.100.000,00		
1.03.05.2.01.0022	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	1.972.000.000,00		
1.03.05.2.01.0037	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	1.000.000.000,00		
1.03.05.2.01.0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	5.100.000,00		
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	7.300.000.000,00		
1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	7.300.000.000,00		
1.03.06.2.01.0024	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	4.800.000.000,00		
1.03.06.2.01.0025	Pembinaan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	200.000.000,00		
1.03.06.2.01.0028	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	200.000.000,00		
1.03.06.2.01.0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	2.000.000.000,00		
1.03.06.2.01.0030	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	100.000.000,00		
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	10.941.390.000,00		
1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Lait Fungsi Bangunan Gedung	10.941.390.000,00		
1.03.08.2.01.0017	Penguatrasaan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	198.900.000,00		
1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemertasaan, Pelestarian dan Pemeliharaan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	10.176.000.000,00		
1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Pemertaan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Lait Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pemeliharaan Bangunan Gedung (RTB), Tim Pivotes Atis (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Peritk, dan Pendaftaran Bangunan Gedung melalui SIMBG	166.490.000,00		
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	1.510.000.000,00		
1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	1.510.000.000,00		
1.03.09.2.01.0007	Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	210.000.000,00		
1.03.09.2.01.0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perikatan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	300.000.000,00		

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4	
1.03.09.2.01.0009	Supervisi Pemetaan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	300.000.000,00		
1.03.09.2.01.0010	Penyusunan Rencana dan Teknis Pemetaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	710.000.000,00		
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	125.074.460.680,00		
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	125.074.460.680,00		
1.03.10.2.01.0020	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	1.300.000.000,00		
1.03.10.2.01.0030	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	510.000.000,00		
1.03.10.2.01.0031	Penggantian Jembatan	2.800.000.000,00		
1.03.10.2.01.0032	Peribengunan Jalan	1.000.000.000,00		
1.03.10.2.01.0033	Rekonstruksi Jalan	109.262.560.680,00		
1.03.10.2.01.0034	Pemeliharaan Bersala Jalan	1.000.000.000,00		
1.03.10.2.01.0036	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	1.000.000.000,00		
1.03.10.2.01.0038	Pemeliharaan Rutin Jembatan	1.000.000.000,00		
1.03.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan	1.300.000.000,00		
1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan Jembatan	801.900.000,00		
1.03.10.2.01.0044	Rehabilitasi Jalan	2.000.000.000,00		
1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	3.000.000.000,00		
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	223.500.000,00		
1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	202.500.000,00		
1.03.11.2.01.0009	Penyediaan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknis atau Analis	67.500.000,00		
1.03.11.2.01.0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknis atau Analis	135.000.000,00		
1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	21.000.000,00		
1.03.11.2.04.0007	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	10.000.000,00		

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
1.03.11.2.04.0008	Penyusunan SOP/Prosedur Kerja Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	6.000.000,00	
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	2.255.797.200,00	
1.03.12.2.01	Pembinaan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	1.888.800.000,00	
1.03.12.2.01.0005	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota	189.000.000,00	
1.03.12.2.01.0011	Penerapan RTRW Kabupaten/Kota	186.997.200,00	
1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	96.997.200,00	
1.03.12.2.02.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	90.000.000,00	
1.03.12.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	90.000.000,00	
1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	90.000.000,00	
1.03.12.2.03.0005	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	90.000.000,00	
1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	90.000.000,00	
1.03.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	32.793.682.894,00	
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	24.560.000,00	
1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.280.000,00	
1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.280.000,00	
1.03.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	23.402.932.774,00	
1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	23.390.652.774,00	
1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.280.000,00	
1.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	25.500.000,00	
1.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12.000.000,00	
1.03.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	13.500.000,00	
1.03.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		
1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	128.400.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4	
1.03.01.2.06.0002	Pengadaan Paksi dan Dinas beserta Alir dan Kelenjorannya	92.400.000,00		
1.03.01.2.06.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	36.000.000,00		
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.488.570.200,00		
1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.337.200,00		
1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Peningkatan Kantor	274.561.600,00		
1.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.991.400,00		
1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	85.680.000,00		
1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	272.000.000,00		
1.03.01.2.06.0009	Penyediaan Rasio Koordinasi dan Konsultasi SKPD	840.000.000,00		
1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.048.237.920,00		
1.03.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.110.000.000,00		
1.03.01.2.07.0003	Pengadaan Alat Besar	2.454.120.000,00		
1.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	37.597.920,00		
1.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	146.520.000,00		
1.03.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	200.000.000,00		
1.03.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.000.000,00		
1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.517.160.000,00		
1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	112.360.000,00		
1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.404.800.000,00		
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.158.322.000,00		
1.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	434.150.000,00		
1.03.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perbaikan Alat Besar	306.322.000,00		
1.03.01.2.09.0005	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.850.000,00		

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	400.000.000,00	
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	3.537.009.213,00	
1.04.2.10.1.03.23.0000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN	3.537.009.213,00	
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	761.292.100,00	
1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	761.292.100,00	
1.04.05.2.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	300.000.000,00	
1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	461.292.100,00	
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.775.717.113,00	
1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.849.069.213,00	
1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.849.069.213,00	
1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	570.237.900,00	
1.04.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.163.200,00	
1.04.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	45.190.000,00	
1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.894.700,00	
1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	510.000.000,00	
1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	280.800.000,00	
1.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36.000.000,00	
1.04.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	244.800.000,00	
1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	75.590.000,00	
1.04.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	71.890.000,00	
1.04.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.700.000,00	
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	15.561.516.330,00	
1.05.0.00.0.00.20.0000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	8.574.557.366,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	314.861.600,00	
1.05.02	Peranganan Gangguan Ketenteraman dan Kertertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	170.961.600,00	
1.05.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Ketertaman dan Kertertiban Umum serta Pertindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	30.000.000,00	
1.05.02.2.01.0003	Pemberdayaan Pertindungan Masyarakat dalam rangka Ketertaman dan Kertertiban Umum	35.668.000,00	
1.05.02.2.01.0004	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Pertindungan Masyarakat Temasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermuara Hak Asasi Manusia	9.000.000,00	
1.05.02.2.01.0005	Penegakan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Pertindungan Masyarakat Temasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermuara Hak Asasi Manusia	33.450.000,00	
1.05.02.2.01.0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketertaman dan Kertertiban Umum	15.000.000,00	
1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketertaman dan Kertertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Petrol, Pengamanan, dan Pengawasan	26.660.000,00	
1.05.02.2.01.0016	Peningkatan Alat Gangguan Ketertaman dan Kertertiban Umum berdasarkan Penda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	21.143.000,00	
1.05.02.2.01.0018	Pengawasan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketertaman dan Kertertiban Umum	144.000.000,00	
1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	54.000.000,00	
1.05.02.2.02.0010	Sosialisai Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	30.000.000,00	
1.05.02.2.02.0011	Penerangan Atas Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	60.000.000,00	
1.05.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	8.259.695.766,00	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.414.688.366,00	
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.414.688.366,00	
1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100.000,00	
1.05.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	506.992.700,00	
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	90.322.700,00	
1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.750.000,00	
1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	28.920.000,00	
1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	375.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.111.461.200,00	
1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	50.601.200,00	
1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.060.800.000,00	
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	226.553.500,00	
1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	221.214.000,00	
1.05.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.339.500,00	
1.05.0.00.0.00.31.0000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	6.986.958.964,00	
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	846.748.800,00	
1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	700.743.800,00	
1.05.03.2.02.0016	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	700.743.800,00	
1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	148.005.000,00	
1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	148.005.000,00	
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	289.256.000,00	
1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	299.256.000,00	
1.05.04.2.04.0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	299.256.000,00	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.838.954.164,00	
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.755.987.564,00	
1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.755.987.564,00	
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	672.456.600,00	
1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	53.581.400,00	
1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Perawatan Rumah Tangga	7.395.200,00	
1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	55.080.000,00	
1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	55.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4	
1.06.01.2.06.0009	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	500.000.000,00		
1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.754.600.000,00		
1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	50.000.000,00		
1.06.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Perawatan dan Peningkapan Kantor	63.000.000,00		
1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.641.600.000,00		
1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	655.910.000,00		
1.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	455.910.000,00		
1.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	200.000.000,00		
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	10.181.341.739,00		
1.06.0.00.0.00.14.0000	DINAS SOSIAL	10.181.341.739,00		
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	756.715.400,00		
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	756.715.400,00		
1.06.02.2.03.0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	31.732.400,00		
1.06.02.2.03.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	274.081.000,00		
1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelurahan/Desa Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	450.902.000,00		
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	708.067.500,00		
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Tertantar, Anak Tertantar, Lanjut Usia Tertantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	708.067.500,00		
1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan	123.195.000,00		
1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang	34.522.500,00		
1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu	450.350.000,00		
1.06.04.2.01.0010	Pemberian Layanan Kedaruratan	100.000.000,00		
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	3.604.212.000,00		
1.06.05.2.02	Pengelolan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	3.604.212.000,00		

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	103.002.000,00	
1.06.05.2.02.0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	495.600.000,00	
1.06.05.2.02.0003	Facilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	3.005.610.000,00	
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	766.091.000,00	
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	498.091.000,00	
1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan	360.880.000,00	
1.06.06.2.01.0002	Penyediaan Sandang	137.211.000,00	
1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	270.000.000,00	
1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Slaga Bencana	270.000.000,00	
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.344.255.839,00	
1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.387.630.539,00	
1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.387.630.539,00	
1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	629.105.300,00	
1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.114.500,00	
1.06.01.2.06.0003	Penyediaan Perawatan Rumah Tangga	12.486.400,00	
1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	32.885.000,00	
1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	36.619.400,00	
1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	540.000.000,00	
1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	130.800.000,00	
1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	30.000.000,00	
1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100.800.000,00	
1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	196.720.000,00	
1.06.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dimas atau Kendaraan Dinas Jabatan	41.480.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
1.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	155.240.000,00	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3.974.777.221,00	
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	3.974.777.221,00	
2.07.0.00.0.00.25.0000	DINAS KETENAGAKERJAAN	49.999.800,00	
2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	49.999.800,00	
2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	49.999.800,00	
2.07.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	107.706.000,00	
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	107.706.000,00	
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	107.706.000,00	
2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Master Kompetensi	107.218.400,00	
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	107.218.400,00	
2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	107.218.400,00	
2.07.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan tinggi Pencari Kerja	180.267.800,00	
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	180.267.800,00	
2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	180.267.800,00	
2.07.05.2.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	3.529.585.221,00	
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	35.113.900,00	
2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.612.700,00	
2.07.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	7.613.700,00	
2.07.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	19.887.500,00	
2.07.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.717.578.081,00	
2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.717.578.081,00	
2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	648.313.800,00	
2.07.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.071.000,00	
2.07.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	207.665.900,00	
2.07.01.2.06.0003	Penyediaan Perakitan Rumeah Tangga	36.880.300,00	
2.07.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	19.278.000,00	
2.07.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	31.418.000,00	
2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	350.000.000,00	
2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	82.599.440,00	
2.07.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	39.399.440,00	
2.07.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	43.200.000,00	
2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	45.980.000,00	
2.07.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	4.321.124.561,00	
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	4.321.124.561,00	
2.08.0.00.0.00.16.0000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	432.366.300,00	
2.08.02.2.01	Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	109.758.000,00	
2.08.02.2.01.0003	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	109.758.000,00	
2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	96.107.200,00	
2.08.02.2.02.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	96.107.200,00	
2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	224.501.100,00	
2.08.02.2.03.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	224.501.100,00	
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	349.551.000,00	
2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	54.435.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
2.08.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	54.435.000,00	
2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	254.504.000,00	
2.08.03.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	40.612.000,00	
2.08.03.2.03	Pengutan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	40.612.000,00	
2.08.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	259.076.000,00	
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	259.076.000,00	
2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	259.076.000,00	
2.08.04.2.01.0003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	505.060.800,00	
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	115.610.000,00	
2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	115.610.000,00	
2.08.06.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	389.450.800,00	
2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	152.709.600,00	
2.08.06.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	236.741.200,00	
2.08.06.2.02.0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	349.857.000,00	
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	54.741.000,00	
2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	54.741.000,00	
2.08.07.2.01.0004	Adwaksi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	254.504.000,00	
2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	254.504.000,00	
2.08.07.2.02.0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	40.612.000,00	
2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4	
2.08.07.2.03.0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	40.612.000,00		
2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	2.425.213.461,00		
2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.724.000,00		
2.08.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	11.724.000,00		
2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.704.104.961,00		
2.08.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.704.104.961,00		
2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	437.304.500,00		
2.08.01.2.06.0002	Penyediaan Perjalanan dan Pengkajian Kantor	35.996.600,00		
2.08.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	33.806.700,00		
2.08.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	26.644.800,00		
2.08.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	31.781.800,00		
2.08.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Baku dan Peraturan Perundang-undangan	3.500.000,00		
2.08.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	299.750.000,00		
2.08.01.2.06.0010	Peralaksanaan Arsip Dinamis pada SKPD	5.825.600,00		
2.08.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	50.000.000,00		
2.08.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	50.000.000,00		
2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	181.160.000,00		
2.08.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	77.600.000,00		
2.08.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17.160.000,00		
2.08.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	86.400.000,00		
2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	40.920.000,00		
2.08.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	40.920.000,00		
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	6.977.548.371,00		

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
2.09.3.27.3.25.16.0000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	6.977.548.371,00	
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	610.985.900,00	
2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	218.148.500,00	
2.09.03.2.01.0016	Penyusunan Necessa Bahan Makanan (NSM)	321.871.500,00	
2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	321.871.500,00	
2.09.03.2.02.0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	70.965.900,00	
2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	70.965.900,00	
2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penggerakngan Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	6.366.562.471,00	
2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.791.400,00	
2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.791.400,00	
2.09.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.761.882.871,00	
2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.753.861.371,00	
2.09.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.207.500,00	
2.09.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.734.000,00	
2.09.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	800.000,00	
2.09.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	800.000,00	
2.09.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.214.035.600,00	
2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	55.970.000,00	
2.09.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	179.783.900,00	
2.09.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60.059.300,00	
2.09.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	199.750.000,00	
2.09.01.2.06.0004	Penyediaan Baran Logistik Kantor		
2.09.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakn dan Pengandaan	56.722.400,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4	
2.09.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat, Koordinasi dan Konsultasi SKPD	659.750.000,00		
2.09.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	108.000.000,00		
2.09.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	108.000.000,00		
2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	199.242.600,00		
2.09.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	133.242.600,00		
2.09.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	66.000.000,00		
2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	79.890.000,00		
2.09.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	79.890.000,00		
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	10.751.227.240,08		
2.11.0.00.0.00.07.0000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	10.751.227.240,08		
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	723.960.000,00		
2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	723.960.000,00		
2.11.02.2.02.0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	156.792.000,00		
2.11.02.2.02.0006	Penyelenggaraan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Risiko Lingkungan Hidup	567.168.000,00		
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	289.099.400,00		
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	289.099.400,00		
2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	289.099.400,00		
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	5.171.841.700,00		
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	5.171.841.700,00		
2.11.11.2.01.0007	Penyelesaian Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	3.171.841.700,00		
2.11.11.2.01.0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	2.000.000.000,00		
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.566.326.140,00		
2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.383.530.540,00		

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.383.530.540,00	
2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	642.989.100,00	
2.11.01.2.06.0002	Penyediaan Persediaan dan Perlengkapan Kantor	40.460.200,00	
2.11.01.2.06.0003	Penyediaan Pelatihan Rumah Tangga	3.736.300,00	
2.11.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	105.130.000,00	
2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13.662.600,00	
2.11.01.2.06.0009	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	480.000.000,00	
2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	290.506.500,00	
2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	146.506.500,00	
2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	144.000.000,00	
2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	249.300.000,00	
2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	249.300.000,00	
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	6.594.614.491,00	
2.12.0.00.0.00.10.0000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	6.594.614.491,00	
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	1.271.737.000,00	
2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	5.100.000,00	
2.12.02.2.01.0005	Pencatatan, Pendaftaran dan Penetapan Dokumen Atas Pasporan Pensiwa Kependudukan	5.100.000,00	
2.12.02.2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk	1.203.290.000,00	
2.12.02.2.02.0002	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkat Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	1.203.290.000,00	
2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	63.347.000,00	
2.12.02.2.03.0002	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Pensiwa Kependudukan dan Pencatatan Pensiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	63.347.000,00	
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	67.964.800,00	
2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	4.132.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
2.12.03.2.01.0001	Pencatatan, Pentabsahan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	4.132.000,00	
2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	63.832.800,00	
2.12.03.2.02.0004	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	63.832.800,00	
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	153.743.000,00	
2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemantauan dan Penyajian Database Kependudukan	147.945.000,00	
2.12.04.2.01.0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	146.928.000,00	
2.12.04.2.01.0002	Kartu Sama Pemertan Data Kependudukan	1.020.000,00	
2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	5.795.000,00	
2.12.04.2.03.0005	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	440.000,00	
2.12.04.2.03.0007	Sosialisasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	5.355.000,00	
2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	51.000.000,00	
2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	51.000.000,00	
2.12.05.2.01.0001	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	5.050.169.691,00	
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.106.000,00	
2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.071.000,00	
2.12.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.035.000,00	
2.12.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.255.503.363,00	
2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.255.503.363,00	
2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	736.244.465,00	
2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.444.800,00	
2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	367.839.365,00	
2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	63.747.100,00	
2.12.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	227.200,00	
2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	10.986.000,00	
2.12.01.2.06.0009	Pembiayaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	302.000.000,00	
2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	60.955.200,00	
2.12.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	12.240.000,00	
2.12.01.2.07.0006	Pengadaan Perlatan dan Mesin Lainnya	48.715.200,00	
2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	909.470.663,00	
2.12.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Survei Menyurat	3.974.000,00	
2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	251.496.663,00	
2.12.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Perlatan dan Pertengkapan Kantor	20.400.000,00	
2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	633.600.000,00	
2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	85.890.000,00	
2.12.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	85.890.000,00	
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	5.226.529.171,00	
2.13.0.00.0.00.11.0000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGORI	5.226.529.171,00	
2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	51.357.000,00	
2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	51.357.000,00	
2.13.02.2.01.0003	Facilitasi Penataan Kewenangan Desa	51.357.000,00	
2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	33.640.400,00	
2.13.03.2.01	Facilitasi Kerja Sama antar Desa	33.640.400,00	
2.13.03.2.01.0001	Facilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	33.640.400,00	
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	251.283.400,00	
2.13.04.2.01	Pembinaan dan Penguasaan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	251.283.400,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
2.13.04.2.01.0001	Facilities Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	75.681.400,00	
2.13.04.2.01.0003	Facilities Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	64.109.900,00	
2.13.04.2.01.0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	111.492.100,00	
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	701.168.600,00	
2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	701.168.600,00	
2.13.05.2.01.0002	Facilities Pemetaan, Pemberdayaan dan Penguatan kelembagaan Kelurahan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	80.771.300,00	
2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	40.084.600,00	
2.13.05.2.01.0009	Facilities Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	519.354.200,00	
2.13.05.2.01.0011	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	60.358.500,00	
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.189.079.771,00	
2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.845.000,00	
2.13.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.845.000,00	
2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.079.647.616,00	
2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.074.107.616,00	
2.13.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.540.000,00	
2.13.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	5.310.000,00	
2.13.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	6.310.000,00	
2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	514.406.620,00	
2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Peninghapan Kantor	66.739.200,00	
2.13.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8.536.920,00	
2.13.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	26.326.400,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Berang Catikan dan Penggandaan	13.784.100,00	
2.13.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.000.000,00	
2.13.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	395.000.000,00	
2.13.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	23.256.090,00	
2.13.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	23.256.000,00	
2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	174.137.520,00	
2.13.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	30.137.520,00	
2.13.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	144.000.000,00	
2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	389.477.015,00	
2.13.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	379.037.015,00	
2.13.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4.720.000,00	
2.13.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.720.000,00	
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	21.726.132.201,00	
2.14.0.00.0.00.21.0000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	21.726.132.201,00	
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	153.600.000,00	
2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	153.600.000,00	
2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	153.600.000,00	
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	7.066.509.800,00	
2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	3.160.527.000,00	
2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	2.500.712.000,00	
2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	659.815.000,00	
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	2.441.297.100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4	
2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jajangnya	53.105.600,00		
2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Keseriusan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	2.388.191.500,00		
2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Keseriusan Ber-KB	1.404.685.700,00		
2.14.03.2.04.0001	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Keseriusan Ber-KB	268.100.000,00		
2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berencana	1.198.585.700,00		
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	4.634.800.000,00		
2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Kotaheranan dan Kesejahteraan Keluarga	4.834.800.000,00		
2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelengkapan Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	2.746.800.000,00		
2.14.04.2.01.0024	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	2.088.000.000,00		
2.14.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.671.222.401,00		
2.14.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.500.000,00		
2.14.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.000.000,00		
2.14.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.500.000,00		
2.14.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.500.000,00		
2.14.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.500.000,00		
2.14.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.941.566.744,00		
2.14.01.2.02.0001	Penyesuaian Gaji dan Tunjangan ASN	5.936.942.744,00		
2.14.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.124.000,00		
2.14.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.500.000,00		
2.14.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.404.986.257,90		
2.14.01.2.06.0002	Penyesuaian Perbaikan dan Peningkatan Kantor	664.332.457,00		

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
2.14.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	37.905.000,00	
2.14.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	51.898.800,00	
2.14.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	19.200.000,00	
2.14.01.2.06.0009	Penyediaan Barang Raket Koordinasi dan Konsultasi SKPD	631.650.000,00	
2.14.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	644.658.000,00	
2.14.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	513.709.000,00	
2.14.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	130.949.000,00	
2.14.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.197.551.400,00	
2.14.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	131.951.400,00	
2.14.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.065.600.000,00	
2.14.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	469.960.000,00	
2.14.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	244.010.000,00	
2.14.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.000.000,00	
2.14.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	209.950.000,00	
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	8.046.649.589,00	
2.15.0.00.0.00.05.0000	DINAS PERHUBUNGAN	8.046.649.589,00	
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	1.584.932.634,00	
2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	266.933.000,00	
2.15.02.2.05.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	150.653.000,00	
2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	116.280.000,00	
2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekrutasi Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1.317.999.634,00	
2.15.02.2.06.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	210.000.000,00	
2.15.02.2.06.0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	108.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4		
2.15.02.2.06.0016	Pengadaan dan Pemasangan Peningkatan Jalan dalam rangka Manajemenn dan Rekyasa Lalu Lintas	899.999.634,00			
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.461.716.395,00			
2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.180.516.402,00			
2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.180.516.402,00			
2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	63.549.000,00			
2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.995.500,00			
2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.053.500,00			
2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.000.000,00			
2.15.01.2.06.0009	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	52.500.000,00			
2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.007.161.553,00			
2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36.801.553,00			
2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	970.560.000,00			
2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	210.490.000,00			
2.15.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	210.490.000,00			
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	4.096.807.101,00			
2.16.2.20.2.21.15.0000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	4.096.807.101,00			
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	398.680.000,00			
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	398.680.000,00			
2.16.02.2.01.0005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	137.120.000,00			
2.16.02.2.01.0006	Pelayanan Informasi Publik	30.560.000,00			
2.16.02.2.01.0007	Layanan Hubungan Media	106.000.000,00			
2.16.02.2.01.0012	Penyenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	125.000.000,00			
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	198.000.000,00			

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	199.000.000,00	
2.16.03.2.02.0010	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	198.000.000,00	
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.490.127.101,00	
2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.500.000,00	
2.16.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.800.000,00	
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.759.820.473,00	
2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.759.820.473,00	
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	219.848.600,00	
2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor	15.914.600,00	
2.16.01.2.06.0003	Penyediaan Perlengkapan Rumah Tangga	2.938.000,00	
2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.506.000,00	
2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	16.240.000,00	
2.16.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Baku dan Peralatan Penunjang-undangan	24.250.000,00	
2.16.01.2.06.0009	Penyediaan Bahan Baku dan Peralatan Penunjang-undangan	150.000.000,00	
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	455.738.028,00	
2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	32.912.688,00	
2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	422.825.340,00	
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	49.920.000,00	
2.16.01.2.09.0002	Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	49.920.000,00	
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	7.098.124.795,00	
2.17.0.00.0.00.12.0000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	7.098.124.795,00	
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	203.385.000,00	
2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	203.385.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
2.17.06.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	203.385.000,00	
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	510.000.600,00	
2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	510.000.600,00	
2.17.06.2.01.0005	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penguatan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	510.000.600,00	
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	1.089.986.200,00	
2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendidikan, Pelatihan, Kemudahan Permodalan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	1.089.986.200,00	
2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Penguatan Usaha Mikro	1.089.986.200,00	
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	1.540.429.980,00	
2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	1.540.429.980,00	
2.17.08.2.01.0006	Produk dan Produksi, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	3.754.323.015,00	
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.371.700,00	
2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.000.000,00	
2.17.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.898.000,00	
2.17.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.999.900,00	
2.17.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.473.800,00	
2.17.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.691.596.652,00	
2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.688.941.052,00	
2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.655.800,00	
2.17.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	556.255.700,00	
2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.457.800,00	
2.17.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
2.17.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Peningkatan Kantor	72.616.900,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4		
2.17.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	19.891.700,00			
2.17.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	61.290.000,00			
2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	29.999.800,00			
2.17.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8.899.500,00			
2.17.01.2.06.0009	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	358.000.000,00			
2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	288.798.963,00			
2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	19.998.963,00			
2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	268.800.000,00			
2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	202.300.000,00			
2.17.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40.920.000,00			
2.17.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	71.940.000,00			
2.17.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.290.000,00			
2.17.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	80.150.000,00			
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	7.634.743.584,00			
2.18.0.00.0.00.13.0000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	5.870.520.949,00			
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	174.732.100,00			
2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	174.732.100,00			
2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	174.732.100,00			
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	586.627.700,00			
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Merjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	586.627.700,00			
2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	260.666.600,00			
2.18.03.2.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	325.961.100,00			
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	412.743.526,00			

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	412.743.526,00	
2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	123.776.300,00	
2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	269.967.226,00	
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	365.199.920,00	
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	365.199.920,00	
2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permissistahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	45.510.000,00	
2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	286.269.920,00	
2.18.05.2.01.0006	Peningkatan Penanaman Modal	33.400.000,00	
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.331.217.703,00	
2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.684.600,00	
2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	632.000,00	
2.18.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	525.200,00	
2.18.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	501.200,00	
2.18.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	501.200,00	
2.18.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	3.215.411.813,00	
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.214.409.413,00	
2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	501.200,00	
2.18.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	501.200,00	
2.18.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	344.641.000,00	
2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	344.641.000,00	
2.18.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	512.180.600,00	
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.155.800,00	
2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Korpri/tena listrib/Pemerintahan Bangunan Kantor		

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLATON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.181.000,00	
2.18.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	52.206.600,00	
2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	78.440.000,00	
2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	20.697.200,00	
2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.000.000,00	
2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	209.500.000,00	
2.18.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	120.000.000,00	
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	131.257.490,00	
2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	39.857.490,00	
2.18.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Perawatan dan Perlengkapan Kantor	5.000.000,00	
2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	86.400.000,00	
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	125.042.000,00	
2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perlizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	114.060.000,00	
2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.982.000,00	
2.18.0.00.0.00.32.0000	ADMINISTRATOR KAWASAN EKONOMI KHUSUS SEI MANGKEI	1.764.222.635,00	
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	40.700.000,00	
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	40.700.000,00	
2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	1.978.522.635,00	
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.492.069.136,00	
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.491.171.536,00	
2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.697.600,00	
2.18.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	375.823.500,00	
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Peningkatan Kantor	42.802.100,00	
2.18.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	13.726.000,00	
2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	48.921.500,00	
2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Pengarsipan	15.373.900,00	
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	57.600.000,00	
2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	57.600.000,00	
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	52.230.000,00	
2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	41.480.000,00	
2.18.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.750.000,00	
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	8.767.527.956,00	
2.19.0.00.0.00.24.0000	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	8.767.527.956,00	
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SANGG KEPEREMUDAAN	1.736.251.700,00	
2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemuda, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	1.736.251.700,00	
2.19.02.2.01.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemuda	118.515.300,00	
2.19.02.2.01.0003	Koordinasi, Sosialisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	338.808.400,00	
2.19.02.2.01.0007	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	1.276.928.000,00	
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SANGG KEOLAHRAGAAN	2.792.905.400,00	
2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	758.820.000,00	
2.19.03.2.02.0002	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	233.820.000,00	
2.19.03.2.02.0003	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	525.000.000,00	
2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	1.500.000.000,00	
2.19.03.2.04.0003	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	1.500.000.000,00	
2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	534.085.400,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4	
2.19.03.2.05.0001	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	311.921.700,00		
2.19.03.2.05.0002	Pembudayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	42.655.700,00		
2.19.03.2.05.0005	Pemeliharaan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	179.508.000,00		
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	500.000.000,00		
2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	500.000.000,00		
2.19.04.2.01.0006	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	3.738.370.856,00		
2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	14.489.800,00		
2.19.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.484.600,00		
2.19.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.939.100,00		
2.19.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.066.100,00		
2.19.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.117.566.456,00		
2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.117.566.456,00		
2.19.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	442.424.600,00		
2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.618.000,00		
2.19.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	29.516.700,00		
2.19.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.976.900,00		
2.19.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	111.370.000,00		
2.19.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	87.143.000,00		
2.19.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.500.000,00		
2.19.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	202.300.000,00		
2.19.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	92.000.000,00		
2.19.01.2.06	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	20.000.000,00		
2.19.01.2.06.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
2.19.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	72.000.000,00	
2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	71.890.000,00	
2.19.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	71.890.000,00	
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	30.560.000,00	
2.16.2.20.2.21.15.0000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	30.560.000,00	
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	30.560.000,00	
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	30.560.000,00	
2.20.02.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	30.560.000,00	
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	30.560.000,00	
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	30.560.000,00	
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Penguasaan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	30.560.000,00	
2.21.02.2.01.0001	Penerapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sendi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.884.430.100,00	
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.884.430.100,00	
3.26.2.22.0.00.09.0000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	1.632.687.100,00	
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	1.632.687.100,00	
2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.632.687.100,00	
2.22.02.2.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemertanian Objek Penjualan Tradisi Budaya	532.672.200,00	
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	532.672.200,00	
2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	532.672.200,00	
2.22.03.2.01.0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	265.288.900,00	
2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SELARAH	265.288.900,00	
2.22.04.2.01	Pembinaan Selarjah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	265.288.900,00	
2.22.04.2.01.0003	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	265.288.900,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	453.781.900,00	
2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	453.781.900,00	
2.22.05.2.01.0002	Penetapan Cagar Budaya	6.011.092.897,00	
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	6.011.092.897,00	
2.23.2.24.0.00.06.0000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	1.979.221.038,00	
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	1.237.993.238,00	
2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	337.364.000,00	
2.23.02.2.01.0001	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	205.428.000,00	
2.23.02.2.01.0002	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	20.400.000,00	
2.23.02.2.01.0003	Pengembangan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	150.792.500,00	
2.23.02.2.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	524.008.738,00	
2.23.02.2.01.0008	Pengembangan Bahan Pustaka	741.227.800,00	
2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	286.878.000,00	
2.23.02.2.02.0001	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	60.720.000,00	
2.23.02.2.02.0002	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	383.829.800,00	
2.23.02.2.02.0003	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	4.031.871.859,00	
2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.033.500,00	
2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.033.500,00	
2.23.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.866.570.904,00	
2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.866.570.904,00	
2.23.01.2.02.0001	Penyelesaian Gaji dan Tunjangan ASN	781.161.400,00	
2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	177.465.900,00	
2.23.01.2.06.0002	Penyelesaian Peralatan dan Perlengkapan Kantor		

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
2.23.01.2.06.0003	Penyediaan Perbaikan Rumah Tangga	21.459.900,00	
2.23.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	114.700.200,00	
2.23.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	20.602.000,00	
2.23.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Baku dan Perakuran Perundang-undangan	2.990.000,00	
2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	425.000.000,00	
2.23.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	18.903.400,00	
2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	174.244.360,00	
2.23.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.435.000,00	
2.23.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	67.009.360,00	
2.23.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100.800.000,00	
2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	204.861.695,00	
2.23.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	97.030.000,00	
2.23.01.2.09.0006	Pemeliharaan Perlatan dan Mesin Lainnya	6.060.000,00	
2.23.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	101.771.695,00	
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	103.922.800,00	
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	103.922.800,00	
2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	49.156.500,00	
2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	49.156.500,00	
2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	54.766.300,00	
2.24.02.2.03.0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	54.766.300,00	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIMISATA	13.964.106.317,00	
3.26.2.22.0.00.09.0000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIMISATA DAN EKONOMI KREATIF	13.964.106.317,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4	
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	1.145.953.400,00		
3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	600.000.000,00		
3.26.02.2.01.0009	Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	600.000.000,00		
3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	545.953.400,00		
3.26.02.2.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	259.200.000,00		
3.26.02.2.03.0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	286.753.400,00		
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	5.456.884.000,00		
3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	5.456.884.000,00		
3.26.03.2.01.0004	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	406.243.100,00		
3.26.03.2.01.0005	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	119.659.000,00		
3.26.03.2.01.0006	Facilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	4.004.239.000,00		
3.26.03.2.01.0007	Pengujian Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	866.742.900,00		
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	1.213.391.600,00		
3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	1.213.391.600,00		
3.26.05.2.01.0009	Pembinaan dan Pelatihan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	1.036.090.900,00		
3.26.05.2.01.0010	Facilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	177.300.700,00		
3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.147.877.317,00		
3.26.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.510.400,00		
3.26.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.127.600,00		
3.26.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.127.600,00		
3.26.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	5.127.600,00		
3.26.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.127.600,00		
3.26.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.138.800.386,00		

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				
1	2	3	4	
3.26.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.129.274.386,00		
3.26.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.763.000,00		
3.26.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	4.763.000,00		
3.26.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	22.875.000,00		
3.26.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	22.875.000,00		
3.26.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	927.430.452,00		
3.26.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	272.179.352,00		
3.26.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	135.333.300,00		
3.26.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	104.904.000,00		
3.26.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	40.413.800,00		
3.26.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	374.600.000,00		
3.26.01.2.06	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.685.896.171,00		
3.26.01.2.06.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	633.896.171,00		
3.26.01.2.06.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.152.000.000,00		
3.26.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	352.364.908,00		
3.26.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	135.077.000,00		
3.26.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	164.217.108,00		
3.26.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	53.070.800,00		
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	47.625.995.498,00		
3.27.0.00.0.00.17.0000	DINAS PERTANIAN	47.625.995.498,00		
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.697.116.000,00		
3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	2.598.546.000,00		
3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	2.073.546.000,00		

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penyusunan Sarana Pendukung Pertanian	525.000.000,00	
3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Turbunan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	449.850.000,00	
3.27.02.2.02.0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	449.850.000,00	
3.27.02.2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	648.720.000,00	
3.27.02.2.05.0009	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	648.720.000,00	
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	18.350.000.000,00	
3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	18.350.000.000,00	
3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	9.690.000.000,00	
3.27.03.2.02.0008	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluhi di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	1.000.000.000,00	
3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	180.000.000,00	
3.27.03.2.02.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	7.400.000.000,00	
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	807.982.000,00	
3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	807.982.000,00	
3.27.04.2.01.0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	807.982.000,00	
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	1.293.544.400,00	
3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	1.293.544.400,00	
3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	758.484.400,00	
3.27.07.2.01.0003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	625.060.000,00	
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	23.477.353.098,00	
3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.006.100,00	
3.27.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.194.000,00	
3.27.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.060.000,00	
3.27.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.139.700,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
3.27.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.730.000,00	
3.27.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.862.400,00	
3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	19.494.141.998,00	
3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	19.494.141.998,00	
3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.520.563.000,00	
3.27.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	273.232.000,00	
3.27.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.490.800,00	
3.27.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	962.672.000,00	
3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	78.166.400,00	
3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.210.000.000,00	
3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	510.000.000,00	
3.27.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	510.000.000,00	
3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	656.802.000,00	
3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	340.002.000,00	
3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	316.800.000,00	
3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	283.840.000,00	
3.27.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	143.840.000,00	
3.27.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	40.000.000,00	
3.27.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100.000.000,00	
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	8.292.561.200,00	
3.31.3.30.0.00.08.0000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	8.292.561.200,00	
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	6.290.000.000,00	
3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	6.290.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4	
3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	6.290.000.000,00		
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	698.554.300,00		
3.30.04.2.01	Memjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	68.777.100,00		
3.30.04.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	68.777.100,00		
3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	561.573.100,00		
3.30.04.2.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	62.650.500,00		
3.30.04.2.02.0002	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	61.901.600,00		
3.30.04.2.02.0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdimapak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	417.020.800,00		
3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	68.604.100,00		
3.30.04.2.03.0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	68.604.100,00		
3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	686.543.500,00		
3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	686.543.500,00		
3.30.05.2.01.0002	Pameran Dagang Nasional	561.857.000,00		
3.30.05.2.01.0003	Pameran Dagang Lokal	124.686.500,00		
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	509.655.900,00		
3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	509.655.900,00		
3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	107.407.500,00		
3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	107.407.500,00		
3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	107.407.500,00		
3.30.07.2.01.0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	5.000.785.844,00		
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN			
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	1.089.359.500,00		

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	1.089.359.500,00	
3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1.089.359.500,00	
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	70.685.000,00	
3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPIU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	70.685.000,00	
3.31.04.2.01.0001	Facilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIIINas)	3.840.741.344,00	
3.31.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.999.400,00	
3.31.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.499.500,00	
3.31.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.499.500,00	
3.31.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.523.135.244,00	
3.31.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.523.135.244,00	
3.31.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	937.656.700,00	
3.31.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.392.000,00	
3.31.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	354.755.300,00	
3.31.01.2.06.0002	Penyediaan Perawatan dan Pelekykapan Kantor	12.564.500,00	
3.31.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	39.285.000,00	
3.31.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	26.879.900,00	
3.31.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan	3.780.000,00	
3.31.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Baku dan Perlengkapan Perundang-undangan	496.000.000,00	
3.31.01.2.06.0009	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	269.060.000,00	
3.31.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.340.000,00	
3.31.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	27.520.000,00	
3.31.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	259.200.000,00	
3.31.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4	
3.31.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Perwujudan Urusan Pemerintahan Daerah	85.890.000,00		
3.31.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	85.890.000,00		
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	61.376.678.643,00		
4.01	SEKRETARIAT DAERAH	61.376.678.643,00		
4.01.0.00.0.00.01.0000	SEKRETARIAT DAERAH	16.275.072.000,00		
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	1.109.999.900,00		
4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	336.817.100,00		
4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	198.059.900,00		
4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	578.122.900,00		
4.01.02.2.01.0003	Facilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	13.874.097.200,00		
4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	9.546.645.200,00		
4.01.02.2.02.0001	Facilitasi Pengabdian Bina Mental Spiritual	2.850.000.000,00		
4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	1.478.152.000,00		
4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	832.500.000,00		
4.01.02.2.03	Facilitasi dan Koordinasi Hukum	230.000.000,00		
4.01.02.2.03.0001	Facilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	400.120.000,00		
4.01.02.2.03.0002	Facilitasi Bantuan Hukum	202.380.000,00		
4.01.02.2.03.0003	Perdokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	457.874.900,00		
4.01.02.2.04	Facilitasi Kerja Sama Daerah	314.685.000,00		
4.01.02.2.04.0001	Facilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	41.648.200,00		
4.01.02.2.04.0002	Facilitasi Kerja Sama Luar Negeri	101.541.700,00		
4.01.02.2.04.0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	3.154.254.700,00		
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4	
4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	925.000.000,00		
4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	134.270.000,00		
4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	405.992.500,00		
4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	384.747.100,00		
4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	138.749.800,00		
4.01.03.2.02.0001	Facilites Penyusunan Program Pembangunan	22.649.400,00		
4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	35.000.000,00		
4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	81.100.400,00		
4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1.165.499.900,00		
4.01.03.2.03.0001	Pengadaan Pengadaan Barang dan Jasa	577.425.000,00		
4.01.03.2.03.0002	Pengadaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	461.131.000,00		
4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	126.943.900,00		
4.01.03.2.04	Pemertanian Kebijakan Sumber Daya Alam	925.005.000,00		
4.01.03.2.04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	875.075.000,00		
4.01.03.2.04.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembangunan dan Lingkungan Hidup	29.880.000,00		
4.01.03.2.04.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	19.950.000,00		
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	41.947.351.943,00		
4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	240.816.100,00		
4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16.244.000,00		
4.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	16.364.000,00		
4.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	16.444.000,00		
4.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	45.894.000,00		
4.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	17.294.000,00		

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
4.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	126.576.100,00	
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.287.205.130,00	
4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.236.536.530,00	
4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	17.370.600,00	
4.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	16.649.000,00	
4.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	57.743.000,00	
4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	37.649.000,00	
4.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	20.094.000,00	
4.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	11.340.323.700,00	
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	979.266.200,00	
4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Persediaan dan Perlengkapan Kantor	141.778.600,00	
4.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.890.540.400,00	
4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	696.275.000,00	
4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	374.649.000,00	
4.01.01.2.06.0006	Fasilitas Kunjungan Tamu	3.205.750.000,00	
4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60.064.500,00	
4.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Asip Dinamis pada SKPD	3.744.629.638,00	
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	791.121.100,00	
4.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	570.042.900,00	
4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	2.383.465.638,00	
4.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.544.705.964,00	
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	790.398.984,00	
4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4		
4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	893.172.000,00			
4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.861.135.000,00			
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.341.300.000,00			
4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	689.590.000,00			
4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.796.090.000,00			
4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	505.620.000,00			
4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	350.000.000,00			
4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.262.763.541,90			
4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	177.534.641,00			
4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakatan Dinas dan Alhul Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	305.228.900,00			
4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	180.000.000,00			
4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	600.000.000,00			
4.01.01.2.12	Fasilitas Kerumah tanggaan Sekretariat Daerah	1.639.071.800,00			
4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	907.205.600,00			
4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	542.601.600,00			
4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretaris Daerah	189.264.600,00			
4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	537.893.400,00			
4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelambagaan dan Analisis Jabatan	222.000.000,00			
4.01.01.2.13.0002	Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	221.992.700,00			
4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	93.900.700,00			
4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	950.899.650,00			
4.01.01.2.14.0001	Fasilitas Keprotokolan	499.999.750,00			
4.01.01.2.14.0002	Fasilitas Komunikasi Pimpinan	250.900.000,00			

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	199.999.500,00	
4.02	SEKRETARIAT DPRD	55.579.152.479,00	
4.02.5.02.0.00.02.0000	SEKRETARIAT DPRD	55.579.152.479,00	
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	17.102.562.900,00	
4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	51.154.200,00	
4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	5.422.000,00	
4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	37.683.600,00	
4.02.02.2.01.0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD	8.046.600,00	
4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	17.780.500,00	
4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS	3.603.500,00	
4.02.02.2.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	3.603.500,00	
4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD	3.603.500,00	
4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan	3.585.000,00	
4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pantangjajawaban APBD	3.385.000,00	
4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	2.677.044.600,00	
4.02.02.2.04.0001	Orientasi DPRD	300.000.000,00	
4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD	1.800.000.000,00	
4.02.02.2.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	180.000.000,00	
4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	336.000.000,00	
4.02.02.2.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD	52.326.000,00	
4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	6.718.600,00	
4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	7.717.800.000,00	
4.02.02.2.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah	1.374.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4	
4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses	6.343.800.000,00		
4.02.02.2.07	Pembahasan Kerja Sama Daerah	15.000.000,00		
4.02.02.2.07.0002	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	15.000.000,00		
4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	6.623.883.600,00		
4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	6.600.000.000,00		
4.02.02.2.08.0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	23.883.600,00		
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	38.476.489.579,00		
4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19.939.600,00		
4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.187.400,00		
4.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.674.800,00		
4.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.574.800,00		
4.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.689.600,00		
4.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	3.743.800,00		
4.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.059.400,00		
4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.323.197.204,00		
4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.318.832.404,00		
4.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.274.800,00		
4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	467.600.000,00		
4.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kepegawaian	17.600.000,00		
4.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	450.000.000,00		
4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.598.803.106,00		
4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	18.100.000,00		
4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Perlatan dan Peralengkapan Kantor	290.736.600,00		

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4	
4.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peraltian Rumah Tangga	38.057.500,00		
4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	862.665.000,00		
4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan	277.154.000,00		
4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.590.000,00		
4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3.107.500.000,00		
4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	35.700.000,00		
4.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	5.100.000,00		
4.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.600.000,00		
4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.314.050.000,00		
4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	168.000.000,00		
4.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Peralengkapan Kantor	70.050.000,00		
4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.076.000.000,00		
4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	921.367.970,00		
4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	38.420.000,00		
4.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	353.200.000,00		
4.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	529.747.970,00		
4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	27.397.002.395,00		
4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	26.716.602.305,00		
4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Paksiat Dinas dan Akibat DPRD	530.400.000,00		
4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	150.000.000,00		
4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	398.919.400,00		
4.02.01.2.16.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	398.919.400,00		
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
5.01	PERENCANAAN	7.586.866.183,00	
5.01.5.05.0.00.26.0000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	7.586.866.183,00	
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.414.696.700,00	
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	1.012.190.500,00	
5.01.02.2.01.0001	Analisis Kondisi Daerah, Pemastanahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	91.124.000,00	
5.01.02.2.01.0002	Koordinasi Pelaksanaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	42.703.000,00	
5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	79.434.000,00	
5.01.02.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	15.324.000,00	
5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	370.063.600,00	
5.01.02.2.01.0006	Penyajian Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	34.794.200,00	
5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	378.757.700,00	
5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	63.926.000,00	
5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	63.926.000,00	
5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	338.590.200,00	
5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	64.899.200,00	
5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkaitan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	273.681.000,00	
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINERGISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	946.904.900,00	
5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	316.448.000,00	
5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RP-JPD, RP-JMD dan RKPD)	98.342.600,00	
5.01.03.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	42.572.800,00	
5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RP-JPD, RP-JMD dan RKPD)	129.109.800,00	
5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	48.372.800,00	
5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perencanaan dan SDA (Sumber Daya Alam)	300.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4	
5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	98.605.400,00		
5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan	50.074.500,00		
5.01.03.2.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	81.334.500,00		
5.01.03.2.02.0006	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	69.781.600,00		
5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	330.536.900,00		
5.01.03.2.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	60.850.000,00		
5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	77.555.600,00		
5.01.03.2.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	46.196.000,00		
5.01.03.2.03.0006	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	145.933.300,00		
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.325.184.583,00		
5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.400.000,00		
5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14.400.000,00		
5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.401.597.983,00		
5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.401.597.983,00		
5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	73.200.000,00		
5.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	73.200.000,00		
5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	942.273.690,00		
5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.419.000,00		
5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	268.812.900,00		
5.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	87.225.700,00		
5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	75.292.200,00		
5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan	74.048.800,00		
5.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Binaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.000.000,00		

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4		
5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	418.475.000,00			
5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	357.959.000,00			
5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	116.399.000,00			
5.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25.560.000,00			
5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	216.000.000,00			
5.01.01.2.09	Peneliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	521.354.000,00			
5.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	462.864.000,00			
5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.190.000,00			
5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	51.300.000,00			
5.01.01.2.13	Penataan Organisasi	14.400.000,00			
5.01.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kerja Pemerintah Daerah	14.400.000,00			
5.02	KEUANGAN	589.289.328.838,00			
5.02.0.00.0.00.28.0000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	589.289.328.838,00			
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	479.922.601.463,00			
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	2.034.967.800,00			
5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	62.723.500,00			
5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	100.031.600,00			
5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	22.597.500,00			
5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	697.063.500,00			
5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	891.424.600,00			
5.02.02.2.01.0013	Penyusunan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	271.127.100,00			
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	1.169.095.100,00			
5.02.02.2.02.0003	Penyediaan, Pelaksanaan Pengendalian dan Pemertihan Anggaran Kas dan SPD	106.508.300,00			

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4	
5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	224.424.000,00		
5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Pelaksanaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan Pemotongan dan Penyelesaian Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	407.190.000,00		
5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Pemerintah dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	430.972.800,00		
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	1.146.126.820,00		
5.02.02.2.03.0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Pemerintahan dan Pengeluaran Kas Daerah	127.248.820,00		
5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Abai, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembelian, Pendapatan-LU dan Beban	267.833.700,00		
5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	524.344.420,00		
5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perluangjawab Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penyelenggaraan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	127.689.800,00		
5.02.02.2.03.0006	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LUP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	49.500.000,00		
5.02.02.2.03.0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Keuangan Daerah	49.500.000,00		
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	475.572.411.743,00		
5.02.02.2.04.0006	Analisis Perencanaan dan Penyelenggaraan Keuangan	14.000.000.000,00		
5.02.02.2.04.0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	461.572.411.743,00		
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	4.042.338.220,00		
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	4.042.338.220,00		
5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga	332.377.000,00		
5.02.03.2.01.0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	83.085.000,00		
5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	920.893.200,00		
5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	99.659.000,00		
5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	1.579.722.820,00		
5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah	396.856.000,00		
5.02.03.2.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	39.676.000,00		

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4	
5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penyusunan, Pemeliharaan, Perencanaan, Pemeliharaan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	11.985.800,00		
5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	120.596.800,00		
5.02.03.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	226.766.800,00		
5.02.03.2.01.0013	Pembuatan Pengelakan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	240.730.000,00		
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	4.317.173.000,00		
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	4.317.173.000,00		
5.02.04.2.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	140.520.000,00		
5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	619.475.000,00		
5.02.04.2.01.0003	Penyusunan dan Penjabatan Kebijakan Pajak Daerah	623.639.000,00		
5.02.04.2.01.0004	Penyelesaian Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	188.598.000,00		
5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	78.394.000,00		
5.02.04.2.01.0007	Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	721.750.000,00		
5.02.04.2.01.0011	Pemagihan Pajak Daerah	1.637.550.000,00		
5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemertasaan dan Pengawasan Pajak Daerah	212.247.000,00		
5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	95.000.000,00		
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	101.067.216.155,00		
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	367.370.500,00		
5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	67.733.600,00		
5.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	63.518.500,00		
5.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	69.555.900,00		
5.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	37.809.400,00		
5.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perhitungan DPA-SKPD	34.467.000,00		
5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	81.541.500,00		

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4		
5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	52.744.600,00			
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	70.130.040.035,00			
5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	69.971.089.235,00			
5.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penelaahan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	54.618.000,00			
5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	52.899.800,00			
5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	51.433.000,00			
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	111.005.000,00			
5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	21.643.000,00			
5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	32.826.000,00			
5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	36.472.000,00			
5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Baku dan Peraturan Perundang-undangan	20.054.000,00			
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	30.378.800.620,00			
5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.991.800,00			
5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	27.562.408.820,00			
5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.766.400.000,00			
5.03	KEPEGAWAIAN	5.940.896.201,00			
5.03.5.04.0.00.27.0000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	5.940.896.201,00			
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	1.576.969.095,00			
5.03.02.2.01	Pengadaan, Pembentukan dan Informasi Kepegawaian ASN	621.008.000,00			
5.03.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	25.250.000,00			
5.03.02.2.01.0004	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	294.738.000,00			
5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	290.820.000,00			
5.03.02.2.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian	10.200.000,00			

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PLACON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4		
5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	656.870.000,00			
5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN	73.680.000,00			
5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN	583.190.000,00			
5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	264.525.995,00			
5.03.02.2.03.0003	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	46.525.995,00			
5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	218.000.000,00			
5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	34.565.100,00			
5.03.02.2.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	34.565.100,00			
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENWIKOTA	4.363.927.106,00			
5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	27.035.000,00			
5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.964.500,00			
5.03.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.912.400,00			
5.03.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.240.000,00			
5.03.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.379.300,00			
5.03.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	4.390.700,00			
5.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.148.100,00			
5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.310.532.368,00			
5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.301.163.698,00			
5.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.504.500,00			
5.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	4.864.200,00			
5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	27.450.000,00			
5.03.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	27.450.000,00			
5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	621.229.000,00			

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4		
5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.607.800,00			
5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	58.985.800,00			
5.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12.649.600,00			
5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100.249.000,00			
5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	77.866.800,00			
5.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.920.000,00			
5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	350.750.000,00			
5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	205.440.718,00			
5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	90.240.718,00			
5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	115.200.000,00			
5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	172.240.000,00			
5.03.01.2.09.0001	Pemediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	164.530.000,00			
5.03.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.710.000,00			
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	1.634.444.570,00			
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1.634.444.570,00			
5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelambagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	1.634.444.570,00			
5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	979.937.570,00			
5.04.02.2.02.0008	Pembinaan, Penguudnasian, Fasilitas, Pemantuan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelambagaan dan Tenaga Pengembangan Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	654.507.000,00			
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	428.500.500,00			
5.01.5.05.0.00.26.0000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	428.500.500,00			
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	428.500.500,00			
5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	428.500.500,00			

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4	
5.05.02.2.04.0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	428.500.500,00		
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN			
6.01	INSPEKTORAT DAERAH	11.409.898.056,00		
6.01.0.00.0.00.03.0000	INSPEKTORAT	11.408.742.856,00		
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	1.427.785.000,00		
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	1.287.285.000,00		
6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	315.348.000,00		
6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	22.439.000,00		
6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja	116.000.000,00		
6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan	116.000.000,00		
6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa	400.000.000,00		
6.01.02.2.01.0006	Kerja Sama Pengawasan Internal	200.000.000,00		
6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APUP	117.500.000,00		
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	140.500.000,00		
6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	140.500.000,00		
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	926.842.500,00		
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	926.842.500,00		
6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	26.660.000,00		
6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	9.712.500,00		
6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	890.470.000,00		
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.054.115.356,00		
6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.056.000,00		
6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.528.000,00		

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4		
6.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	6.528.000,00			
6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.014.465.906,00			
6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.001.409.906,00			
6.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.528.000,00			
6.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	6.528.000,00			
6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.040.000.000,00			
6.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	40.000.000,00			
6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1.000.000.000,00			
6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.521.316.000,00			
6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.756.000,00			
6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	930.336.000,00			
6.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	97.947.600,00			
6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	140.510.000,00			
6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	125.016.400,00			
6.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacsan dan Peraturan Perundang-undangan	5.000.000,00			
6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.208.750.000,00			
6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	603.983.180,00			
6.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	603.983.180,00			
6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	195.200.000,00			
6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	80.000.000,00			
6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	115.200.000,00			
6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	666.094.270,00			
6.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	261.240.000,00			

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4		
6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	195.000.000,00			
6.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	209.654.270,00			
7.01.0.00.0.00.66.0000	KECAMATAN PAMATANG SILIMAHUTA	1.155.200,00			
6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.739.600,00			
6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.155.200,00			
7	UNSUR KEMULAYAHAN				
7.01	KECAMATAN	88.620.452.315,00			
7.01.0.00.0.00.36.0000	KECAMATAN SIANTAR	4.473.390.373,00			
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	14.231.000,00			
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	14.231.000,00			
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Kawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelaksanaan Bhirnreka Tunggal Ika serta Pemerintahan dan Pemeliharaan Keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia	14.231.000,00			
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENNIKOTA	4.459.159.373,00			
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.805.630.155,00			
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.805.630.155,00			
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	250.352.898,00			
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.350.000,00			
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	117.394.000,00			
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	49.334.648,00			
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	42.457.500,00			
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.316.750,00			
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	41.500.000,00			
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	203.866.320,00			

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4		
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	31.066.320,00			
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	172.800.000,00			
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	189.310.000,00			
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	189.310.000,00			
7.01.0.00.0.00.37.0000	KECAMATAN GUNUNG MALELA	2.978.267.250,00			
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	14.300.000,00			
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	14.300.000,00			
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelaksanaan Bhinneka Tunggal Ika serta Pemerintahan dan Pemeliharaan Ketertuan Negara Kesatuan Republik Indonesia	14.300.000,00			
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.963.967.250,00			
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.760.204.250,00			
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.760.204.250,00			
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	86.589.000,00			
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.135.900,00			
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Peningkatan Kantor	23.816.000,00			
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.412.500,00			
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	26.815.000,00			
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Pengarsipan	11.407.600,00			
7.01.01.2.06.0009	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12.000.000,00			
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	29.924.000,00			
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	11.424.000,00			
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18.500.000,00			
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15.480.000,00			

UKUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4		
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.480.000,00			
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	71.770.000,00			
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	44.970.000,00			
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.800.000,00			
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabitusi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	25.000.000,00			
7.01.0.00.0.00.38.0000	KECAMATAN GUNUNG MALIGAS	3.025.745.222,00			
7.01.05	PROGRAM PENYELENGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	53.850.000,00			
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	53.850.000,00			
7.01.05.2.01.0001	Pertinaan Wawasan Kelangkaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memanfaatkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelaksanaan Bhinneka Tunggal Ika serta Pemerintahan dan Pemeliharaan Ketertuan Negara Kesatuan Republik Indonesia	53.850.000,00			
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	10.380.000,00			
7.01.06.2.01	fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	10.380.000,00			
7.01.06.2.01.0011	fasilitasi Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban Umum	10.380.000,00			
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.961.515.222,00			
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.705.996.150,00			
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.705.996.150,00			
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	200.395.000,00			
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	200.395.000,00			
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	16.065.000,00			
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	16.065.000,00			
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.589.072,00			
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.589.072,00			
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	33.470.000,00			

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				
1	2	3	4	
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	33.470.000,00		
7.01.0.00.0.00.39.0000	KECAMATAN PANEI	1.294.803.431,00		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	200.000.000,00		
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	200.000.000,00		
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	200.000.000,00		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.094.803.431,00		
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.619.647.771,00		
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.619.647.771,00		
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	198.151.300,00		
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.297.700,00		
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	42.303.200,00		
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	19.990.100,00		
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	73.877.900,00		
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	17.982.400,00		
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	33.700.000,00		
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	191.608.360,00		
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.808.360,00		
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	172.800.000,00		
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	85.396.000,00		
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	84.580.000,00		
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	816.000,00		
7.01.0.00.0.00.40.0000	KECAMATAN PANOMBELAN PANEI	2.737.076.051,00		
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	10.800.000,00		

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				
1	2	3	4	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	10.800.000,00		
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Menerapkan Pengalaman Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelaksanaan Bhinneka Tunggal Ika serta Pemerintahan dan Pemeliharaan Keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia	10.800.000,00		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.726.276.051,00		
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.250.917.051,00		
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.250.917.051,00		
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	167.306.000,00		
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.385.000,00		
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	54.030.100,00		
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.440.900,00		
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	49.450.000,00		
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	65.000.000,00		
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	103.800.000,00		
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.000.000,00		
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100.800.000,00		
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	204.253.000,00		
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	51.103.000,00		
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.150.000,00		
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	150.000.000,00		
7.01.0.00.0.00.41.0000	KECAMATAN JORLANG HATARAN	3.211.245.480,00		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	200.050.542,00		
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	200.050.542,00		
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	200.050.542,00		

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.011.194.938,00			
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.999.200,00			
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	999.700,00			
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	999.700,00			
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	999.700,00			
7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.000.100,00			
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.302.020.789,00			
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.301.056.689,00			
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	964.100,00			
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	205.470.200,00			
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	846.600,00			
7.01.01.2.06.0002	Penyetaraan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60.500.000,00			
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	14.126.400,00			
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	51.707.400,00			
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	13.789.800,00			
7.01.01.2.06.0009	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	64.500.000,00			
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	27.990.000,00			
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	27.990.000,00			
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	271.499.149,00			
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	26.899.149,00			
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	244.800.000,00			
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	200.207.000,00			
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	137.467.600,00			

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1	2	3	KET
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	7.400.000,00	
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.320.000,00	
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.000.000,00	
7.01.0.00.0.00.42.0000	KECAMATAN RAYA KAHEAN	540.211.673,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	180.449.073,00	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	180.449.073,00	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	180.449.073,00	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	19.040.000,00	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	19.040.000,00	
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamanan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelaksanaan Baktioka Tunggal Ika serta Pemerintahan dan Pemeliharaan Keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia	19.040.000,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.232.744.650,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	178.704.100,00	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.754.000,00	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Peningkatan Kantor	51.406.600,00	
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	27.487.500,00	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	42.330.000,00	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	21.116.000,00	
7.01.01.2.06	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	107.556.500,00	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	21.156.500,00	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	86.400.000,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	87.012.000,00	
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	65.592.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	21.420.000,00		
7.01.0.00.0.00.43.0006	KECAMATAN BOSAR MALIGAS	2.877.391.809,00		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	200.000.000,00		
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	200.000.000,00		
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	200.000.000,00		
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	33.572.000,00		
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Perutusan Kepala Daerah	33.572.000,00		
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelaksanaan Bhinneka Tunggal Ika serta Pemerintahan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	33.572.000,00		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	2.643.819.859,00		
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.983.800,00		
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	995.950,00		
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	995.950,00		
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	995.950,00		
7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	995.950,00		
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.110.680.459,00		
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.108.656.559,00		
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	995.950,00		
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	995.950,00		
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	181.544.806,00		
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.623.200,00		
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor	66.436.400,00		
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Perlengkapan Rumah Tinggal	22.814.800,00		

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4		
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	43.296.000,00			
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	20.974.400,00			
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25.400.000,00			
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	31.680.000,00			
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	31.680.000,00			
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	170.952.800,00			
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.552.800,00			
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	158.400.000,00			
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	144.970.000,00			
7.01.01.2.09.0002	Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	44.970.000,00			
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100.000.000,00			
7.01.0.08.0.00.44.0000	KECAMATAN SIDAMANIK	3.372.329.360,00			
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	200.000.000,00			
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	200.000.000,00			
7.01.03.2.02.0002	Penhangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	200.000.000,00			
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	11.000.000,00			
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	11.000.000,00			
7.01.05.2.01.0001	Pembiayaan Wawasan Kebangsaan dan Kesatuan Nasional dalam rangka Memeritapkan Pengamulan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelaksanaan Bhinneka Tunggal Ika serta Pemerintahan dan Pemeliharaan Ketuhanan Negara Kesatuan Republik Indonesia	11.000.000,00			
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.161.329.360,00			
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.623.110.260,00			
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.621.110.560,00			
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	999.850,00			

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3	4
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	999.950,00	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	144.510.900,00	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.350.600,00	
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	35.764.900,00	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	14.691.000,00	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Pengabdian	59.940.300,00	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3.644.100,00	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	26.100.000,00	
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	30.567.200,00	
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.853.200,00	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	20.854.000,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	265.234.000,00	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	34.634.000,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	230.400.000,00	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	97.967.000,00	
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Perlatan dan Mesin Lainnya	91.580.000,00	
7.01.0.00.0.00.45.0006	KECAMATAN PAMATANG SIDAMANIK	6.397.000,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	3.077.362.315,00	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	200.000.000,00	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	200.000.000,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	200.000.000,00	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.877.362.315,00	
		2.341.436.376,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.331.438.370,00	
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	5.000.000,00	
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	5.000.000,00	
7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	5.000.000,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.000.000,00	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	156.008.400,00	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.302.000,00	
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	37.462.100,00	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.061.300,00	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35.683.000,00	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	48.500.000,00	
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	31.360.000,00	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	31.360.000,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	198.477.545,00	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12.277.545,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	187.200.000,00	
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	139.090.900,00	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	89.090.000,00	
7.01.01.2.13	Penataan Organisasi	50.000.000,00	
7.01.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	5.000.000,00	
7.01.0.00.0.00.46.0000	KECAMATAN TANAH JAWA	5.000.000,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	4.175.094.702,00	
		200.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	200.000.000,00	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	200.000.000,00	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	20.120.000,00	
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Kawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamanan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelaksanaan Bhinneka Tunggal Ika serta Pemerintahan dan Pemeliharaan Ketuhanan Negara Kesatuan Republik Indonesia	20.120.000,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA		
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.954.974.702,00	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.489.340.330,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.489.340.330,00	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	183.734.200,00	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.351.200,00	
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	46.574.500,00	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.855.900,00	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	36.445.000,00	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	16.027.600,00	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	52.480.000,00	
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	15.768.000,00	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15.708.000,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	156.642.172,00	
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24.202.172,00	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.840.000,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	129.600.000,00	
		109.550.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	87.140.000,00	
7.01.0.00.0.00.47.0000	KECAMATAN HATONDUHAN	22.410.000,00	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	2.160.026.560,00	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	11.422.000,00	
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Mementahkan Perjuangan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelaksanaan Bhinneka Tunggal Ika serta Pemerintahan dan Pemeliharaan Keamanan Negara Keseluruhan Republik Indonesia	11.422.000,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA		
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.148.604.560,00	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.895.986.760,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.895.986.760,00	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	160.767.800,00	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Pengekspansi Kantor	2.769.100,00	
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	66.029.900,00	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	8.822.800,00	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13.245.000,00	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	17.381.200,00	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	52.500.000,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	21.900.000,00	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	7.500.000,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	14.400.000,00	
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Penunjang Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	69.950.000,00	
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	55.670.000,00	
		14.280.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
7.01.0.00.0.00.48.0000	KECAMATAN DOLOK PANRIBUAN		
7.01.05	PROGRAM PENYELenggaraAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	2.017.416.372,00	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	12.750.000,00	
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Meningkatkan Partisipasi, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelaksanaan Bhinneka Tunggal Ika serta Pemerintahan dan Pemertahanan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	12.750.000,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
7.01.01.2.01	Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.004.666.372,00	
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.178.800,00	
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	586.400,00	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	500.400,00	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.589.339.472,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.589.339.472,00	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	164.064.100,00	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.298.000,00	
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	50.082.900,00	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	34.385.000,00	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	22.847.600,00	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	11.049.600,00	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	37.400.000,00	
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	33.210.000,00	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	33.210.000,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	102.896.000,00	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	16.498.000,00	
		86.400.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4		
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penuhjang Urusan Pemerintahan Daerah				
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	113.990.000,00			
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	83.990.000,00			
7.01.0.00.0.00.49.0000	KECAMATAN PURBA	30.000.000,00			
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2.747.790.141,00			
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	200.000.000,00			
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	200.000.000,00			
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	32.990.000,00			
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	32.990.000,00			
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wiwasan Kabangsaaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memanfaatkan Pengalaman Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelaksanaan Bhinneka Tunggal Ika serta Pemerintahan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	32.990.000,00			
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA				
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.514.800.141,00			
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.489.600,00			
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.499.700,00			
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	509.100,00			
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	480.800,00			
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.876.785.477,00			
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.876.785.477,00			
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	222.927.400,00			
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.989.400,00			
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	118.593.200,00			
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.210.600,00			
		31.745.000,00			

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4		
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.389.200,00			
7.01.01.2.06.0009	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30.000.000,00			
7.01.01.2.06	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	290.917.664,00			
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	14.999.664,00			
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.318.000,00			
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	273.600.000,00			
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Meik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	121.680.000,00			
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	96.660.000,00			
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	25.000.000,00			
7.01.0.00.0.00.50.0000	KECAMATAN HARANGAOL HORISON	2.017.961.361,00			
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	206.000.000,00			
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	200.000.000,00			
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	200.000.000,00			
7.01.05	PROGRAM PENYELenggaraAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	18.680.800,00			
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	18.680.800,00			
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemerintahan dan Pemerintahan Kelurahan Negara Kesatuan Republik Indonesia	18.680.800,00			
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	1.799.260.561,00			
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.294.802.861,00			
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.294.802.861,00			
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	160.611.700,00			
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.587.500,00			
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	54.619.500,00			

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3	4
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	16.317.300,00	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	43.540.000,00	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8.737.400,00	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	25.810.000,00	
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	30.668.000,00	
7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	14.100.000,00	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	16.568.000,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	199.488.000,00	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12.288.000,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	187.200.000,00	
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	113.716.000,00	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	55.410.000,00	
7.01.0.00.0.00.51.0000	KECAMATAN GIRSANG SIPANGAN BOLON	58.300.000,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	4.338.695.158,00	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	600.000.000,00	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	600.000.000,00	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	600.000.000,00	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	14.280.000,00	
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelaksanaan Bhirnaka Tunggal Ika serta Pemerintahan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	14.280.000,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENENIKOTA	14.280.000,00	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.724.415.158,00	
		10.358.400,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	4
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.359.400,00	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.786.846.502,00	
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.784.072.002,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.774.500,00	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	251.583.000,00	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.123.200,00	
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	37.699.000,00	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	16.796.800,00	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	114.072.000,00	
7.01.01.2.06.0006	Facilities Kunjungan Tamu	35.362.000,00	
7.01.01.2.06.0009	Penyediaan Jasa Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.040.000,00	
7.01.01.2.06	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	36.500.000,00	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	475.216.256,00	
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Peningkatan Kantor	43.216.256,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	432.000.000,00	
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	200.410.000,00	
7.01.0.00.0.00.52.0000	KECAMATAN DOLOK BATU NANGGAR	200.410.000,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	4.462.734.741,00	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	400.000.000,00	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	400.000.000,00	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	400.000.000,00	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	15.990.000,00	
		15.990.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4		
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Menerapkan Penyelamatan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemerintahan dan Pemeliharaan Kaulitan Negara Kesatuan Republik Indonesia	15.990.000,00			
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA				
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.046.744.741,00			
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.533.110.661,00			
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.533.110.661,00			
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	150.653.800,00			
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.339.000,00			
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	31.000.700,00			
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.033.000,00			
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan	56.676.300,00			
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	14.904.800,00			
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12.700.000,00			
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	242.400.280,00			
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12.000.280,00			
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	230.400.000,00			
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	120.580.000,00			
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rahabalisasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	70.580.000,00			
7.01.0.00.0.00.53.0000	KECAMATAN HUTA BAYU RAJA	50.000.000,00			
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	671.048.400,00			
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	180.131.400,00			
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17.985.100,00			
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	50.838.900,00			
		20.221.800,00			

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1	2	3	4
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	45.580.000,00	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.895.800,00	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	39.600.000,00	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	204.927.000,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.927.000,00	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	198.000.000,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	285.990.000,00	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	264.570.000,00	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	21.420.000,00	
7.01.0.00.0.00.54.0000	KECAMATAN JAWA MARAJA BAH JAMBI	2.091.112.345,90	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	21.978.000,00	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	21.978.000,00	
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelaksanaan Bhinneka Tunggal Ika serta Pemerintahan dan Pemeliharaan Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia	21.978.000,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA		
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.069.134.345,00	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.830.476.581,00	
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.825.476.581,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.000.000,00	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	120.272.300,00	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Peningkatan Kantor	6.595.000,00	
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	21.146.200,00	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	14.624.100,00	
		18.027.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			
DAFTAR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	14.280.000,00	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45.600.000,00	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	29.110.000,00	
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	29.110.000,00	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	36.299.464,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9.499.464,00	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	26.800.000,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	45.970.000,00	
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	45.970.000,00	
7.01.01.2.13	Pemetaan Organisasi	5.000.000,00	
7.01.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	5.000.000,00	
7.01.0.00.0.00.55.0000	KECAMATAN DOLOK PARDAMEAN	1.570.316.493,00	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	15.810.000,00	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	15.810.000,00	
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelaksanaan Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia	15.810.000,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.554.506.493,00	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.848.500,00	
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.134.500,00	
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.714.000,00	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.267.130.893,00	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.267.130.893,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	91.798.200,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4		
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.387.200,00			
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	11.541.000,00			
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	27.020.000,00			
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengardaan	4.350.000,00			
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	47.500.000,00			
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	21.660.000,00			
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	21.660.000,00			
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	117.198.900,00			
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	16.398.900,00			
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100.800.000,00			
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	40.870.000,00			
7.01.01.2.09.0001	Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Berangon Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40.870.000,00			
7.01.0.00.0.00.56.0000	KECAMATAN PEMATANG BANDAR	3.731.612.665,00			
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	333.520.000,00			
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	333.520.000,00			
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	333.520.000,00			
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	11.000.700,00			
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	11.000.700,00			
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Kawasan Kelangkaan dan Kelangkaan Nasional dalam rangka Memertajakan Pengalaman Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemerintahan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	11.000.700,00			
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.387.091.965,00			
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.722.963.255,00			
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.717.929.055,00			

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.500.000,00	
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.534.200,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	155.768.900,00	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.564.000,00	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Perbaikan dan Perengkapan Kantor	40.001.200,00	
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Perbaikan Rumah Tangga	13.063.600,00	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	54.000.500,00	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.389.500,00	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25.350.000,00	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Misk Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	46.420.000,00	
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	46.420.000,00	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	355.519.810,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9.919.810,00	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	345.600.000,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Misk Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	106.420.000,00	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	81.420.000,00	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	25.000.000,00	
7.01.0.00.0.00.57.0000	KECAMATAN BANDAR HULUAN	2.077.650.900,00	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	4.000.000,00	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	4.000.000,00	
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Kawasan Kelangkaan dan Kelangkaan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelaksanaan Bhinneka Tunggal Ika serta Pemerintahan dan Pemeliharaan Keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia	4.000.000,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN NIKOTA	2.073.650.900,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN					
1	2	3	4		
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.554.670.662,00			
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	225.900,00			
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	29.703.500,00			
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	11.735.500,00			
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	74.750.000,00			
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.550.000,00			
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	240.000.000,00			
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	81.995.338,00			
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9.995.338,00			
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	72.000.000,00			
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	77.980.000,00			
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	77.980.000,00			
7.01.0.00.0.00.58.0000	KECAMATAN BANDAR	4.593.763.713,00			
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	400.000.000,00			
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	400.000.000,00			
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	400.000.000,00			
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	16.808.000,00			
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	16.808.000,00			
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Ethnoloka Tunggal Bua serta Pemerintahan dan Pemeliharaan Keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia	16.808.000,00			
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.086.955.713,00			

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.998.838.692,00	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.998.838.692,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	244.420.400,00	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.453.000,00	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	90.142.700,00	
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Perlengkapan Rumah Tangga	44.546.700,00	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	50.095.500,00	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	26.942.500,00	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	19.240.000,00	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	54.672.000,00	
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	54.672.000,00	
7.01.01.2.08	Pengadaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	615.580.400,00	
7.01.01.2.08.0002	Pengadaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	25.180.400,00	
7.01.01.2.08.0004	Pengadaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	590.400.000,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	173.444.221,00	
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	157.900.000,00	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15.544.221,00	
7.01.0.06.0.00.59.0000	KECAMATAN BANDAR MASILAM	2.052.277.395,00	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM:	32.430.000,00	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	32.430.000,00	
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemerintahan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	32.430.000,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN NIKOTA	2.019.847.395,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4		
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.546.672.895,00			
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	339.639.700,00			
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.024.400,00			
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	145.122.600,00			
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	42.991.900,00			
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	84.150.000,00			
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	9.560.800,00			
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	44.800.000,00			
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	54.364.800,00			
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	11.164.800,00			
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	43.200.000,00			
7.01.01.2.09.0001	Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dirais atau Kendaraan Dinas Jabatan	79.170.000,00			
7.01.0.00.0.00.60.0000	KECAMATAN SILIMAKUTA	79.170.000,00			
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2.666.722.742,00			
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	200.000.000,00			
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	200.000.000,00			
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	24.855.000,00			
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	24.855.000,00			
7.01.05.2.01.0001	Pertemuan Wawasan Kebangsaan dan Keleluasan Nasional dalam rangka Memartapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemerintahan dan Pemeliharaan Keulahan Negara Kesatuan Republik Indonesia	24.855.000,00			
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.441.867.742,00			

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.856.100,00	
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.330.400,00	
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.325.700,00	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.749.762.426,00	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.747.534.226,00	
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	966.300,00	
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.261.900,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	124.324.800,00	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.912.200,00	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	36.803.200,00	
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.553.700,00	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	28.096.700,00	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaian	12.510.000,00	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	37.490.000,00	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9.854.000,00	
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	9.854.000,00	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	447.856.516,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8.992.516,00	
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.864.000,00	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	432.000.000,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	107.413.900,00	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Pertanian Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	92.780.000,00	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	14.633.900,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN					
1	2	3	4		
7.01.0.00.0.00.62.0000	KECAMATAN SILOU KAHEAN	1,725,598,357.00			
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	11,987,840.00			
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	11,987,840.00			
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengalaman Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelaksanaan Bhinneka Tunggal Ika serta Pemerintahan dan Pemeliharaan Ketuhanan Negara Kesatuan Republik Indonesia	11,987,840.00			
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1,713,610,517.00			
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1,393,158,461.00			
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1,393,158,461.00			
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	127,046,900.00			
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5,497,900.00			
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	22,787,800.00			
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	15,306,300.00			
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	37,094,100.00			
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	18,360,800.00			
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat, Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30,000,000.00			
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	36,745,600.00			
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	36,745,600.00			
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	86,559,556.00			
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8,899,556.00			
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5,660,000.00			
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	72,000,000.00			
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	70,100,000.00			
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	55,820,000.00			

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
7.01.01.2.06.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	14.280.000,00	
7.01.0.00.0.00.63.0000	KECAMATAN TAPIAN DOLOK	3.711.619.711,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	200.000.000,00	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	200.000.000,00	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	200.000.000,00	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	23.914.000,00	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	23.914.000,00	
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wewasan Kebangsaan dan Keselamatan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelaksanaan Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	23.914.000,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.487.705.711,00	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.837.117.311,00	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.837.117.311,00	
7.01.01.2.00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	170.243.800,00	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.286.000,00	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	45.340.000,00	
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	38.427.800,00	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	28.050.000,00	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	21.940.000,00	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	26.200.000,00	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	99.692.000,00	
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	99.692.000,00	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	276.634.000,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	17.434.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4		
7.01.01.2.09.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	259.200.000,00			
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	104.018.600,00			
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	104.018.600,00			
7.01.0.00.0.00.64.0000	KECAMATAN RAYA	5.094.889.789,00			
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	9.909.000,00			
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	9.909.000,00			
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	9.909.000,00			
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.000.000.000,00			
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.000.000.000,00			
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.000.000.000,00			
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	75.592.000,00			
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	75.592.000,00			
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wilayah Kecamatan dan Kelurahan Nasional dalam rangka Meningkatkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelaksanaan Bhinneka Tunggal Ika serta Pemerintahan dan Pemertuuran Kautulan Negara Kesatuan Republik Indonesia	75.592.000,00			
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	3.770.000,00			
7.01.06.2.01	Facilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	3.770.000,00			
7.01.06.2.01.0006	Facilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	3.770.000,00			
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.985.618.789,00			
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.303.370.169,00			
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.303.370.169,00			
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	434.965.000,00			
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.363.500,00			
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Perakitan dan Peningkatan Kantor	217.559.800,00			

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	32.020.300,00	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	82.071.400,00	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	48.150.000,00	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48.800.000,00	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	150.264.516,00	
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	150.264.516,00	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	880.801.104,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	16.801.104,00	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	864.000.000,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	226.218.000,00	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	180.900.000,00	
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	45.318.000,00	
7.01.0.00.0.00.65.0000	KECAMATAN UJUNG PADANG	2.553.967.469,00	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	23.924.000,00	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	23.924.000,00	
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Menerapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemerintahan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	23.924.000,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.530.043.469,00	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.912.350.521,00	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.812.350.521,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	105.641.200,00	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.570.800,00	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.223.700,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.805.700,00	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Barisan Logistik Kantor	23.580.000,00	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.081.000,00	
7.01.01.2.06.0009	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	53.400.000,00	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	222.000.000,00	
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	222.000.000,00	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	198.346.000,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.000.000,00	
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Perawatan dan Peningkatan Kantor	10.546.000,00	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	172.800.000,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	94.705.748,00	
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	50.690.000,00	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	44.015.748,00	
7.01.0.00.0.00.66.0000	KECAMATAN PAMATANG SILMAHUTA	1.704.764.198,00	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	3.556.000,00	
7.01.05.2.01	Penyenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	3.556.000,00	
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelaksanaan Bhinneka Tunggal Ika serta Pemerintahan dan Pemeliharaan Ketertuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	3.556.000,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	1.712.036.198,00	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.739.600,00	
7.01.01.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.584.400,00	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.362.689.298,00	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.361.119.998,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				
1	2	3	4	
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.569.300,00		
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	148.277.000,00		
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.417.700,00		
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	29.844.300,00		
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	26.738.300,00		
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	44.403.900,00		
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	31.200.000,00		
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	52.360.300,00		
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9.160.300,00		
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	43.200.000,00		
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	145.970.000,00		
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	45.970.000,00		
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100.000.000,00		
7.01.01.2.09.0009		1.296.293.591,00		
7.01.01.00.0.00.07.0000	KECAMATAN DOLOG MASAGAL	15.893.600,00		
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	15.893.600,00		
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	15.893.600,00		
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelaksanaan Bhinneka Tunggal Ika serta Pemerintahan dan Pemeliharaan Keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia	15.893.600,00		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.280.399.991,00		
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.046.104.455,00		
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.036.117.955,00		
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.000.000,00		
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	4.986.500,00		

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	13.725.000,00		
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakan Dinas beserta Air/bul Kelengkapannya	13.725.000,00		
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	103.908.700,00		
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.746.400,00		
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	41.982.000,00		
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12.077.200,00		
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.903.100,00		
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25.200.000,00		
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	9.938.000,00		
7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9.938.000,00		
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.983.844,00		
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8.983.844,00		
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	97.739.992,00		
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	36.530.000,00		
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	61.209.992,00		
7.01.5.02.0.00.33.0000	KECAMATAN DOLOK SILAU	1.671.272.501,00		
5.02.02	PROGRAM PENGELUARAN KEUANGAN DAERAH	2.777.100,00		
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	2.777.100,00		
5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	1.336.100,00		
5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	1.441.000,00		
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	34.213.100,00		
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	34.213.100,00		

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4	
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Penggunaan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelaksanaan Bhinneka Tunggal Ika serta Pemerintahan dan Pemeliharaan Keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia	34.213.100,00		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	1.634.282.301,00		
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.373.500,00		
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.373.500,00		
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.344.863.801,00		
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.342.010.801,00		
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.204.000,00		
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.448.000,00		
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	191.205.000,00		
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.116.500,00		
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Perlengkapan dan Perlengkapan Kantor	54.412.400,00		
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Perlengkapan Rumah Tangga	17.679.800,00		
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	58.100.000,00		
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.696.300,00		
7.01.01.2.06.0009	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	47.200.000,00		
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	51.510.000,00		
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8.310.000,00		
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	43.200.000,00		
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	45.530.000,00		
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	45.530.000,00		
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM			
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	82.318.827.739,00		

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
8.01.0.00.0.00.30.0000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	82.318.827.739,00	
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	964.170.400,00	
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanfaatan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	964.170.400,00	
8.01.02.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	214.013.800,00	
8.01.02.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	750.156.600,00	
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	73.889.895.800,00	
8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanfaatan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelengkapan Pemerintahan, Perwalian dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemanfaatan Situasi Politik	73.889.895.800,00	
8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelengkapan Pemerintahan, Perwalian dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemanfaatan Situasi Politik di Daerah	140.641.000,00	
8.01.03.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelengkapan Pemerintahan, Perwalian dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemanfaatan Situasi Politik di Daerah	1.902.161.000,00	
8.01.03.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelengkapan Pemerintahan, Perwalian dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemanfaatan Situasi Politik di Daerah	71.847.093.800,00	
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	650.000.000,00	
8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanfaatan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	650.000.000,00	
8.01.04.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	650.000.000,00	
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	318.365.400,00	
8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanfaatan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	318.365.400,00	
8.01.05.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencogahan Penyabutan Narkoba, Fasilitas Kendaraan Umum Beragama dan Penghijab Keperayaan di Daerah	168.365.500,00	
8.01.05.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencogahan Penyabutan Narkoba, Fasilitas Kendaraan Umum Beragama dan Penghijab Keperayaan di Daerah	149.999.900,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	699.999.500,00	
8.01.06.2.01	Penusunan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemertajapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	699.999.500,00	
8.01.06.2.01.0002	Penyusunan Bahan Penusunan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Diri, Kerja Sama Intelijen, Pemertajapan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelenyamanan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	99.999.600,00	
8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	599.999.900,00	
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.796.396.639,00	
8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	45.176.600,00	
8.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKD-SKPD	19.999.800,00	
8.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	19.999.800,00	
8.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.177.000,00	
8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.990.318.089,00	
8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.974.767.089,00	
8.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.177.000,00	
8.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	5.177.000,00	
8.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5.177.000,00	
8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.409.530.200,00	
8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	481.220.800,00	
8.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	29.643.400,00	
8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	110.793.000,00	
8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	143.876.200,00	
8.01.01.2.06.0009	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	573.500.000,00	
8.01.01.2.06.0010	Pembastaraan Arsip Dinamis pada SKPD	70.494.800,00	
8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	205.378.950,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4	
8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	133.378.950,00		
8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	72.000.000,00		
8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	145.992.800,00		
8.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	77.480.000,00		
8.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	9.000.000,00		
8.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	59.512.800,00		
X	NON URUSAN			
X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX	4.352.475.248,00		
2.18.0.00.0.00.32.0000	ADMINISTRATOR KAWASAN EKONOMI KHUSUS SEI MANGKEI	255.000.000,00		
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	375.623.500,00		
X.XX.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	255.000.000,00		
7.01.0.00.0.00.42.0000	KECAMATAN RAYA KAHEAN	1.892.022.050,00		
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.859.472.050,00		
X.XX.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	178.704.100,00		
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	32.550.000,00		
X.XX.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.195.780.398,00		
7.01.0.00.0.00.53.0000	KECAMATAN HUTA BAYU RAJA	2.195.700.398,00		
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.195.780.398,00		
X.XX.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.672.800,00		
7.01.0.00.0.00.66.0000	KECAMATAN PAMATANG SILIMAHUTA	148.277.000,00		
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			
X.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.672.800,00		

BAB V

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Prinsip pengelolaan keuangan daerah adalah mencapai keseimbangan antara pendapatan dan belanja, sehingga defisit anggaran diupayakan untuk diminimalkan. Jika pembiayaan diperlukan untuk menutup defisit anggaran berjalan, arah pengelolaan pembiayaan harus berdasarkan prinsip kemampuan dan kesinambungan fiskal daerah. Dalam rangka menutup defisit anggaran, daerah dapat melakukan pinjaman daerah yang bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah lain, lembaga keuangan Bank, lembaga keuangan bukan Bank dan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembiayaan Daerah terdiri dari sumber penerimaan pembiayaan daerah dan sumber pengeluaran pembiayaan daerah.

5.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah

Penerimaan pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan yang diperoleh. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah melalui, penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA) yaitu penerimaan daerah meliputi Sisa Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SILPA) tahun lalu dan transfer dari Dana Cadangan. Penggunaan SILPA diupayakan menurun seiring dengan semakin efektifnya penggunaan Anggaran.

5.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pengeluaran pembiayaan daerah dimaksudkan untuk memanfaatkan sisa anggaran yang pada tahun anggaran 2024 diproyeksikan untuk penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah pada perusahaan BUMD yaitu Penyertaan modal pada Bank Daerah Sumatera Utara.

Arah kebijakan penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah kabupaten simalungun secara rinci plafon pembiayaan daerah tahun 2023 sebagai mana yang tergambar pada tabel 5.1

Tabel 5.1
Rincian Plafon Anggaran Pembiayaan

Tahun Anggaran 2024

Nomor Urut	URAIAN	ANGGARAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)
		APBD TAHUN 2023 (Rp)	PROYEKSI APBD TAHUN 2024 (Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5 = 4 - 3
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	86.403.742.942,00	80.000.000.000,00	(6.403.742.942,00)
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	86.403.742.942,00	80.000.000.000,00	(6.403.742.942,00)
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00
6.2.02	Penyerahan Modal Daerah	-	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	86.403.742.942,00	73.000.000.000,00	(13.403.742.942,00)
6.3	Sisa Lebih pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0,00	0,00	0,00

BAB VI PENUTUP

Sesuai dengan Kebijakan umum APBD Tahun Anggaran 2024, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2024 mempunyai tema memacu Pembangunan Infrastruktur, Pertanian, Kesehatan dan Sumber Daya Manusia. Setiap program dan kegiatan yang ada didalam PPAS APBD Kabupaten Simalungun Tahun 2024 adalah untuk Sarana Prasarana Pendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah, sehingga dengan demikian diharapkan pendapatan masyarakat jadi meningkat, pemenuhan pelayanan dasar yang meliputi peningkatan kualitas dan kuantitas layanan pendidikan, kesehatan dan infrastruktur dasar bagi masyarakat Kabupaten Simalungun terwujud serta meningkatkan profesionalisme aparat birokrasi dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Demikianlah Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024 ini dibuat dan disepakati antara Pemerintah Kabupaten Simalungun dengan DPRD Kabupaten Simalungun yang akan dijadikan pedoman bagi Pemerintah Simalungun dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Pamatang Raya, 11 Agustus 2023



TIMBUL JAYA SIBARANI, SH.,MH
KETUA

S. SAMRIN GIRSANG, S.Pd
WAKIL KETUA

ELIAS BARUS, SE
WAKIL KETUA

SASTRA JOYO SIRAIT, SH
WAKIL KETUA



RADIAPOR HASIHOLAN SINAGA, SH.,MH